



Laporan Kinerja

Sekretariat Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



Triwulan IV

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Kusdiantoro

Penyusun:

R. Tomi Supratomo

Muhajah Babny Muslim

Luh Putu Ayu Damayanti

Adhitya

Enny Syafrida Marpaung

Chairiyanti

Punto Apri Sembodo

Elvanri Anggi Widianti

Tasya Annisa Putri

Kontributor:

Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Setditjen PKRL) Tahun 2024. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Setditjen PKRL dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis Setditjen PKRL pada Tahun 2024 dalam rangka melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Setditjen PKRL dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Dokumen ini merupakan menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak untuk upaya perbaikan dan pengembangan kegiatan kedepan. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Setditjen PKRL, karenanya kami mohon masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan masa mendatang.

Jakarta, 14 Januari 2025



Kusdiantoro

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Setditjen PKRL) Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Setditjen PKRL, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PKRL terdapat 30 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang termasuk dalam sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Setditjen PKRL. Pengukuran capaian kinerja Setditjen PKRL Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi pada masing-masing indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen PKR Tahun 2024 sebesar 106,26 (termasuk kriteria baik).

Pada tahun 2024 terdapat 28 indikator yang tercapai sesuai dan/atau melebihi target yakni:

- 1) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Setditjen PKRL tercapai 96,84 dari target 71 dengan persentase capaian sebesar 120%;
- 2) Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setditjen PRL tercapai 88,85 dari target 88 dengan persentase capaian sebesar 100,97%;
- 3) Nilai PM SAKIP DJPKRL tercapai 89,07 dari target 84 dengan persentase capaian sebesar 106,04%;
- 4) Nilai PM SAKIP Lingkup Setditjen PKRL tercapai 89,5 dari target 81 dengan persentase capaian sebesar 110,49%;
- 5) Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL tercapai 3,73 dari target 3,3 dengan persentase capaian sebesar 113,03%;
- 6) Laporan SPIP yang disusun Lingkup Setditjen PKRL tercapai sesuai target yakni 4 dokumen dengan persentase capaian sebesar 100%;
- 7) Persentase unit kerja Lingkup Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar sebanyak 133% dari target 94% dengan persentase capaian sebesar 120%;

- 8) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan tercapai 96,97% dari target 80% dengan persentase capaian sebesar 120%;
- 9) Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Setditjen PKRL telah tercapai sesuai target yakni 100% dengan persentase capaian sebesar 100%;
- 10) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup DJPKRL tercapai 87,76 dari target 80 dengan persentase capaian sebesar 109,70%;
- 11) Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup DJPKRL telah tercapai 100 dari target 80 dengan persentase capaian sebesar 120%;
- 12) Persentase Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL telah tercapai sesuai target yakni 100% dengan persentase capaian sebesar 100%;
- 13) Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tercapai sesuai target yakni 100% dengan persentase capaian sebesar 100%;
- 14) Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut telah tercapai sesuai target 100% dengan persentase capaian sebesar 100%;
- 15) Informasi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Dikelola dan Dipublikasikan sebanyak 2.830 dari target 2.160 informasi dengan persentase capaian sebesar 120%;
- 16) Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti tercapai sesuai targetnya yakni 100% dengan persentase capaian sebesar 110%;
- 17) Nilai keterbukaan informasi publik tercapai 100 dari target 90 dengan persentase capaian sebesar 111,11%;
- 18) Presentase Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA Lingkup DJPKRL Ditindaklanjuti tercapai sesuai targetnya yakni 100% dengan persentase capaian sebesar 100%;
- 19) Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi Lingkup DJPKRL tercapai sesuai targetnya yakni 100% dengan persentase capaian sebesar 100%;
- 20) Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi Lingkup DJPKRL tercapai sesuai targetnya yakni 100% dengan persentase capaian sebesar 100%;
- 21) Persentase Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan tercapai sesuai targetnya yakni 100% dengan persentase capaian sebesar 100%;

- 22) Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati tercapai 100 dari target 90 dengan persentase capaian sebesar 111,11%;
- 23) Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang disusun tercapai sesuai targetnya yakni 100% dengan persentase capaian sebesar 100%;
- 24) Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang Telah Disepakati tercapai 82,5% dari target 75% dengan persentase capaian sebesar 110%;
- 25) Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan tercapai sesuai targetnya yakni 100% dengan persentase capaian sebesar 100%;
- 26) Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN tercapai sesuai targetnya yakni 100% dengan persentase capaian sebesar 100%;
- 27) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Setditjen PKRL tercapai 97,55 dari target 80 120%;
- 28) Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan sesuai ketentuan tercapai sesuai targetnya yakni 100% dengan persentase capaian sebesar 100%.

Selain itu, 2 indikator lainnya yang belum mencapai target, yakni:

- 29) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Setditjen PRL tercapai 85,67 dari target 93,76 dengan persentase capaian sebesar 91,37%; dan
- 30) Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Setditjen PRL tercapai 94,87 dari target 95 dengan persentase capaian sebesar 99,86% .

Pagu anggaran di Lingkup Setditjen PKRL Tahun 2024 adalah Rp117.284.782.000 dengan realisasi mencapai Rp111.271.420.305 atau 94,87%. Realisasi anggaran tersebut telah mendukung pencapaian indikator kinerja Setditjen PKRL pada tahun 2024.

Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2024 terdapat beberapa tantangan antara lain:

- 1) Rendahnya aspek penilaian pada Deviasi Halaman III DIPA karena ketidaksesuaian perencanaan dan realisasi anggaran.
- 2) Tidak terlaksananya beberapa kegiatan pada proyek *Ocean for Prosperity*-LAUTRA karena tambahan Anggaran dari PHLN Lautra pada akhir periode Triwulan III TA. 2024 dan keterbatasan waktu pelaksanaan
- 3) Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah masih terkendala pada Pengajuan Pembayaran Revolving UP.

- 4) Masih rendahnya pengamanan aset berupa tanah di PPKT dan belum disepakatinya perjanjian penggunaan BMN antara KKP dengan Sekretariat Regional CTI-CFF.

Sebagai upaya peningkatan kinerja Setditjen PKRL ke depan, terdapat rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

- 1) Perlu dilakukan pemantauan rutin untuk memastikan kesesuaian perencanaan penarikan dana dengan realisasi kegiatan, terutama jika terdapat penambahan pagu anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai dengan perencanaan waktu pelaksanaan.
- 2) Mengusulkan kembali kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun 2024 selama kegiatan tersebut masih relevan dengan pencapaian kegiatan
- 3) Mengoptimalkan pembayaran belanja kegiatan, salah satunya dengan menggunakan metode pembayaran Langsung (LS)
- 4) Meningkatkan pengamanan dan penggunaan aset BMN, antara lain melalui pembuatan pagar dan papan plang di tanah PPKT dan penandatanganan penandatanganan perjanjian penggunaan BMN gedung Sekretariat Regional CTI-CFF.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN	1
1.3 ISU STRATEGIS	2
1.4 TUGAS DAN FUNGSI	2
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 SASARAN KEGIATAN	6
2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2024	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1 SK 1. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK LINGKUP SETDITJEN PKRL.....	18
IK 1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PKRL	19
IK 2. Persentase Realisasi Anggaran lingkup Setditjen PKRL	25
IK 3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Setditjen PKRL	29
IK 4. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setditjen PKRL.....	31
IK 5. Nilai PM SAKIP DJPKRL.....	37
IK 6. Nilai PM SAKIP Lingkup Setditjen PKRL.....	41
IK 7. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL	50
IK 8. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Setditjen PKRL	54
IK 9. Persentase Unit Kerja Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	56
IK 10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan.....	59
IK 11. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Setditjen PKRL.....	62
IK 12. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup DJPKRL ..	65

IK 13. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPKRL	69
IK 14. Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL	72
IK 15. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	78
IK 16. Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	87
IK 17. Informasi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Dikelola dan Dipublikasikan	91
IK 18. Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti ...	94
IK 19. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	96
IK 20. Presentase Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA Lingkup DJPKRL	99
IK 21. Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi di Lingkungan DJPKRL.....	101
IK 22. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi di lingkungan DJPKRL	103
IK 23. Persentase Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan.....	106
IK 24. Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati	108
IK 25. Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun	119
IK 26. Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang Telah Disepakati ..	126
IK 27. Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	129
IK 28. Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN	141
IK 29. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Setditjen PKRL..	143
IK 30. Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	148
3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	152
BAB IV PENUTUP.....	155
4.1 KESIMPULAN	155
4.2 REKOMENDASI	157
4.3 TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA	158
LAMPIRAN.....	162

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Dan Ruang Laut	3
Gambar 2	Keragaan Pegawai Setditjen PKRL Tahun 2024	4
Gambar 3	Nilai Capaian Kinerja Setditjen Pengelolaan Kelautan Dan Laut Tahun 2024	14
Gambar 4	Formulasi Capaian IKPA	20
Gambar 5	Anggaran Setditjen Pkrl Tahun 2022-2024 (Rp Juta).....	26
Gambar 6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Setditjen PKRL Tahun 2024	30
Gambar 7	Karakteristik Level Maturitas SPIP.....	51
Gambar 8	Dokumen/Bukti/Data Maturitas SPIP	51
Gambar 9	Penandatanganan PKS Antara Ditjen PKRL Dan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Di Yogyakarta, 6 Maret 2024	117
Gambar 10	Penandatanganan PKS Antara Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen PKRL Dengan PT Free The Sea Dan Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Batam Di Semarang, 25 April 2024	117
Gambar 11	Penandatanganan PKS Antara Ditjen PKRL Dengan BPOM.	118
Gambar 12	Penandatanganan PKS Antara BPSPL Padang Dengan Fakultas Kelautan Dan Perikanan, Universitas Syiah Kuala..	118
Gambar 13	Penandatanganan <i>Technical Agreement</i> Antara Direktorat Penataan Ruang Laut, Ditjen PKRL Dengan Fiso Xiamen. ...	119
Gambar 14	Ats Senior Government Officials' Meeting (SGOM) Di Brisbane, Australia, 25 Juni 2024.....	125
Gambar 15	Monitoring And Evaluation Working Gorup Meeting CTI-CFF Di Port Moresby, Papua Nugini Pada 15 – 17 Juli 2024.....	125
Gambar 16	The 19th Senior Officials Meeting Di Dili, Timor Leste, Pada 4-5 December 2024.....	126
Gambar 17	Monev Lapang KB Antara KKP Dan Rare Di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara	128
Gambar 18	Monev Lapang KB Antara KKP Dan WWF Indonesia Di Kupang Dan Kabupaten Alor, NTT	129
Gambar 19	Diagram Hasil Skm Upp Lingkup DJPKRL Tahun 2024.....	138
Gambar 20	Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Dan Ruang Laut Tahun 2024	163

Gambar 21 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Dan Ruang Laut Tahun 2024 (Revisi) 167



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran dan Indikator Kinerja Setditjen PKRL Tahun 2020-2024 (semula)	6
Tabel 2 Sasaran dan Indikator Kinerja Setditjen PKRL Tahun 2024 (menjadi)	8
Tabel 3 Indikator dan Target Kinerja Setditjen PRKL Tahun 2024.....	10
Tabel 4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Setditjen PKRL Tahun 2024	14
Tabel 5 Capaian IK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PKRL pada Tahun 2024	21
Tabel 6 Nilai IKPA lingkup Setditjen PKRL Tahun 2024	21
Tabel 7 Perbandingan IKPA Setditjen PKRL Tahun 2020-2024	22
Tabel 8 Perbandingan IKPA Setditjen PKRL Tahun 2020-2024	23
Tabel 9 Capaian IK Persentase Realisasi Anggaran lingkup Setditjen PKRL pada Tahun 2024	25
Tabel 10 Tabel Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran	27
Tabel 11 Capaian IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Setditjen PKRL Pada Tahun 2024	30
Tabel 12 Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Setditjen PKRL Tahun 2024	33
Tabel 13 Tabel Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN.....	34
Tabel 14 Kategori Nilai PM SAKIP	38
Tabel 15 Capaian IK PM SAKIP DJPKRL Tahun 2024	39
Tabel 16 Perbandingan Nilai AKIP DJPRL Tahun 2024 dan Tahun 2023 ..	40
Tabel 17 Kategori Nilai PM SAKIP	42
Tabel 18 Capaian IK PM SAKIP di Lingkup Setditjen PKRL Tahun 2024...43	
Tabel 19 Perbandingan Nilai AKIP Setditjen PKRL Tahun 2024 dan Tahun 2023	47
Tabel 20 Tabel Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP ..48	
Tabel 21 Capaian IK Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL pada Tahun 2024.....	51
Tabel 22 Hasil Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Maturitas Spikomponen Struktur Dan Proses DJPKRL	52
Tabel 23 Capaian IK Laporan SPIP yang disusun Lingkup Setditjen PKRL Tahun 2024	54
Tabel 24 Tabel Capaian Indikator Kinerja Laporan SPIP yang disusun.....	55

Tabel 25	Capaian IK Persentase Unit Kerja Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pada Tahun 2024	57
Tabel 26	Nilai Manajemen Pengetahuan Setditjen PKRL Tahun 2024.....	58
Tabel 27	Tabel Perbandingan Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar.	58
Tabel 28	Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindaklanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan Pada Tahun 2024.....	60
Tabel 29	Tabel Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan	61
Tabel 30	Capaian IK Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Setditjen PKRL Tahun 2024	63
Tabel 31	Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK.....	64
Tabel 32	Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup DJPKRL Tahun 2024.....	67
Tabel 33	Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPKRL Tahun 2024.....	70
Tabel 34	Capaian IK Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL pada Tahun 2024.....	74
Tabel 35	Capaian IK Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada Tahun 2024	80
Tabel 36	Capaian IK Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	88
Tabel 37	Capaian IK Informasi DJPKRL yang Dikelola dan Dipublikasikan pada Tahun 2024	91
Tabel 38	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Informasi PKRL yang Dikelola dan Dipublikasikan Tahun 2024.....	92
Tabel 39	Perbandingan Capaian Jumlah Informasi PKRL yang Dikelola dan Dipublikasikan	92
Tabel 40	Capaian IK Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti pada Tahun 2024	95
Tabel 41	Capaian IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024.....	97
Tabel 42	Capaian IK Presentase Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA Tahun 2024.....	100
Tabel 43	Capaian IK Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi di Lingkungan DJPKRL pada Tahun 2024	102

Tabel 44	Capaian IK Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi di lingkungan DJPKRL Tahun 2024	104
Tabel 45	Capaian IK Persentase Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan Tahun 2024.....	107
Tabel 46	Capaian IK Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati Tahun 2024	109
Tabel 47	Perjanjian Kerja Sama Tahun 2024.....	112
Tabel 48	Capaian IK Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun Tahun 2024	120
Tabel 49	Kertas Posisi yang telah Disusun pada Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri.....	122
Tabel 50	Capaian IK Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang telah Disepakati Tahun 2024.....	127
Tabel 51	Capaian IK Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Tahun 2024.....	130
Tabel 52	Hasil IKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik lingkup DJPKRL pada Tahun 2024	137
Tabel 53	Capaian IK Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN Tahun 2024	142
Tabel 54	Capaian IK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024..	145
Tabel 55	Perbandingan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPKRL Tahun 2023 dan 2024.....	145
Tabel 56	Tabel Capaian Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal..	146
Tabel 57	Capaian IK Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Tahun 2024.....	149
Tabel 58	Indikator Reformasi Birokrasi General	149
Tabel 59	Indikator Reformasi Birokrasi Tematik	150
Tabel 60	Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan dari Laporan Kinerja Setditjen PKRL Tahun 2024	158
Tabel 61	Daftar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang telah Terbit Tahun 2024.....	171
Tabel 62	Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti	174
Tabel 63	Rekapitulasi Input dan Validasi Data Produksi Garam Tahun 2024	179
Tabel 64	Daftar Pemantauan dan Evaluasi Dokumen PKS lingkup DJPKRL Tahun 2024	182
Tabel 65	Nilai WBK Unit Kerja di Lingkup DJPKRL.....	192
Tabel 66	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik DJPKRL Tahun 2024	194

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa pengelolaan kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun komponen pengelolaan kinerja meliputi:

- 1) Penjenjangan Kinerja;
- 2) Perencanaan Kinerja;
- 3) Pengukuran Kinerja;
- 4) Pelaporan Kinerja; dan
- 5) Evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sampai dengan level di bawahnya, termasuk Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Setditjen PKRL) turut dalam pengelolaan kinerja lingkup DJPKRL. Pelaporan Kinerja merupakan salah satu komponen pengelolaan kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaporan kinerja terdiri atas laporan kinerja interim (setiap triwulan) dan laporan kinerja tahunan. Laporan Kinerja Setditjen PKRL Tahun 2024 ini menjelaskan secara komprehensif tentang capaian kinerja organisasi Setditjen PKRL sampai dengan tahun 2024. Laporan Kinerja ini memuat capaian, perbandingan, analisis keberhasilan, kendala, solusi, efisiensi, kegiatan pendukung serta rencana tindak lanjut masing - masing indikator kinerja Setditjen PKRL tahun 2024.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 adalah untuk menyampaikan pencapaian, perkembangan dan permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024.

1.3 ISU STRATEGIS

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, RKP Tahun 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan dan dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selaras dengan RKP, pembangunan sektor kelautan dan perikanan berlandaskan 5 arah kebijakan berbasis Ekonomi Biru yaitu:

1. Memperluas kawasan konservasi laut;
2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota;
3. Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan;
4. Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Dari 5 kebijakan implementasi ekonomi biru KKP, 3 program menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJKPRL). Hal ini menggambarkan peran DJPKRL sangat strategis dalam mengawal ekologi untuk ekonomi biru yang berkelanjutan. Pengelolaan kelautan dan ruang laut telah menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Tekanan pembangunan dan dampak perubahan iklim telah menjadikan laut kita semakin terdegradasi. Tanpa pengelolaan yang baik maka laut tidak akan mampu lagi menjadi sumber kehidupan.

Setditjen PKRL berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan DJPKRL guna mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB). Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 bahwa Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional.

1.4 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan

Perikanan, Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

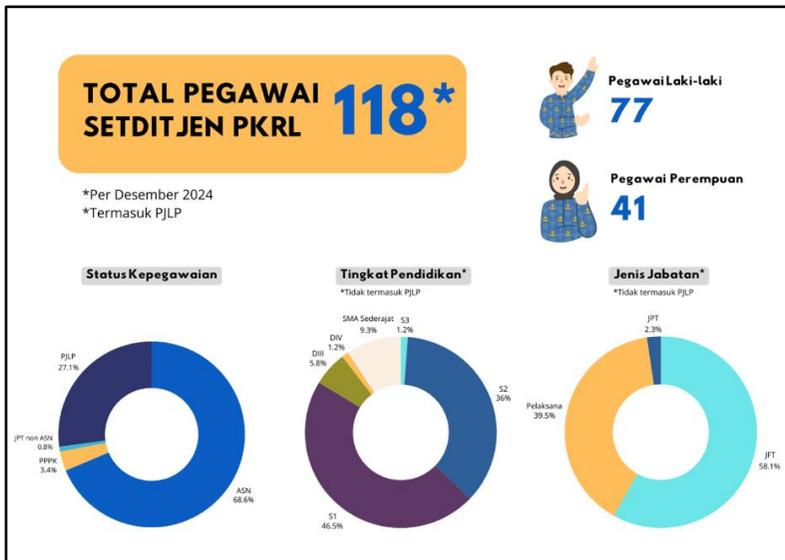
1. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
2. Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
3. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
4. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
5. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
6. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
7. Koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
8. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
9. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; dan
10. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Susunan organisasi Setditjen PKRL terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana. Kelompok Pelaksana terdiri atas beberapa tim kerja meliputi Tim Kerja Program, Tim Kerja Keuangan dan BMN, Tim Kerja Humas dan Pelayanan, Tim Kerja Kerjasama dan Data, Tim Kerja Hukum, Tim Kerja Sumber Daya Manusia dan Organisasi, serta Tim Kerja Dukungan Manajemen.

Sampai bulan Desember 2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut didukung oleh 118 orang pegawai yang terdiri atas 77 (65%) pegawai laki - laki dan 41 (35%) pegawai perempuan. Berdasarkan status kepegawaian, Setditjen PKRL dominan diisi oleh ASN yaitu sebanyak 68%, status pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebanyak 27%, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 3,4% serta Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Non ASN sebanyak 0,8%. Berdasarkan tingkat pendidikan, jenjang pendidikan pegawai terbanyak di Setditjen PKRL adalah strata 1 yaitu sebanyak 46,5%, jenjang pendidikan strata 2 sebanyak 36%, SMA sederajat sebanyak 9,3%, DIII sebanyak 5,8%, serta jenjang DIV dan S3 masing – masing sebanyak 1,2%. Keragaan tingkat pendidikan ini tanpa memperhitungkan pegawai PJLP. Berdasarkan jenis jabatan, sebanyak 58,1% pegawai di Setditjen PKRL telah memiliki Jabatan Fungsional tertentu (JFT), sebanyak 39,5% merupakan pelaksana, dan sebanyak 2,3% merupakan JPT. Adapun keragaan pegawai secara infografis sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 2. Keragaan Pegawai Setditjen PKRL Tahun 2024

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan kelautan dan ruang aut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada tahun 2020-2024, rencana kerja dan anggaran Tahun 2024, dan penetapan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang dan jasa. Program Kementerian/Lembaga secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis program yaitu program teknis dan program generik. Program Generik merupakan program yang digunakan oleh Unit Organisasi Eselon I yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal) dan Setditjen PKRL mendukung program generik melalui sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam Renstra DJPKRL Tahun 2020-2024 yang telah direvisi melalui melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024 dijabarkan sasaran dan indikator pada program Dukungan Manajemen Tahun 2020-2024 disajikan sebagaimana Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1 Sasaran dan Indikator Kinerja Setditjen PKRL Tahun 2020-2024 (semula)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	1.	Nilai Penilaian Mandiri Pengungkit Reformasi Birokrasi (PMPRB) DJPKRL, dari 30 (tiga puluh) pada tahun 2020 menjadi 34 (tiga puluh empat) pada tahun 2024.
		2.	Unit Kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dari 6 (enam) unit pada

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
			tahun 2020 menjadi 10 (sepuluh) unit pada tahun 2024
		3.	Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mulai tahun 2020 hingga tahun 2024 dengan target $\leq 1\%$
		4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PKRL (Indeks) pada tahun 2020 73 menjadi 76 pada tahun 2024
		5.	Nilai PMSAKIP Lingkup Ditjen PKRL (Nilai) pada tahun 2020 adalah 83 menjadi 83,75 pada tahun 2024
		6.	Nilai Maturitas SPIP Ditjen PKRL (Nilai) target tahun 2020 hingga 2024 adalah 3
		7.	Persentase unit kerja Lingkup Ditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%) pada tahun 2020 adalah 82 % dan pada tahun 2024 menjadi 90%
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Ditjen PKRL (%) pada tahun 2020 60% dan tahun 2024 menjadi 80%
		9.	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup Ditjen PKRL (unit kerja) dengan target tahun 2020 – 2024 adalah 1 unit kerja

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
		10.	Nilai IKPA (Nilai) target tahun 2020 adalah 88 dan target tahun 2024 adalah 90
		11.	Nilai NKA (Nilai) target tahun 2020 adalah 85 dan target tahun 2024 adalah 89

Tabel 2 Sasaran dan Indikator Kinerja Setditjen PKRL Tahun 2024 (menjadi)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL	1.	Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada tahun 2024 semula 10 unit kerja menjadi 8 unit kerja
		2.	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPKRL pada tahun 2024 semula $\leq 1\%$ menjadi $\leq 0,5\%$
		3.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada tahun 2024 semula 76 menjadi 88
		4.	Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut semula 83,75 menjadi 84
		5.	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada tahun 2024 semula 3 menjadi 3,3

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
		6.	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada tahun 2024 semula 90% menjadi 94%
		7.	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut target pada tahun 2024 tidak berubah yaitu 80%
		8.	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut target pada tahun 2024 tidak berubah yaitu 1 unit kerja
		9.	Nilai IKPA Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut target pada tahun 2024 semula 90 menjadi 93,76
		10.	Nilai NKA Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada tahun 2024 perubahan target semula 89 menjadi 86
		11.	Tingkat kepatuhan pengadaan Barang/Jasa DJPKRL pada tahun 2024 dengan target 80%
		12.	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN DJPKRL pada tahun 2024 dengan target 80%
		13.	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup DJPKRL target tahun 2024 sebesar 80%

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Rencana Kinerja (Renja) adalah penjabaran arah dan kebijakan dalam bentuk sasaran, tujuan, indikator kinerja, strategi, serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai target dalam suatu periode tertentu. Renja DJPKRL tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 205 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024. Dokumen Renja 2024 sebagai dasar penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Dokumen PK memuat Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kegiatan atau program dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. IKK merupakan parameter atau kriteria yang jelas dan terukur yang menggambarkan pencapaian dari kegiatan yang dilaksanakan. Dengan adanya IKK, pelaksanaan kegiatan dapat dievaluasi secara objektif untuk mengetahui tingkat keberhasilannya. Sasaran dan indikator kinerja kegiatan dijabarkan dalam Tabel 3.

Tabel 3 Indikator dan Target Kinerja Setditjen PRKL Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL	1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Setditjen PKRL (Nilai)	93,76
	2.	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Setditjen PRL (%)	95
	3.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Setditjen PKRL (Nilai)	71
	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setditjen PKRL (Indeks)	88
	5.	Nilai PM SAKIP DJPKRL (Nilai)	84
	6.	Nilai PM SAKIP Lingkup Setditjen PKRL (Nilai)	81
	7.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai)	3,3

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
	8.	Laporan SPIP yang disusun Lingkup Setditjen PKRL (Dokumen)	4
	9.	Persentase unit kerja Lingkup Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
	10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80
	11.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Setditjen PKRL (%)	100
	12.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup DJPKRL (%)	80
	13.	Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup DJPKRL (%)	80
	14.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL (%)	100
	15.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (%)	100
	16.	Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (%)	100
	17.	Informasi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Dikelola dan Dipublikasikan (Informasi)	2160
	18.	Persentase Permohonan Informasi Publik yang ditindaklanjuti (%)	100
	19.	Nilai keterbukaan informasi publik (nilai)	90

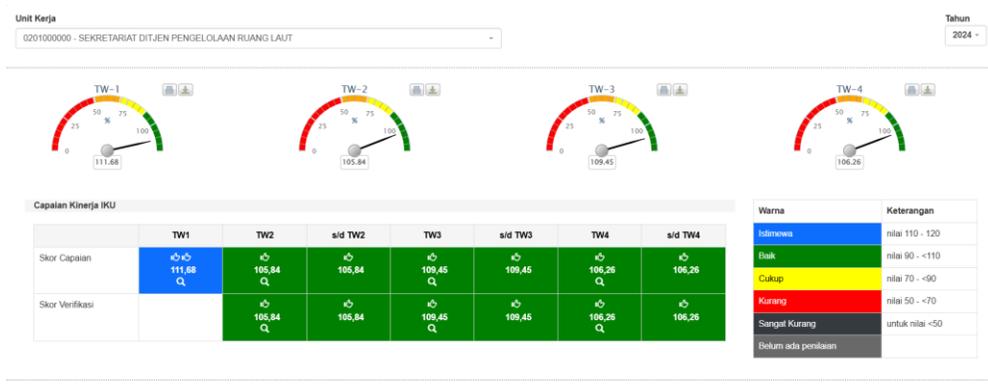
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
	20.	Persentase Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA Lingkup DJPKRL (%)	100
	21.	Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi Lingkup DJPKRL (%)	100
	22.	Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi Lingkup DJPKRL (%)	100
	23.	Persentase Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan (%)	100
	24.	Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati (%)	90
	25.	Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang disusun (%)	100
	26.	Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang Telah Disepakati (%)	75
	27.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan (%)	100
	28.	Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN (%)	100
	29.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Setditjen PKRL (nilai)	80
	30.	Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan sesuai ketentuan (%)	100

Revisi target dan nomenklatur pada indikator sasaran program dan indikator sasaran kegiatan berdasarkan Permen-KP Nomor 15 tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 menjadi dasar perubahan IKK Setditjen PKRL tahun 2024. Adapun indikator yang dilakukan penyesuaian pada tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Indikator Nilai Penilaian Mandiri Pengungkit Reformasi Birokrasi (PMPRB) DJPKRL diubah menjadi Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan sesuai ketentuan.
2. Indikator Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP unit DJPKRL merupakan adopsi langsung dari indikator pada Level I atau DJPKRL.
3. Indikator Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti merupakan indikator baru pada tahun 2024.
4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik merupakan indikator baru pada tahun 2024.
5. Indikator Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati merupakan penyesuaian dari indikator pada tahun sebelumnya, yakni Indikator Dokumen Kerja Sama Program PKRL yang Disepakati.
6. Indikator Persentase Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun merupakan penyesuaian dari indikator pada tahun sebelumnya, yakni Indikator Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri Program PKRL yang Disusun.
7. Nilai NKA Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut diubah menjadi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PKRL terdapat 30 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang termasuk dalam sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Setditjen PKRL. Pengukuran capaian kinerja Setditjen PKRL Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi pada masing-masing indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen PKRL Tahun 2024 sebesar 106,26 (termasuk kriteria Baik).



Sumber: www.kinerjaku.kkp.go.id

Gambar 3 Nilai Capaian Kinerja Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Laut Tahun 2024

Secara rinci, capaian masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja Setditjen PKRL Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Setditjen PKRL Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Frekuensi	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Semesteran	93,76	85,67	91,37

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Frekuensi	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
Setditjen PKRL		Lingkup Setditjen PKRL (Nilai)				
	2.	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Setditjen PKRL (%)	Triwulanan	95	94,87	99,86
	3.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Setditjen PKRL (Nilai)	Tahunan	71	96,84	120
	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setditjen PKRL (Indeks)	Semesteran	88	88,85	100,97
	5.	Nilai PMSAKIP DJPKRL (Nilai)	Tahunan	84	89,07	106,04
	6.	Nilai PM SAKIP Lingkup Setditjen PKRL (Nilai)	Tahunan	81	89,50	110,49
	7.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP unit DJPKRL (Nilai)	Tahunan	3,3	3,732	113,03
	8.	Laporan SPIP yang disusun Lingkup Setditjen PKRL (Dokumen)	Triwulanan	4	4	100
	9.	Persentase unit kerja Lingkup Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	Triwulanan	94	133,33	120
	10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah	Triwulanan	80	96,97	120

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Frekuensi	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
		Dilengkapi dan Disampaikan (%)				
	11.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Setditjen PKRL (%)	Tahunan	100	100	100
	12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup DJPKRL (%)	Tahunan	80	87,76	109,70
	13.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPKRL (%)	Tahunan	80	100	120
	14.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL (%)	Tahunan	100	100	100
	15.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (%)	Semester	100	100	100
	16.	Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Ruang Laut (%)	Tahunan	100	100	100
	17.	Informasi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Dikelola dan Dipublikasikan (Informasi)	Triwulanan	2.160	2.830	120
	18.	Persentase Permohonan Informasi Publik	Triwulanan	100	100	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Frekuensi	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
		yang Ditindaklanjuti (%)				
	19.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	Tahunan	90	100	111,11
	20.	Presentase Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA Lingkup DJPKRL (%)	Triwulanan	100	100	100
	21.	Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi Lingkup DJPKRL (%)	Semesteran	100	100	100
	22.	Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi lingkup DJPKRL (%)	Tahunan	100	100	100
	23.	Persentase Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan (%)	Tahunan	100	100	100
	24.	Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati (%)	Tahunan	90	100	111,11
	25.	Persentase Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun (Dokumen)	Tahunan	100	100	100
	26.	Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang Telah Disepakati (%)	Tahunan	75	82,5	110
	27.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan (%)	Tahunan	100	100	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Frekuensi	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
	28.	Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN (%)	Semesteran	100	100	100
	29.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Setditjen PKRL (nilai)	Tahunan	80	97,55	120
	30.	Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan (%)	Tahunan	100	100	100

3.1 SK 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL

Dalam upaya mencapai Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL, capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja: 1) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Setditjen PKRL; 2) Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Setditjen PKRL; 3) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Setditjen PKRL; 4) Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setditjen PKRL; 5) Nilai PMSAKIP DJPKRL; 6) Nilai PM SAKIP Lingkup Setditjen PKRL; 7) Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP unit DJPKRL; 8) Laporan SPIP yang disusun Lingkup Setditjen PKRL; 9) Persentase unit kerja Lingkup Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar; 10) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan; 11) Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Setditjen PKRL; 12) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup DJPKRL; 13) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPKRL; 14) Persentase Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL; 15) Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; 16) Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Laut; 17) Informasi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Dikelola dan

Dipublikasikan; 18) Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti; 19) Nilai Keterbukaan Informasi Publik; 20) Presentase Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA Lingkup DJPKRL; 21) Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi Lingkup DJPKRL; 22) Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi lingkup DJPKRL; 23) Persentase Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan; 24) Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati; 25) Persentase Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun; 16) Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang Telah Disepakati; 27) Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan; 28) Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN; 29) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Setditjen PKRL; 30) Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan.

IK 1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PKRL

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan alat ukur yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengevaluasi kualitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA menilai pelaksanaan anggaran berdasarkan aspek kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penilaian ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Sejalan dengan PMK tersebut, telah

dilakukan reformulasi indikator IKPA, yang sebelumnya terdiri dari 13 indikator, kini menjadi 7 indikator utama sebagai berikut:

1. revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (bobot 10%);
2. deviasi halaman III DIPA (bobot 15%);
3. penyerapan anggaran (bobot (20%);
4. belanja kontraktual (bobot 10%);
5. penyelesaian tagihan (bobot 10%);
6. pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan (bobot 10%); dan
7. capaian output (bobot 25%), dikurangi dengan indikator Dispensasi SPM.

FORMULA IKPA (PER-5/PB/2022)

Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Belanja Kontraktual	Penyerapan Anggaran																																				
<p>Perluasan lingkup revisi pagu tetap (pergeran) yang terkait dengan kualitas perencanaan.</p> <table border="1"> <tr> <th>Tahun 2021</th> <th>Tahun 2022</th> </tr> <tr> <td>4 Jenis Revisi</td> <td>14 Jenis Revisi</td> </tr> </table>	Tahun 2021	Tahun 2022	4 Jenis Revisi	14 Jenis Revisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan deviasi pada masing-masing jenis belanja untuk mendorong perencanaan yang lebih akurat 2. Pengaturan ambang batas rata-rata deviasi bulanan sebesar 5,0% untuk memperoleh nilai maksimal <table border="1"> <tr> <th>Rentang Deviasi</th> <th>Nilai Indikator</th> </tr> <tr> <td>0%-5%</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>≥5%</td> <td>0-95</td> </tr> </table>	Rentang Deviasi	Nilai Indikator	0%-5%	100	≥5%	0-95	<p>Memperhitungkan komponen kepatuhan dan akselerasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan: ketepatan waktu penyampaian kontrak. 2. Akselerasi: (1) Kontrak pra DIPA, (2) Akselerasi Kontrak Belanja Modal <table border="1"> <tr> <th>Komponen</th> <th>Indeks Komposit</th> </tr> <tr> <td>Kepatuhan</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>Akselerasi</td> <td>40%</td> </tr> </table>	Komponen	Indeks Komposit	Kepatuhan	60%	Akselerasi	40%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Target penyerapan anggaran ditetapkan pada masing-masing jenis belanja 2. Tingkat penyerapan anggaran per K/L/Es /Satker ditetapkan berdasarkan total pagu per jenis belanja terhadap targetnya <table border="1"> <tr> <td>B. Pegawai</td> <td>20%</td> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>B. Barang</td> <td>15%</td> <td>50%</td> <td>70%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>B. Modal</td> <td>10%</td> <td>40%</td> <td>70%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>B. Bansos</td> <td>25%</td> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>95%</td> </tr> </table>	B. Pegawai	20%	50%	75%	95%	B. Barang	15%	50%	70%	90%	B. Modal	10%	40%	70%	90%	B. Bansos	25%	50%	75%	95%
Tahun 2021	Tahun 2022																																						
4 Jenis Revisi	14 Jenis Revisi																																						
Rentang Deviasi	Nilai Indikator																																						
0%-5%	100																																						
≥5%	0-95																																						
Komponen	Indeks Komposit																																						
Kepatuhan	60%																																						
Akselerasi	40%																																						
B. Pegawai	20%	50%	75%	95%																																			
B. Barang	15%	50%	70%	90%																																			
B. Modal	10%	40%	70%	90%																																			
B. Bansos	25%	50%	75%	95%																																			
<p>Pengelolaan UP dan TUP</p> <p>Memperhitungkan komponen ketepatan waktu dan akurasi UP dan GUP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan Waktu: ketepatan waktu GUP/TUP 2. Akurasi: <ol style="list-style-type: none"> a. % GUP Disebulankan b. % Setoran TUP <table border="1"> <tr> <th>Komponen</th> <th>Indeks Komposit</th> </tr> <tr> <td>Ketepatan Waktu</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>% GUP Disebulankan</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>% Setoran TUP</td> <td>25%</td> </tr> </table>	Komponen	Indeks Komposit	Ketepatan Waktu	50%	% GUP Disebulankan	25%	% Setoran TUP	25%	<p>Penyelesaian Tagihan</p> <p>Dihitung berdasarkan rasio antara SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu disampaikan ke KPPN terhadap seluruh SPM Kontraktual Non Belanja Pegawai yang terbit</p> <table border="1"> <tr> <td>Ketepatan Waktu penyampaian</td> <td>17 hari kerja sejak BAST/BAP</td> </tr> </table>	Ketepatan Waktu penyampaian	17 hari kerja sejak BAST/BAP	<p>Dispensasi SPM</p> <p>Dihitung berdasarkan rasio SPM yang diterbitkan dengan dispensasi akhir tahun</p> <table border="1"> <tr> <th>Kategori Nilai</th> <th>Dispensasi SPM yang terbit (Permill)¹</th> </tr> <tr> <td>80</td> <td>≥5</td> </tr> <tr> <td>85</td> <td>1 - 4,99</td> </tr> <tr> <td>90</td> <td>0,1 - 0,99</td> </tr> <tr> <td>95</td> <td>0,01 - 0,099</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>0</td> </tr> </table>	Kategori Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permill) ¹	80	≥5	85	1 - 4,99	90	0,1 - 0,99	95	0,01 - 0,099	100	0	<p>Capaian Output</p> <p>Dihitung berdasarkan komponen ketepatan waktu dan capaian RO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan Waktu: ketepatan waktu pelaporan data capaian output (5 hari kerja bulan berikutnya) 2. Capaian RO: Capaian Progres RO dan/atau Realisasi Volume RO terhadap target triwulanan <table border="1"> <tr> <th>Komponen</th> <th>Indeks Komposit</th> </tr> <tr> <td>Ketepatan Waktu</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Capaian RO</td> <td>70%</td> </tr> </table>	Komponen	Indeks Komposit	Ketepatan Waktu	30%	Capaian RO	70%								
Komponen	Indeks Komposit																																						
Ketepatan Waktu	50%																																						
% GUP Disebulankan	25%																																						
% Setoran TUP	25%																																						
Ketepatan Waktu penyampaian	17 hari kerja sejak BAST/BAP																																						
Kategori Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permill) ¹																																						
80	≥5																																						
85	1 - 4,99																																						
90	0,1 - 0,99																																						
95	0,01 - 0,099																																						
100	0																																						
Komponen	Indeks Komposit																																						
Ketepatan Waktu	30%																																						
Capaian RO	70%																																						

Gambar 4 Formulasi Capaian IKPA

Teknik Menghitung yang digunakan adalah dengan mengadopsi data Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJPKRL pada Aplikasi Monev PA OMS PAN Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Pembobotan Nilai IKPA ini terdiri dari 3 aspek antara lain sebagai berikut :

1. revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (bobot 10%);
2. deviasi halaman III DIPA (bobot 15%);
3. penyerapan anggaran (bobot (20%);
4. belanja kontraktual (bobot 10%);
5. penyelesaian tagihan (bobot 10%);
6. pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan (bobot 10%); dan
7. capaian output (bobot 25%), dikurangi dengan indikator Dispensasi SPM

Nilai IKPA = $(\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n)) : \text{Konversi Bobot}$ –
 Dispensasi SPM

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
3. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
4. Kurang, apabila nilai IKPA > 70
 - a. Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
 - b. Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Capaian IKU ini Triwulan IV Tahun 2024 disajikan sebagai berikut

Tabel 5 Capaian IK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PKRL pada Tahun 2024

SK – 1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL					
IK – 1				Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PKRL					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
95,52	88,38	88,76	89,79	93,76	85,67	91,37	-4,12	90	95,18

A. Capaian IK Tahun 2024

Berdasarkan data pada Aplikasi OMSPAN Tahun 2024 nilai IKPA Satker Setditjen PKRL secara keseluruhan adalah 85,67. Adapun rincian aspek penilaian terdiri dari aspek kualitas perencanaan anggaran 63,11, kualitas pelaksanaan anggaran 93,55, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran 98,89 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6 Nilai IKPA lingkup Setditjen PKRL Tahun 2024

No	Aspek Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
1.	Kualitas Perencanaan Anggaran				63,11
	Revisi DIPA	50	10	5	
	Deviasi Halaman III DIPA	76,21	15	11,43	
2.	Kualitas Pelaksanaan Anggaran				93,55
	Penyerapan Anggaran	80,95	20	16,19	
	Belanja Kontraktual	94	10	9,4	

No	Aspek Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
	Penyelesaian Tagihan	99,24	10	9,92	
	Pengelolaan UP TUP	100	10	10	
3.	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				98,89
	Capaian Output	98,89	25	24,72	
Nilai Total					86,67
Konversi Bobot					100
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)					85,67

Nilai ini belum mencapai target (93,76) karena rendahnya aspek Kualitas Perencanaan Anggaran khususnya Revisi DIPA. Sesuai dengan perhitungan nilai IKPA revisi DIPA apabila dalam 1 semester terdapat lebih dari/atau sama dengan 3 pada 14 jenis revisi pagu tetap akan mendapatkan nilai 50, Satker Setditjen PKRL pada tahun 2024 di semester pertama terdapat 4 revisi DIPA dan di semester kedua terdapat 4 revisi DIPA sehingga nilai IKPA revisi DIPA pada tahun 2024 sebesar 50.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya
 Nilai IKPA Satker Setditjen PKRL Tahun 2024 (85,67) lebih rendah dibandingkan dengan nilai IKPA Satker Setditjen PKRL Tahun 2020-2023, seperti yang terlihat pada tabel berikut. Hal ini dikarenakan nilai aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 terjadi revisi anggaran sebanyak 8x sehingga nilai IKPA revisi DIPA pada tahun 2024 sebesar 50. Selain itu, Aspek penilaian IKPA pada tahun 2020 berbeda dengan tahun 2023-2024 karena terdapat perbedaan indikator pada tahun 2020 yakni kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Tabel 7 Perbandingan IKPA Setditjen PKRL Tahun 2020-2024

No	Aspek Penilaian	2022	2023	2024
1	Kualitas Perencanaan Anggaran	79,98	80,35	63,11
2	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	89,88	92	93,55
3	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	97,35	100	98,89
	Nilai Akhir	88,76	89,79	85,67

Tabel 8 Perbandingan IKPA Setditjen PKRL Tahun 2020-2024

No	Aspek Penilaian	2020	2021
1	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan	100	86,9
2	Kepatuhan terhadap Regulasi	93,67	86,25
3	Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan	94,58	93,43
4	Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan	97,5	95
	Nilai Akhir	95,52	88,94

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL Tahun 2020-2024

Jika dibandingkan dengan target pada Renstra DJPKRL 2020-2024 sebesar 90 maka, capaian pada tahun 2024 sebesar 85,67 (95,18%) dimana hasil tersebut belum melampaui target Renstra DJPKRL Tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh, beberapa kegiatan pada Program Lutra tidak dapat dilaksanakan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Kendalanya adalah

1. Adanya revisi anggaran pada Tahun Anggaran 2024.
2. Adanya ketidaksesuaian perencanaan dan realisasi anggaran sehingga menyebabkan rendahnya aspek penilaian pada Deviasi Halaman III DIPA
3. Beberapa kegiatan pada Program Lutra tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu, hal ini dikarenakan adanya tambahan Anggaran dari PHLN Lutra pada akhir periode Triwulan III TA. 2024.

b. Solusi yang telah dilakukan adalah

1. Optimalisasi pelaksanaan anggaran
2. Pemantauan dan evaluasi secara berkala
3. Penyelarasan antara kebijakan dengan regulasi.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian Indikator Kinerja ini adalah dengan melibatkan seluruh unit kerja lingkup Setditjen PKRL. Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN Setditjen PKRL dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai.

F. Kegiatan Pendukung

1. Pemantauan dan evaluasi berkala;
2. Menyusun ulang rencana pelaksanaan kegiatan;

3. Melakukan Revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
4. Percepatan revisi POK satker Setditjen PKRL;
5. Percepatan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada Satker Setditjen PKRL;
6. Pelatihan dan sertifikasi pada seluruh tim kerja lingkup Setditjen PKRL;
7. Finalisasi Dokumen Penganggaran Pagu ALokasi Anggaran TA. 2025 Satker Lingkup DJPKRL;
8. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan III dan Pemantauan Kegiatan DJPKRL (KSP, KKI, BP dan Kemiskinan Ekstrem) pada B09 Tahun 2024;
9. Rapat Verifikasi Pelaporan Online melalui Aplikasi e-Monev Bappenas dan Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Lingkup DJPKRL;
10. Penyusunan Laporan Kinerja DJPKRL dan Setditjen PKRL TW III Tahun 2024;
11. Rapat Revisi Perjanjian Kinerja DJPKRL Tahun 2024;
12. Pembahasan Progress Pelaksanaan Ocean for Prosperity Project - Lautra Tahun 2024;
13. Pembahasan Progres Pelaksanaan Oceans for Prosperity Project - LAUTRA TA 2024;
14. Pengisian Data Penyaluran Bantuan Pemerintah dan Verifikasi Kepesertaan Aktif BPJS Kesehatan;
15. Pembahasan Kebijakan Efisiensi Anggaran TA 2024 dan Inisiatif Program/kegiatan TA 2025;
16. Pembahasan Renstra DJPKRL 2025 - 2029 dalam muatan Renstra KKP 2025 – 2029;
17. Pembahasan Sasaran, Indikator, Target Kinerja DJPKRL 2025 – 2029;
18. LAUTRA Project Implementation Support Mission.

G. Rencana Aksi Tahun 2025

1. Penyusunan dokumen perencanaan satker lingkup Ditjen PKRL tahun 2025;
2. Evaluasi kegiatan Prioritas lingkup Ditjen PKRL tahun 2024;
3. Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN;
4. Pemantauan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko (MR) tahun 2025 lingkup Ditjen PKRL; dan
5. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

IK 2. Persentase Realisasi Anggaran lingkup Setditjen PKRL

Realisasi Anggaran merupakan kegiatan pelaksanaan anggaran yang meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan anggaran. Hal tersebut menjadi salah satu indikator pengukuran penilaian kinerja dari kementerian/lembaga. Apabila tingkat realisasi mencapai di atas target, maka penilaian kinerja pada K/L tersebut dinilai sangat baik.

Persentase Realisasi Anggaran adalah Persentase Capaian Realisasi Anggaran pada suatu Unit Kerja dibandingkan jumlah Pagu Anggaran yang diberikan.

Teknik Menghitung:

$$X = \frac{R_A}{P_A} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Persentase Penyerapan Anggaran

RA = Jumlah Persentasi Pencapaian Realisasi Anggaran

PA = Jumlah Pagu Anggaran yang ditetapkan pada Unit Kerja

Indikator Kinerja ini merupakan indikator baru pada tahun 2022. Adapun capaian IK ini disajikan pada tabel sebagai berikut ini:

Tabel 9 Capaian IK Persentase Realisasi Anggaran lingkup Setditjen PKRL pada Tahun 2024

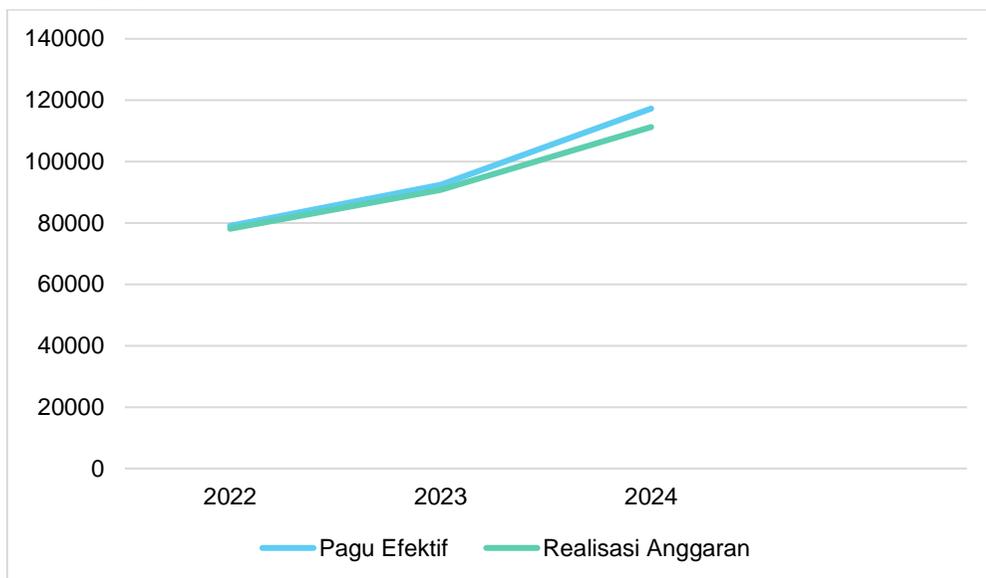
SK – 1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL					
IK – 2				Persentase Realisasi Anggaran lingkup Setditjen PKRL					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	98,8	98,17	95	94,87	99,86	-3,3	-	-

A. Capaian IK Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran lingkup Setditjen PKRL pada Tahun 2024 adalah 94,87% dari target 95% berdasarkan realisasi anggaran Setditjen PKRL sebesar Rp111.271.420.305 dari Pagu Efektif Rp117.284.782.000. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai Rp58.704.233.661, Belanja Barang Rp47.392.321.384 dan Belanja Modal Rp5.174.865.260.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya Capaian pada Tahun 2024 (94,87) lebih rendah dari capaian pada Tahun 2023 (98,17) dan Tahun 2022 (98,8). Hal ini dikarenakan pada Triwulan

III Tahun 2024, Setditjen PKRL mendapat tambahan Anggaran dari PHLN Lautra dan hanya terserap 50,08% pada akhir periode Triwulan IV Tahun 2024.



Gambar 5 Anggaran Setditjen PKRL Tahun 2022-2024 (Rp Juta)

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024

Target dan Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran lingkup Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tidak terdapat pada Rencana Strategis (Renstra) DJPRL Tahun 2020-2024. Namun demikian, Indikator Kinerja ini berkontribusi pada capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran DJPKRL Tahun 2024.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki capaian yang dapat dibandingkan dengan Standar Nasional namun Capaian Kinerja IK ini dapat dibandingkan dengan Unit Kerja Level 2 lainnya dalam lingkup DJPKRL seperti Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, Direktorat Penataan Ruang Laut, Direktorat Konservasi dan Biota Perairan, serta Direktorat Jasa Kelautan. Perbandingan Capaian Kinerja indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 10. Tabel Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran

Nama	Pagu	Blokir	Pagu Efektif	Realisasi	%
Dit. KEBP	29.688.906.000	1.385.557.000	28.303.349.000	27.862.381.011	98,44
Dit Jaskel	74.687.980.000	1.609.280.000	73.078.700.000	71.634.591.325	98,02
Dit. P4K	63.090.694.000	2.249.780.000	60.840.914.000	60.211.597.856	98,97
Dit. PRL	226.026.225.000	188.701.277.000	37.324.948.000	35.629.953.266	95,46
Setditjen PKRL	121.825.181.000	4.540.399.000	117.284.782.000	111.271.420.305	94,87

Berdasarkan perbandingan capaian indikator kinerja persentase realisasi anggaran dapat disimpulkan bahwa capaian Setditjen PKRL paling rendah jika dibandingkan dengan Unit Kerja Level 2 lainnya hal ini disebabkan karena, minimnya penyerapan anggaran akibat adanya KRO yang akan direvisi, perjalanan pimpinan cenderung fluktuatif dan tidak terprediksi, serta terkendalanya penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
- a. Analisis Keberhasilan: Capaian indikator ini didukung dengan adanya percepatan penyerapan anggaran dengan melaksanakan pembayaran belanja dengan metode langsung (LS) dan penggunaan kartu kredit pemerintah Selain itu juga dengan percepatan revolving uang persediaan (UP).
 - b. Kendala indikator kinerja persentase realisasi anggaran lingkup Setditjen PKRL yaitu:
 1. KRO yang akan direvisi
 2. Perjalanan pimpinan cenderung fluktuatif dan tidak terprediksi
 3. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah masih terkendala pada Pengajuan Pembayaran Revolving UP.
 - c. Solusi yang telah dilakukan yaitu :
 1. Melakukan revisi DIPA.
 2. Mengoptimalkan pembayaran belanja dengan menggunakan metode pembayaran Langsung (LS).
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Efisiensi penggunaan sumber daya pada IK ini adalah dengan melibatkan seluruh pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan pada pelaksanaan anggaran. Komitmen dari masing-masing bagian menjadi faktor penting untuk mencapai target nilai realisasi anggaran Tahun 2024.

G. Kegiatan Pendukung

1. Evaluasi penyerapan anggaran dan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran
2. Rekonsiliasi Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Pengeluaran terkait Cash Opname lingkup Setditjen PKRL
3. Pemantauan realisasi anggaran di lingkup DJPKRL yang juga diinformasikan pada setiap Apel Pagi di Lingkup DJKPKRL
4. Koordinasi program dan kegiatan lingkup DJPKRL
5. Penyusunan revisi Renstra DJPRL Tahun 2020-2024
6. Rekonsiliasi SAKTI tahun 2024
7. Pemantauan dan Evaluasi Program DJPKRL
8. Pelaksanaan kegiatan LAUTRA
9. Rapat pelaksanaan SPIP
10. Finalisasi PIPK
11. Penatausahaan BMN
12. Advokasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan
13. *Soft Launching* Morodemak Hari Nusantara.

H. Rencana Aksi Tahun 2025

1. Rekonsiliasi Internal BMN bulan Oktober lingkup Satker Pusat DJPKRL;
2. Monitoring dan Evaluasi SAKTI satker lingkup Ditjen PKRL;
3. Pengujian Atribut Tabel C1 dan C2 lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024
4. Penyusunan Manajemen Risiko tahun 2025;
5. Pengelolaan Keuangan dan Sharing dan Diskusi KPPN Jakarta VI bersama Satker Mitra;
6. Pengendalian intern pelaporan keuangan entitas pelaporan Ditjen PKRL tahun 2025;
7. Workshop dan Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Oceans for Prosperity Project – LAUTRA;
8. Penyelesaian TL BPK dan TL Itjen;
9. Penilaian Efektivitas Pengelolaan BMN lingkup Ditjen PKRL;
10. Pengelolaan PNBPNP lingkup DJPKRL;
11. Koordinasi Finalisasi Penyusunan Naskah Perjanjian dan BAST Penggunaan Gedung Regional Sekretariat CTI-CFF Manado;
12. Pembahasan Lanjutan atas Hibah Lahan PT. Seax Indonesia Pratama;
13. Koordinasi Pengelolaan BMN melalui Aplikasi SIMAN BMN lingkup Satker Pusat Sekretariat DJPKRL;
14. Penyusunan Pelaksanaan PNBPNP DJPKRL;

15. Pemantauan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko (MR) tahun 2024 lingkup Ditjen PKRL;
16. Pembahasan Percepatan Realisasi Anggaran Kegiatan Lainnya.

IK 3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Setditjen PKRL

IKU ini telah mengalami perubahan nomenklatur dari yang semula “Nilai Kinerja Anggaran” menjadi “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran” dan perubahan target. Hal ini disebabkan oleh banyak Satker terutama Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang tidak memiliki RO SBKK maupun SBKU, sehingga tidak bisa mendapatkan nilai Efisiensi sebesar 25, dan nilai maksimal yang dapat diperoleh hanya dari nilai Efektivitas sebesar 75. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penyesuaian target NKA tahun 2024 yang semula 82 menjadi 71.

Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran dilakukan berkala dan menyeluruh sesuai dengan periode aktivitasnya dan sepanjang proses dalam siklus pelaksanaan anggaran setelah pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. Penilaian kinerja perencanaan anggaran menggunakan 2 variabel yaitu Efektivitas (Capaian RO dikaitkan dengan Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS), capaian IKP, dan capaian ISS), Efisiensi (Penggunaan SBK, dan efisiensi SBK). Adapun bobot penilaian kinerja perencanaan anggaran untuk efektivitas 75 sedangkan efisiensi 25 dengan kategori penilaian sebagai berikut:

0 – 50	Sangat kurang
>50 – 60	Kurang
>60 – 80	Cukup
>80 – 90	Baik
>90 – 100	Sangat baik

Dalam menghitung penilaian efektivitas menggunakan capaian per RO yaitu membandingkan antara Realisasi Volume RO (RVRO) dengan Target Volume RO (TVRO) selanjutnya dihitung rata – rata aritmatik capaian per RO.

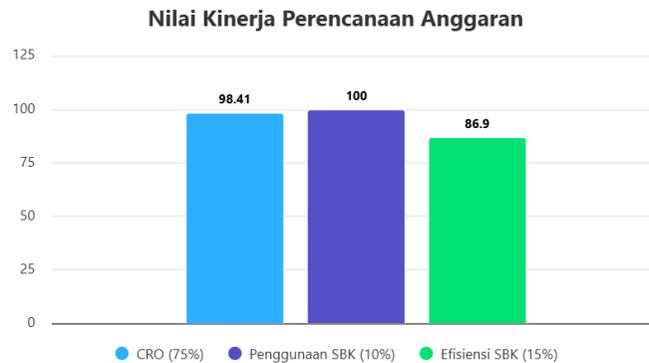
Dalam menghitung penilaian efisiensi ada 2 yang pertama penggunaan SBKK dan SBKU perhitungannya adalah seberapa banyak penggunaan RO yang menggunakan SBKK dan SBKU dibanding RO yang tidak menggunakan SBKK dan SBKU, semakin banyak RO menggunakan SBKK dan SBKU semakin baik nilainya. Kemudian perhitungan efisiensi yang kedua yaitu efisiensi SBK, membandingkan hasil pengurangan antara Indeks RO SBK dengan Indeks realisasi per RO SBK. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian

Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi Monev Kemenkeu.

Tabel 11 Capaian IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Setditjen PKRL Pada Tahun 2024

SK – 1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL					
IK – 3				Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Setditjen PKRL					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	-	71	96,84	120	8,64	86	112,6

A. Capaian IK Tahun 2024



"Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi"

Gambar 6 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Setditjen PKRL Tahun 2024

Nilai Kinerja Perencanaan pada tahun 2024 adalah 96,84 (termasuk kategori sangat baik) sesuai dengan penilaian kinerja perencanaan pada aplikasi Monev Kemenkeu. Nilai tersebut dipengaruhi oleh

1. Capaian rincian output (CRO) sebesar 98,41% yang sebgaiian besar CRO di Setditjen PRL dan Direktorat lingkup DJPRL telah tercapai sesuai dengan target. Dari 63 RO, 62 RO sudah tercapai sesuai target dengan progress 100%, 1 RO masih dalam proses.
2. Efisiensi penggunaan SBK sebesar 100% yang dipengaruhi oleh semua RO telah menggunakan SBK.
3. Efisiensi SBK sebesar 86,90% dipengaruhi oleh Realisasi Volume RO (RVRO) telah sesuai dengan Target Volume RO (TVRO), dan indeks realisasi anggaran lebih kecil dari Indeks SBK dan SBKK.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya
Capaian Kinerja Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian Kinerja tahun sebelumnya karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2024, dimana pada tahun sebelumnya merupakan IK Nilai Kinerja Anggaran yang penilaiannya berdasarkan, penyerapan anggaran, konsistensi, Capaian rincian output (CRO), dan efisiensi.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024
Jika dibandingkan dengan target pada Renstra DJPKRL 2020-2024 sebesar 86 maka, capaian pada tahun 2024 sebesar 96,84 (112,6%) dimana hasil tersebut sudah melebihi target Renstra DJPKRL Tahun 2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
Pencapaian NPKA didukung dengan capaian kinerja anggaran pada unit kerja tingkat pusat. Secara teknis pelaporan, tidak ada kendala yang ditemui pada penilaian Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran karena secara otomatis sudah terintegrasi dengan aplikasi pertanggungjawaban anggaran. Oleh karena itu, tidak ada kendala khusus dalam pencapaian IKU ini.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL dan aplikasi berbasis website.
- F. Kegiatan Pendukung pada Tahun 2024
Pada Tahun 2024 telah dilakukan pemantauan NKA di lingkup DJPKRL pada Aplikasi Monev Kemenkeu pada tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024.
- G. Rencana Aksi Tahun 2025
Pada Tahun 2025 akan dilakukan pemantauan NKPA Setditjen PKRL dan Unit Kerja di Lingkup DJPKRL.

IK 4. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setditjen PKRL

Indeks Profesionalitas ASN Setditjen PKRL merupakan penilaian Profesional ASN yang dilakukan dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara KKP yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas. Tingkat kompetensi SDM KKP merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga ASN tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien.

Integritas merupakan suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip, dan digunakan untuk menggambarkan kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang.

Nilai Indeks Kompetensi dan Integritas diperoleh dari rata-rata nilai 4 (empat) variabel pembentuk, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualifikasi yaitu melakukan usulan perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Tugas dan Izin belajar, agar usulan Tugas dan Izin belajar sesuai dengan kebutuhan Beban Kerja di Masing-masing unit kerja;
- 2) Peningkatan Kompetensi yaitu melakukan pengiriman form HCDP (*Human Capital Development*) agar diisi oleh masing-masing Subbagian dalam rangka rencana kebutuhan kompetensi jenis pelatihan klasikal (Diklat Pim, Diklat Teknis/Jabung, diklat 20 JP, Seminar) dan pelatihan non klasikal, usulan tersebut akan diserahkan ke Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, BRSDMKP;
- 3) Peningkatan Kinerja yaitu melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja pegawai tahun 2024 kepada seluruh pegawai Setditjen PKRL dengan mengirim Surat Dinas terkait pengisian SKP dan Penilaian Hasil dan Perilaku Kerja Tahun 2024, Penyusunan Rencana Kinerja/SKP Tahun 2024 dan melakukan asistensi dalam setiap penyusunan SKP di lingkup Setditjen PKRL;
- 4) Peningkatan Disiplin yang dilakukan dengan pemantauan dan evaluasi kinerja baik melalui kehadiran maupun penilaian hasil capaian kinerja dan pencegahan pelanggaran etika pegawai.

Pengolahan atas hasil penilaian IKM akan dilakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi Dashboard Indeks Profesionalitas ASN pada website <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>.

CARA MENGUKUR

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$
$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP1 = W1j * R1j$$
$$IP2 = W2k * R2k$$
$$IP3 = W3l * R3l$$
$$IP4 = W4m * R4m$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalitas ASN

IPi = Indeks Profesionalitas ke-i

IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)

IP2 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%)

IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%)

IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)
W1j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j* Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j
W2k = Bobot Indikator Kompetensi ke-k* Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k
W3l = Bobot Indikator Kinerja ke-l* Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l
W4m = Bobot Indikator Disiplin ke-m* Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Kategori:

1. Sangat Tinggi (sangat professional) nilai 91-100
2. Tinggi (cenderung professional) nilai 81-90
3. Sedang (rentan tidak professional) nilai 71-80
4. Rendah (cenderung tidak professional) nilai 61-70
5. Sangat Rendah (sangat tidak professional) nilai <60.

Tabel 12 Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Setditjen PKRL Tahun 2024

SK – 1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL						
IK – 4				Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setditjen PKRL						
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
61,88	76,4	83,31	88,95	88	88,5	100,97	-0,45	88	100,97	

A. Capaian IK Tahun 2024

Berdasarkan *Dashboard* Pengukuran IP ASN pada tautan <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2024>, angka IP ASN Setditjen PKRL sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 adalah 88,85 (kategori tinggi) yang diperoleh dengan rincian:

Kualifikasi : 21,73
Kompetensi : 37,12
Kinerja : 25
Disiplin : 5

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya

Capaian Kinerja Tahun 2024 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2023 karena terdapat pegawai yang telah mutasi alih tugas ke unit kerja lain sehingga mempengaruhi nilai aspek kualifikasi. Namun, capaian pada tahun 2024 lebih tinggi dari pada capaian pada tahun 2020-2022 karena terdapat peningkatan dari komponen kualifikasi dan kompetensi, khususnya karena terbatasnya peningkatan kapasitas pada era Covid-19.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024

Jika dibandingkan dengan target pada Renstra DJPKRL 2020-2024 sebesar 88 maka, capaian pada tahun 2024 sebesar 88,5 (100,97%) dimana hasil tersebut sudah melebihi target Renstra DJPKRL Tahun 2024.

D. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki capaian yang dapat dibandingkan dengan Standar Nasional namun Capaian Kinerja IK ini dapat dibandingkan dengan Unit Kerja Level 2 lainnya dalam lingkup DJPKRL seperti Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, Direktorat Penataan Ruang Laut, Direktorat Konservasi dan Biota Perairan, serta Direktorat Jasa Kelautan. Perbandingan Capaian Kinerja indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 13. Tabel Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN

Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
Setditjen PKRL	21,73	37,12	25	5	88,85
Dit. PRL	22,08	35,73	26,1	5	88,92
Dit. P4K	22,07	35,3	25,69	5	88,06
Dit. Jaskel	21,67	38,07	25,75	5	90,48
Dit. KEBP	21,89	37,37	25	5	89,26

Berdasarkan perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN dapat disimpulkan bahwa capaian Setditjen PKRL masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Dit. Jasa Kelautan, Dit. KEBP, dan Dit. PRL namun masih lebih baik jika dibandingkan dengan Dit. P4K. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keaktifan seluruh pegawai di lingkup Setditjen PKRL dalam peningkatan kompetensi jika dibandingkan dengan Dit. Jasa Kelautan, Dit. KEBP, serta Dit. PRL.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Perolehan Nilai IP ASN Setditjen PKRL pada Tahun 2024 didukung oleh keaktifan seluruh pegawai di lingkup Setditjen PKRL dalam peningkatan kompetensi.

- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN lingkup Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut untuk tercapainya Profesionalitas ASN secara menyeluruh di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- G. Kegiatan Pendukung pada Tahun 2024
Dalam rangka memenuhi pencapaian nilai profesionalitas ASN tersebut, telah dilaksanakan kegiatan pendukung diantaranya:
1. Penyusunan Soal SKT dan SKB JFT dan JFU bidang Kelautan Perikanan;
 2. Rekonsiliasi Kepegawaian di Lingkup DJPKRL Tahun 2024;
 3. Peningkatan Kapasitas SDM Penyelenggaraan SDM PKRL;
 4. Asistensi Penyusunan Rencana Kinerja/SKP Tahun 2024 di lingkup Setditjen PKRL;
 5. Pengumpulan SKP Final Tahun 2023, Triwulan I Tahun 2024, Triwulan II Tahun 2024, Triwulan III Tahun 2024 seluruh pegawai DJPKRL;
 6. Sosialisasi IP ASN dan Kenaikan Pangkat di lingkup DJPKRL Tahun 2024;
 7. Tindak Lanjut IP ASN dan Kenaikan Pangkat di lingkup DJPKRL Tahun 2024;
 8. Rapat Peningkatan Nilai IP-ASN Lingkup DJPKRL, Verifikasi SK Kenaikan Pangkat PNS lingkup DJPKRL Tahun 2024 serta Penyelesaian Permasalahan Mutasi Pegawai DPK pada Instansi lain;
 9. Rapat Koordinasi Teknis Kepegawaian dalam rangka pelaksanaan Manajemen Tugas dan Fungsi Kepegawaian bidang PKRL sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Implementasi Manajemen Talenta melalui transformasi sistem karir berbasis sistem merit pada Jabatan Manajerial, Non Manajerial dan Fungsional sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
 11. Asistensi Peremajaan Data Diklat/Kursus pada Aplikasi MyASN BKN;

12. Pelaksanaan asistensi dan pemutakhiran data diklat/kursus pada aplikasi MyASN BKN;
13. Pelaksanaan kegiatan peningkatan budaya etos kerja dan penguatan sinergitas Aparatur Sipil Negara;
14. Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Formal Pegawai melalui program Tugas Belajar dan Izin Belajar;
15. Perencanaan pengadaan pegawai melalui verifikasi dan seleksi administrasi Pengadaan CPNS KKP Tahun Anggaran 2024;
16. Layanan Administrasi ASN berupa pengusulan KP Periode Agustus 2024, Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Peningkatan Pendidikan serta pengusulan pemberian penghargaan Satya Lancana Karya Satya 10, 20 dan 30 tahun bagi pegawai dilingkup Sekretariat Ditjen PKRL;
17. Pembekalan dan Asistensi Dalam Rangka Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1 dan 2 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun Anggaran 2024;
18. Penataan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
19. Penyesuaian Nomenklatur dan Penataan SDM Jabatan Pelaksana sesuai dengan Kepmen KP 51/2024 dan Penyelesaian Disparitas Data ASN melalui My ASN dan SIASN serta Monitoring Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Tahun 2024;
20. Penyusunan Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Jabatan Fungsional PELP dan APJK.

H. Rencana Aksi Tahun 2025

1. Peningkatan kualifikasi pegawai melalui pembukaan formasi pendidikan formal baik melalui program beasiswa tugas belajar maupun izin belajar dengan biaya mandiri.
2. Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baik melalui metode klasikal seperti Diklat Penjurangan, Diklat Teknis/Non Teknis dan Diklat Fungsional maupun yang berbasis e-learning baik dalam bentuk Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Seminar dan Webinar dalam rangka pemenuhan kebutuhan nilai Diklat 20 JP, serta menginformasikan kepada para pegawai agar melakukan update hasil keikutsertaan berupa sertifikat pada aplikasi e-pegawai.kkp.go.id dalam rangka peningkatan kompetensi.

3. Penyusunan Matrik Peran Hasil dan Rencana Hasil Kerja Periode Tahun 2025 melalui aplikasi eKinerja BKN.
4. Disiplin pegawai melalui monitoring presensi kehadiran pada aplikasi presensi yang dilaksanakan per semester.

IK 5. Nilai PM SAKIP DJPKRL

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di DJPKRL setiap tahunnya. Pada tahun 2021 Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 dan telah diperbaru melalui Permen RB 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang sudah dituangkan pada aplikasi kinerjaku pada menu Evaluasi > LKE).

Nilai PM SAKIP DJPKRL adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat II, Inspektorat Jenderal KKP. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Tabel 14 Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian IK pada Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 15 Capaian IK PM SAKIP DJPKRL Tahun 2024

SK – 1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL					
IK – 5				Nilai PMSAKIP DJPKRL					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
86,99	87,02	81,1	84,53	84	89,07	106,04	4,54	83,75	89,07

A. Capaian IK Tahun 2024

Nilai PM SAKIP DJPKRL tahun 2024 adalah 89,07 (memuaskan) sesuai dengan surat Inspektorat Jenderal KKP Nomor T.253/ITJ/HP.440/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Evaluasi AKIP tahun 2024 dilakukan terhadap Unit Organisasi Level 1 DJPKRL, dan 4 (empat) Unit Organisasi Level 2 yang diuji petik (sampling), yaitu:

- a. Direktorat Penataan Ruang Laut (Dit. PRL);
- b. Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Dit. KEBP);
- b. Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang;
- c. Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang.

Evaluasi dilakukan untuk keseluruhan komponen manajemen kinerja, yaitu: a. Perencanaan Kinerja; b. Pengukuran Kinerja; c. Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal. Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang telah tertuang pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) yang dapat diakses melalui <https://simwas.kkp.go.id>. Uraian hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja sebagaimana terlampir.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya

Nilai PM SAKIP Tahun 2020-2021 memiliki perbedaan penilaian dengan PM SAKIP Tahun 2022-2024, dimana komponennya lebih banyak meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan Kinerja, evaluasi Internal, dan capaian kinerja. Sedangkan mulai tahun 2022 komponen yang dinilai untuk PM SAKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Capaian IK ini meningkat dari tahun ke tahun (2022-2024) karena terdapat peningkatan dari setiap nilai komponen sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 16 Perbandingan Nilai AKIP DJPRL Tahun 2024 dan Tahun 2023

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai AKIP 2022	Nilai AKIP 2023	Nilai AKIP 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	24,75	24,30	26,51
2	Pengukuran Kinerja	30	24,30	26,40	27,41
3	Pelaporan Kinerja	15	12,30	13,20	13,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,75	20,63	21,34
Nilai AKIP		100	81,1	84,53	89,07
Predikat Penilaian		A	A	A	A

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024
Target akhir IK ini pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (83,75) telah tercapai di tahun 2024 dengan nilai 89,07 (106,35%).
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Keberhasilan capaian IKU PM SAKIP didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkup DJPKRL dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPKRL.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL dan dibantu dengan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.
- F. Kegiatan Pendukung
- 1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Triwulan IV tahun 2024 yang meliputi: pengukuran kinerja, verifikasi capaian, verifikasi eMonev Bappenas, penyusunan laporan kinerja, pemantauan bantuan pemerintah, pemantauan dan pelaporan kegiatan prioritas pantauan KSP, pengukuran dan evaluasi rencana aksi DJPKRL, dan pemantauan dan pelaporan kegiatan yang termasuk dalam Kebijakan Kelautan Indonesia, serta pemantauan dan pelaporan program percepatan kemiskinan ekstrem.
 - 2) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis SAKIP tanggal 14-17 Agustus 2024 kerjasama dengan Magister Ilmu Administrasi Publik (MAP),

FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, acara ini diikuti oleh Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPKRL, perwakilan Inspektorat Jenderal KKP, perwakilan dari Biro Perencanaan, perwakilan dari Tugas Pembantuan.

G. Rencana Aksi Tahun 2025

Pada Tahun 2025 akan dilakukan penyiapan data AKIP dan PM SAKIP di lingkup DJPKRL.

IK 6. Nilai PM SAKIP Lingkup Setditjen PKRL

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh entitas Kementerian/Lembaga secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan kerja, unit organisasi hingga tingkat Kementerian/Lembaga.

Mengacu hal tersebut di atas dan dalam rangka implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka sejak Tahun 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga penilaian capaian kinerja. Pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017.

Pemerintah melakukan berbagai penyempurnaan peraturan terkait pengelolaan kinerja yang mendorong untuk:

1. peningkatan kinerja agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporannya berjalan dengan baik dan agar manfaat betul-betul dirasakan;
2. peningkatan hubungan yang saling terkait pada kinerja individu, organisasi dan pembangunan; dan
3. penciptaan kerja yang lebih kolaboratif dan dinamis seiring dengan adanya transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional yang telah dilakukan sejak tahun 2020 lalu.

Pada tahun 2021, terdapat peraturan baru Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Nilai PM SAKIP di Lingkup Setditjen PKRL adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen PKRL. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Tabel 17 Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang

Predikat	Nilai	Interpretasi
		andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian IK PM SAKIP di Lingkup Setditjen PKRL Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 18 Capaian IK PM SAKIP di Lingkup Setditjen PKRL Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 6		Nilai PM SAKIP di Lingkup Setditjen PKRL							
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	87,3	81	89,50	110,49	2,20	-	-

A. Capaian IK Tahun 2024

Pada tahun 2024, Nilai PM SAKIP di Lingkup Setditjen PKRL telah tercapai 89,5 atau predikat A (memuaskan) dengan rincian per komponen yang dinilai sebagai berikut

Perencanaan kinerja: 27,6

Pengukuran Kinerja: 27,6

Pelaporan Kinerja: 13,8

Evaluasi Internal: 20,5.

Uraian hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dokumen perencanaan kinerja Tahun 2024 pada Sekretariat Ditjen PKRL telah tersedia, dipublikasikan dan dipertahankan setidaknya selama 5 tahun yaitu sejak Tahun 2020. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu berorientasi hasil, dengan ukuran kinerja yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound* (SMART), menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*). Perencanaan kinerja juga telah dimanfaatkan dalam mewujudkan hasil yang berkesinambungan, melalui pemantauan rencana aksi kinerja secara berkala, perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan atas capaian periode sebelumnya, dan keterlibatan pimpinan dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Adapun, beberapa upaya yang dapat dihargai dalam pemenuhan kriteria kualitas tersebut dengan telah membuat hasil analisis SMART terhadap seluruh Indikator Kinerja Tahun 2023-2024 dan upaya inovatif yang telah dilakukan dalam mendukung pemenuhan kriteria pemanfaatan perencanaan kinerja, yaitu:

- a. Melakukan kaji ulang terhadap Renstra Tahun 2020-2024 sebagai bahan perencanaan kinerja periode selanjutnya, dalam hal penyesuaian dan pemutahiran target kinerja sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;
- b. Untuk mengakomodir pelaksanaan PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimen di Laut Melalui Pendapatan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut, mengusulkan perubahan target PNBPN semula Rp708.313.211.523 dengan penambahan PNBPN dari SDA sebesar Rp1,708.500.000.000 sehingga target PNBPN Ditjen PKRL Tahun 2024 menjadi Rp2,416.813.211.523;

- c. DJPKRL dalam Mengampu 3 (tiga) kegiatan prioritas Blue Economy KKP, salah satunya program prioritas memperluas kawasan konservasi (Dit. KEBP) yang menjadi bagian untuk mengupayakan pendanaan selain dari APBN. Salah satu contoh kegiatan untuk mendukung kawasan konservasi diusulkan dalam proposal Blue Ecosystem Adaptation Mechanisme (BEAM) bagian dari Program Blue Halo S yang di-launching pada G20 dengan estimasi pendanaan dari Global Climate Change senilai 69 juta dollar, dalam hal ini Sekretariat Ditjen PKRL turut serta dalam mengoordinasikan dan mengawal persiapan proyek ini.
- d. Mengembangkan inovasi pendanaan sesuai mandat ke-6 RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 dan Arahan Presiden yakni: (1) Indonesia sebagai penerima manfaat kurang lebih 10 juta dollar yang berasal dari foregone coupon payment untuk pengelolaan kawasan konservasi. Guna mendukung Indonesia Coral Bond Project, telah diusulkan pendanaan melalui The Global Environment Facility (GEF) Blended Finance Program, dan telah disetujui GEF menyediakan dana 13,76 juta dollar untuk pembayaran outcome payer/Conservation Success Payment; dan (2) Debt-for-nature swap and coral reef conservation, merupakan perjanjian untuk pertukaran utang untuk konservasi terumbu karang.

2. Pengukuran Kinerja

Pedoman teknis pengukuran kinerja dan data Kinerja Tahun 2024 Sekretariat Ditjen PKRL telah tersedia dan dipertahankan setidaknya selama 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2020. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Selain itu, Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward and Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Adapun beberapa upaya inovatif yang telah dilakukan dan dapat dihargai dalam mendukung pemenuhan kriteria kualitas dan pemanfaatan pengukuran kinerja, yaitu:

- a) Sekretariat Ditjen PKRL telah melakukan rapat pengukuran kinerja setiap triwulan di setiap level di lingkup unit kerja Ditjen PKRL;
- b) Sekretariat Ditjen PKRL telah melakukan monitoring atas pencapaian target kinerja bantuan pemerintah lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024;

- c) Terdapat pedoman evaluasi efektivitas bantuan pemerintah, yang telah menjadi dasar penyusunan instrumen evaluasi keberhasilan rehabilitasi mangrove oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang dikoordinir Kantor Staf Presiden (KSP);
- d) Ditjen PKRL melalui Sekretariat Ditjen PKRL telah memberikan Reward and Punishment, Reward berupa apresiasi pemeringkatan NKO dan jenis lainnya. Punishment berupa teguran terhadap unit kerja dengan Nilai Kinerja cukup, kurang, sangat kurang dan belum ada penilaian;
- e) Ditjen PKRL melalui Sekretariat Ditjen PKRL memberikan apresiasi berupa peningkatan kapasitas bagi UPT yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan;
- f) Ditjen PKRL melalui Sekretariat Ditjen PKRL memberikan apresiasi kepada pengelola kawasan konservasi, kelompok masyarakat, pelaku usaha (KKPRL) pada saat Konferensi Nasional XI Pengelolaan Sumber Daya Laut.

3. Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) telah disusun dan dipertahankan setidaknya selama 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2020 dan mengungkapkan informasi tentang pencapaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan/target jangka menengah/realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya/realisasi kinerja di internal KKP/keberhasilan atau kegagalan mencapai target kinerja, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, dan perbaikan dan penyempurnaan kinerja, serta memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Namun, pada Sekretariat Ditjen PKRL belum melakukan perbandingan realisasi kinerja di level Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja).

Pada kriteria kualitas pelaporan belum seluruhnya terpenuhi sehingga dinilai B. Adapun, beberapa upaya inovatif yang telah dilakukan dan dapat dihargai dalam mendukung pemenuhan kriteria pemanfaatan pelaporan kinerja, yaitu:

- a) Sekretariat Ditjen PKRL telah melakukan rapat pengukuran kinerja setiap triwulan di setiap level di lingkup unit kerja Ditjen PKRL;

- b) Sekretariat Ditjen PKRL telah melakukan monitoring atas pencapaian target kinerja bantuan pemerintah lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024;
 - c) Melakukan revisi nomenklatur RO program/kebijakan wisata Bahari yang terkena blokir secara nasional sehingga dapat dibuka blokirnya dan dieksekusi kegiatannya.
4. Evaluasi Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan setidaknya selama 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2020 secara berkualitas sesuai dengan pedoman teknis dan sumber daya yang memadai (Tahun 2020 - 2022 dengan indikator Rekonsiliasi kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja dan Tahun 2024 disesuaikan dengan perkembangan evaluasi menjadi PM SAKIP).

Adapun, beberapa upaya inovatif yang telah dilakukan dan dapat dihargai dalam mendukung pemenuhan kriteria kualitas evaluasi internal, yaitu: Ditjen PKRL melalui Sekretariat Ditjen PKRL mendapatkan Nilai SAKIP Tahun 2023 tertinggi level KKP (84,53), namun Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya meningkatkan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja internal sehingga dinilai B berdasarkan nilai efisiensi Sekretariat Ditjen PKRL dalam Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang tercantum pada Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART DJA) tahun 2023 sebesar 6,41 menurun dibandingkan dengan nilai efisiensi tahun 2022 sebesar 6,86.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya
- IKU ini adalah IKU baru pada tahun 2023 karena pada tahun sebelumnya adalah Rekonsiliasi Kinerja sehingga hanya dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Capaian tahun 2024 (89,5) lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 (87,3) karena terdapat peningkatan pada nilai komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja, seperti yang tertera pada tabel berikut

Tabel 19 Perbandingan Nilai AKIP Setditjen PKRL Tahun 2024 dan Tahun 2023

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai AKIP 2023	Nilai AKIP 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	25,2	27,6
2	Pengukuran Kinerja	30	27	27,6
3	Pelaporan Kinerja	15	12,6	13,8

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai AKIP 2023	Nilai AKIP 2024
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22,5	20,5
Nilai AKIP		100	87,3	89,5
Predikat Penilaian		A	A	A

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target IK ini dalam Renstra DJPRL Tahun 2024 sehingga capaian pada Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPRL. Namun IK ini secara tidak langsung mendukung IK PM SAKIP DJPRL yang juga ditargetkan di dalam Renstra DJPRL 2020-2024.

D. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki capaian yang dapat dibandingkan dengan Standar Nasional namun Capaian Kinerja IK ini dapat dibandingkan dengan Unit Kerja Level 2 lainnya dalam lingkup DJPKRL seperti Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, Direktorat Penataan Ruang Laut, Direktorat Konservasi dan Biota Perairan, serta Direktorat Jasa Kelautan. Perbandingan Capaian Kinerja indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 20. Tabel Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP

Komponen	Setditjen PKRL	Dit. P4K	Dit. PRL	Dit. KEBP	Dit. Jasa Kelautan
Perencanaan Kinerja	27,60	27,60	26,10	27,60	27,60
Pengukuran Kinerja	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60
Pelaporan Kinerja	13,80	12,90	13,80	13,80	12,90
Evaluasi Internal	20,50	18,50	20,50	19,75	18,50
Total	89,5	86,60	88,75	88	86,60
Predikat	A	A	A	A	A

Berdasarkan perbandingan capaian indikator kinerja PM SAKIP dapat disimpulkan bahwa capaian Setditjen PKRL berhasil mendapatkan capaian tertinggi dibandingkan dengan Unit Kerja Level 2 lainnya lingkup DJPKRL. Hasil ini didukung oleh adanya komitmen pimpinan dan tim pengelolaan kinerja di lingkup Setditjen PKRL dalam

mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPKRL.

- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Keberhasilan implementasi SAKIP di lingkungan Setditjen PKRL dipengaruhi adanya komitmen pimpinan dan tim pengelolaan kinerja di lingkup Setditjen PKRL dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPKRL.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN di Lingkup Setditjen PKRL dan dibantu dengan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.
- G. Kegiatan Pendukung pada Tahun 2024
- 1) Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Rencana Aksi DJPKRL dan Setditjen PKRL Triwulan IV Tahun 2023;
 - 2) Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023;
 - 3) Finalisasi Dokumen Kinerja Lingkup DJPKRL Tahun 2024;
 - 4) Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi DJPKRL Tahun 2024 ;
 - 5) Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Manual IKU Level 1 Lingkup Ditjen PKRL tahun 2024;
 - 6) Reviu Laporan Kinerja Tahun 2023 Direktorat dan UPT lingkup DJPKRL;
 - 7) Persiapan Kick Off Penyusunan Teknokratik Renstra DJPKRL 2025 – 2029;
 - 8) Penyusunan Manual IKU Level 2 Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024;
 - 9) Pemantauan, pelaporan dan evaluasi kinerja di lingkup DJPKRL Triwulan I Tahun 2024;
 - 10) Penyusunan Renstra Teknokratik DJPKRL Tahun 2025-2029;
 - 11) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Triwulan III tahun 2024 yang meliputi: pengukuran kinerja, verifikasi capaian, verifikasi eMonev Bappenas, penyusunan laporan kinerja, pemantauan bantuan pemerintah, pemantauan dan pelaporan kegiatan prioritas pantauan KSP, pengukuran dan evaluasi rencana aksi DJPKRL, dan pemantauan dan pelaporan kegiatan yang termasuk dalam Kebijakan Kelautan Indonesia, serta pemantauan dan pelaporan Rencana Aksi Nasional Inpres;
 - 12) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis SAKIP;
 - 13) Evaluasi AKIP Unit Kerja Level 2 di Lingkup DJPKRL.

H. Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 adalah pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Tahun 2025.

IK 7. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Penilaian maturitas SPIP dilakukan melalui penilaian pelaksanaan SPIP/manajemen risiko; pengelolaan keuangan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP serta mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian. Mekanisme Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

1. Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen K/L/D
2. Penjaminan Kualitas (PK) yg dilakukan oleh APIP pada K/L/D
3. Evaluasi oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri yg telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP

Unsur penilaian dalam maturitas SPIP meliputi:

1. Penetapan tujuan (40%), yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;
2. Struktur dan proses (30%), yang meliputi meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (dua puluh lima) sub unsur penilaian; dan
3. Pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP (30%), yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 11 (sebelas) sub unsur penilaian.

Penilaian Level Maturitas SPIP DJPKRL mengacu pada hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023/2024 yang dilakukan oleh Tim Asesor Kementerian Kelautan dan Perikanan dan telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal. Karakteristik level maturitas SPIP dan data/dokumen kelengkapan maturitas SPIP yang disiapkan disajikan pada gambar berikut



Gambar 7 Karakteristik Level Maturitas SPIP

DOKUMEN/BUKTI/DATA

LEVEL	Menyusun Perencanaan Kinerja	Mampu Mendefinisikan Kinerja	Strategi Pencapaian Relevan dan Terintegrasi	Desain dan Kebijakan Pengendalian	Struktur dan Proses Pengendalian Telah Dilaksanakan	Struktur dan Proses Pengendalian Efektif	Adaptif Terhadap Perubahan
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
2	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
1	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Gambar 8. Dokumen/Bukti/Data Maturitas SPIP

Capaian IK SPIP disajikan pada tabel berikut:

Tabel 21 Capaian IK Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL pada Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL								
IK – 7		Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL								
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	-	-	-	3,3	3,732	113,09	-	3,3	113,09	

A. Capaian IK Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Nilai Maturitas Struktur Dan Proses Penyelenggaraan SPIP unit DJPKRL sebesar 3,732 dari target sebesar 3,3 (113,09%). Hasil penilaian tersebut diperoleh dari komponen penilaian Struktur dan Proses yang telah dievaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Tabel 22 Hasil Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Maturitas Spikomponen Struktur Dan Proses DJPKRL

Kode	Subunsur	Kesimpulan Level (Tim PK)	Bobot Unsur	Nilai
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	4	3,75%	0,15
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi	4	3,75%	0,15
1.3	Kepemimpinan yang Kondusif	4	3,75%	0,15
1.4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	4	3,75%	0,15
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	3	3,75%	0,11
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3,667	3,75%	0,14
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	4	3,75%	0,15
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	4	3,75%	0,15
2.1	Identifikasi Risiko	4	10%	0,4
2.3	Analisis Risiko	4	3,75%	0,15
3.1	Reviu atas Kinerja	4	2,27%	0,09
3.2	Pembinaan SDM	4	2,27%	0,09
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	4	2,27%	0,07
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset	4	2,27%	0,09
3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja	4	2,27%	0,09
3.6	Pemisahan Fungsi	4	2,27%	0,09
3.7	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	4	2,27%	0,09
3.8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian	4	2,27%	0,07
3.9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	3	2,27%	0,07
3.10	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	4	2,27%	0,09

Kode	Subunsur	Kesimpulan Level (Tim PK)	Bobot Unsur	Nilai
3.11	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting	4	2,27%	0,09
4.1	Informasi yang Relevan	3,25	5%	0,16
4.2	Komunikasi yang Efektif	4	5%	0,2
5.1	Pemantauan Berkelanjutan	3	7,5%	0,23
5.2	Evaluasi Terpisah	4	7,5%	0,3
			100%	3,732

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya
 Pada tahun 2020-2023 tidak terdapat indikator kinerja nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP unit DJPKRL sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan 2024.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024
 Jika dibandingkan dengan target pada Renstra DJPKRL 2020-2024 sebesar 3,3 maka, capaian pada tahun 2024 sebesar 3,732 (113,09%) dimana hasil tersebut sudah melebihi target Renstra DJPKRL Tahun 2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 Komitmen pelaksana kegiatan di unit kerja dalam pengendalian internal lingkup Setditjen PRL dan pengukuran tingkat maturitas ditingkat DJPKRL dinilai baik.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL.
- F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan IV Tahun 2024
 Pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni meliputi :
1. Pemantauan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko (MR) tahun 2024 lingkup Ditjen PKRL dan Rencana Penyusunan MR Tahun 2025;
 2. Inventarisasi Pemenuhan Dokumen Uji Penilaian Identifikasi dan Kecukupan Rancangan Pengendalian Atas Penetapan Akun Signifikan Entitas Akuntansi Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024;
 3. Inventarisasi Dokumen Pengujian Tabel C1 lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024;

4. Inventarisasi Dokumen Pengujian Tabel C1 dan Tabel C2 lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024;
5. Finalisasi Pengujian Atribut Tabel C1 dan C2 lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024;
6. Persiapan penyusunan Manajemen Resiko Lautra.

G. Rencana Aksi Tahun 2025

1. Penyusunan dan pemantauan laporan SPIP Setditjen PKRL; dan
2. Pelaksanaan kegiatan dan menindaklanjuti evaluasi hasil maturitas SPIP.

IK 8. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Setditjen PKRL

Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL. Hal ini menjadi amanah sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Teknik Menghitung IKM ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun.

Laporan SPIP disusun secara triwulanan. Laporan SPIP yang disusun pada tahun 2024 adalah Laporan SPIP pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024.

Tabel 23 Capaian IK Laporan SPIP yang disusun Lingkup Setditjen PKRL Tahun 2024

SK – 1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL						
IK – 8				Laporan SPIP yang disusun Lingkup Setditjen PKRL						
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	-	4	4	4	4	100	0	-	-	

A. Capaian IK Tahun 2024

Pada Tahun 2024 telah tercapai tercapai 4 (empat) dari target 4 (empat) dokumen berupa Laporan SPIP Setditjen PKRL. Dokumen tersebut merupakan dokumen Laporan SPIP Setditjen PKRL Tahun 2023, Laporan SPIP Setditjen PKRL Triwulan I Tahun 2024, Laporan SPIP Setditjen PKRL Triwulan II Tahun 2024, dan Laporan SPIP Setditjen PKRL Triwulan III Tahun 2024.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya
Capaian indikator Laporan SPIP yang disusun Lingkup Setditjen PKRL pada Tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya (2020-2023) yakni sebanyak 4 dokumen. Laporan SPIP disusun setiap triwulanan dan dalam satu tahun anggaran disusun 4 laporan triwulanan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024
Target dan Indikator ini tidak terdapat di Renstra DJPRL Tahun 2020-2024. Namun, penilaian ini berkontribusi dalam penilaian SPIP DJPKRL.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional
Indikator kinerja ini tidak memiliki capaian yang dapat dibandingkan dengan Standar Nasional namun Capaian Kinerja IK ini dapat dibandingkan dengan Unit Kerja Level 2 lainnya dalam lingkup DJPKRL seperti Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, Direktorat Penataan Ruang Laut, Direktorat Konservasi dan Biota Perairan, serta Direktorat Jasa Kelautan. Perbandingan Capaian Kinerja indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 24. Tabel Capaian Indikator Kinerja Laporan SPIP yang disusun

Capaian Indikator Kinerja				
Setditjen PKRL	Dit. P4K	Dit. PRL	Dit. KEBP	Dit. Jasa Kelautan
4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen

Berdasarkan perbandingan capaian indikator kinerja Laporan SPIP yang disusun dapat disimpulkan bahwa capaian Setditjen PKRL sama dengan Unit Kerja Level 2 lainnya lingkup DJPKRL yakni sebanyak 4 dokumen.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
Tidak ada kendala khusus dalam pelaksanaan indikator ini.

- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN Setditjen PKRL.
- G. Kegiatan Pendukung Tahun 2024
Kegiatan Pendukung yang dilakukan dalam rangka pencapaian target Kinerja ini adalah :
1. Pemantauan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko (MR) tahun 2024 lingkup Ditjen PKRL dan Rencana Penyusunan MR Tahun 2025
 2. Inventarisasi Pemenuhan Dokumen Uji Penilaian Identifikasi dan Kecukupan Rancangan Pengendalian Atas Penetapan Akun Signifikan Entitas Akuntansi Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024, tanggal
 3. Inventarisasi Dokumen Pengujian Tabel C1 lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024
 4. Inventarisasi Dokumen Pengujian Tabel C1 dan Tabel C2 lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024
 5. Finalisasi Pengujian Atribut Tabel C1 dan C2 lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024
 6. Persiapan penyusunan Manajemen Resiko Lainnya.
- H. Rencana Aksi Tahun 2025
1. Penyusunan dan pemantauan laporan SPIP Setditjen PKRL; dan
 2. Pelaksanaan kegiatan dan menindaklanjuti evaluasi hasil maturitas SPIP.
 - 3.

IK 9. Persentase Unit Kerja Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan (MP) adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan atau informasi untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari oleh setiap pegawai yang tergabung dalam portal. Penerapan manajemen pengetahuan terstandar menggunakan laman <https://portal.kkp.go.id/kkp>.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur Sasaran Kegiatan adalah tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen PKRL yang handal dan mudah diakses, yaitu: persentase unit kerja Ditjen PKRL yang menerapkan sistem

manajemen pengetahuan yang terstandar.

Tingkat penerapan MP di Level Ditjen PKRL dihitung berdasarkan komponen Keaktifan Pejabat Eselon III dengan bobot 100%, dengan ketentuan Direktur/Sekretaris melakukan posting keaktifan dengan target minimal 3 poin dan maksimal dapat diterima sebesar 4 poin per triwulan yang berasal dari pilihan kategori dan pembobotan poin sebagai berikut: (i) Unggah dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dilengkapi foto dan notulensi serta narasi memenuhi kriteria 5W1H (what, where, when, who, why, and how) mempunyai bobot poin 0,5; (ii) Berbagi informasi berupa karya tulis, jurnal atau hasil penelitian sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai bobot poin 1; dan (iii) Berbagi informasi berupa video atau campaign dengan tema Kelautan dan Perikanan sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai bobot poin 3. Target 3 poin per triwulan dapat berasal dari 1 kategori penilaian maupun kombinasi dari ketiga kategori tersebut. Jumlah poin maksimal yang dapat dihitung adalah 4.

Formula Penghitungan Manajemen Pengetahuan adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai MP}(\%) = \frac{\text{Jumlah Poin Keaktifan Pejabat Level II}}{\text{Jumlah Target Poin Keaktifan Pejabat Level II}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jumlah poin Keaktifan pejabat level 2 lingkup Ditjen PKRL yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP dibanding total target poin pejabat level 2 lingkup Ditjen PKRL.

Capaian IK Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 25 Capaian IK Persentase Unit Kerja Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pada Tahun 2024

SK – 1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL						
IK – 9				Persentase Unit Kerja Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar						
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
94,44	89,9	100	133,3	94	133,33	120	0	94	120	

A. Capaian IK Tahun 2024

Realisasi Nilai MP lingkup Setditjen PKRL adalah 133,3% yang berasal dari komponen keaktifan Sekretaris DJPKRL. Realisasi Persentase Unit Kerja Lingkup Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen

Pengetahuan yang Terstandar (133,3%) terhadap target tahun 2024 (94%) adalah sebesar 141,84%, artinya capaian pada triwulan IV telah melampaui target tahun 2024. Hal ini karena Sekretaris Ditjen PKRL telah memenuhi unggah posting kegiatan yang diikuti dan mencapai poin maksimal yang dapat diterima pada Portal KKP.

Tabel 26 Nilai Manajemen Pengetahuan Setditjen PKRL Tahun 2024

Sekretariat Ditjen PKRL	Keaktifan
Target	3
Realisasi	4
Skor	133,3%
Nilai MP	133,3%

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya
 Capaian Kinerja Tahun 2024 (133,3%) sama dengan capaian tahun 2023 karena sistem penilaiannya sama begitu juga dengan keterlibatan timja dalam postingan kinerja pada portal KKP. Sedangkan capaian tahun 2020-2022 menggunakan mekanisme yang berbeda dan kontribusi postingan tidak sebanyak pada tahun 2023-2024.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024
 Jika dibandingkan dengan target pada Renstra DJPKRL 2020-2024 sebesar 94 maka, capaian pada tahun 2024 sebesar 133,33 (120%) dimana hasil tersebut sudah melebihi target Renstra DJPKRL Tahun 2024.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional
 Indikator kinerja ini tidak memiliki capaian yang dapat dibandingkan dengan Standar Nasional namun Capaian Kinerja IK ini dapat dibandingkan dengan Unit Kerja Level 2 lainnya dalam lingkup DJPKRL seperti Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, Direktorat Penataan Ruang Laut, Direktorat Konservasi dan Biota Perairan, serta Direktorat Jasa Kelautan. Perbandingan Capaian Kinerja indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 27. Tabel Perbandingan Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Capaian Indikator Kinerja

Setditjen PKRL	Dit. P4K	Dit. PRL	Dit. KEBP	Dit. Jasa Kelautan
133,33	133,33	133,33	133,33	133,33

Berdasarkan perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Unit Kerja Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar dapat disimpulkan bahwa capaian Setditjen PKRL sama dengan Unit Kerja Level 2 lainnya lingkup DJPKRL yakni sebesar 133,33.

- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
 - a. Kendala: tidak ada kendala dalam penerapan MP Terstandar.
 - b. Solusi: untuk pencapaian indicator ini tidak ada anggaran khusus, namun demikian perlu didukung keaktifan Sekretaris DJPKRL dalam mengunggah informasi pada Portal KKP.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan keaktifan Sekretaris Ditjen PKRL dalam berbagi pengetahuan melalui Portal KKP.
- G. Kegiatan Pendukung pada Tahun 2024
Monitoring nilai Manajemen Pengetahuan melalui laman Portal KKP setiap bulan.
- H. Rencana Tahun 2025
Monitoring bulanan dan Penghitungan Capaian IKU Persentase Unit Kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar Tahun 2025 melalui laman Portal KKP secara triwulanan.

IK 10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan

Definisi rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada DJPKRL berdasarkan LHP yang terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Sekretariat DJPKRL yang menjadi objek pengawasan.

Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindaklanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan Pada Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut

Tabel 28 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindaklanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan Pada Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL							
IK – 10		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan							
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
91,89	91,8	85,9	94,5	80	96,97	120	2,17	-	-

A. Capaian IK Tahun 2024

Capaian IKU ini diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Realisasi capaian IKU atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan pada periode 1 Oktober 2023 sampai dengan 30 September 2024 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas pada masing-masing satker sampai dengan 31 Desember 2024 pada Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti dengan status tuntas lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL pada periode tersebut sebesar 96,97% (96 dari 99 rekomendasi telah ditindaklanjuti).

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja pada Tahun 2024 (96,97%) lebih tinggi dari pada capaian Tahun 2020-2023 karena pada tahun 2024 lebih sedikit sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dengan status tuntas (proses).

	2020	2021	2022	2023	2024
Rekomendasi	37	367	78	91	99
Tuntas (Telah Ditindaklanjuti)	34	357	67	86	96
Sisa Rekomendasi yang Belum Tuntas	3	10	11	5	3

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target ini pada IK Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 sehingga Capaian Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

- D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional Indikator kinerja ini tidak memiliki capaian yang dapat dibandingkan dengan Standar Nasional namun Capaian Kinerja IK ini dapat dibandingkan dengan Unit Kerja Level 2 lainnya dalam lingkup DJPKRL seperti Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, Direktorat Penataan Ruang Laut, Direktorat Konservasi dan Biota Perairan, serta Direktorat Jasa Kelautan. Perbandingan Capaian Kinerja indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 29. Tabel Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan

Satker	Rekomendasi	Tindak Lanjut Tuntas		Sisa Rekomendasi		Capaian
		Jumlah	%	Jumlah	%	
Setditjen PKRL	99	96	96,97	3	3,03	96,97
Dit. PRL	33	27	81,82	6	18,18	81,82
Dit. P4K	87	81	93,10	6	6,90	93,10
Dit. Jaskel	48	45	93,75	3	6,25	93,75
Dit. KEBP	31	30	96,77	1	3,23	96,77

Berdasarkan perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dapat disimpulkan bahwa capaian Setditjen PKRL berhasil mendapatkan capaian tertinggi dibandingkan dengan Unit Kerja Level 2 lainnya lingkup DJPKRL. Hasil ini didukung oleh adanya komitmen penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP.

- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
Keberhasilan indikator ini didukung oleh komitmen penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP, melakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawab kegiatan agar rekomendasi dituntaskan tepat waktu, melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal KKP untuk penyamaan persepsi dokumen yang harus disiapkan.

- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan Penanggung Jawab Kegiatan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan Itjen
- G. Kegiatan Pendukung pada Tahun 2024
1. Koordinasi dengan seluruh Penanggung Jawab Kegiatan lingkup Sekretariat DJPKRL terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Itjen yang ada di aplikasi SIDAK; dan
 2. Telah dilaksanakan Rapat terkait Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL.
- H. Rencana Aksi Tahun 2025
Koordinasi dengan seluruh Penanggung Jawab Kegiatan lingkup Sekretariat DJPKRL terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Itjen yang ada di aplikasi SIDAK serta melaksanakan rapat pertemuan dengan para penanggung jawab kegiatan yang terkait untuk mempercepat proses tindak lanjut.

IK 11. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Setditjen PKRL

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPKRL merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern

Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA. 2023 yang ditampilkan pada LHP atas kepatuhan}}{\text{Realisasi riil Tahun 2023}} \times 100\%$$

Jika tidak ada temuan keuangan dalam LHP BPK maka capaian adalah sama dengan target sehingga diperoleh persentase capaian 100%.

Berikut capaian IK Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Setditjen PKRL Pada Tahun 2024.

**Tabel 30 Capaian IK Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK
Lingkup Setditjen PKRL Tahun 2024**

SK – 1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL					
IK – 11				Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Setditjen PKRL					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
100	100	100	100	100	100	100	-	-	-

A. Capaian IK Tahun 2024

Capaian IKU ini diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang diterbitkan pada periode Triwulan IV Tahun 2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 dengan tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan yang berstatus tuntas pada Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti dengan status tuntas lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL pada periode tersebut sebesar 100% (44 dari 44 rekomendasi telah ditindaklanjuti).

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya

Capaian indikator penyelesaian temuan LHK BPK Lingkup Setditjen PKRL pada Tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya yakni sebanyak 100%. Tahun 2020-2023 tidak terdapat temuan BPK pada Satker Setditjen PKRL sehingga dihitung tuntas.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL Tahun 2020-2024

Target Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan tidak terdapat di Renstra DJPKRL Tahun 2020-2024.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki capaian yang dapat dibandingkan dengan Standar Nasional namun Capaian Kinerja IK ini dapat dibandingkan dengan Unit Kerja Level 2 lainnya dalam lingkup DJPKRL seperti Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, Direktorat Penataan Ruang Laut, Direktorat Konservasi dan Biota Perairan, serta Direktorat Jasa Kelautan. Perbandingan Capaian Kinerja indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 31. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK

Unit Kerja	Saldo Temuan (Rp)	Tindak Lanjut (Rp)	(%)	Sisa Temuan (Rp)	(%)	Capaian Kinerja (%)
Setditjen PKRL	103.875.030	103.875.030	100	0	0	100
Dit. PRL	14.515.600	14.515.600	100	0	0	100
Dit. P4K	0	0	0	0	0	100
Dit. Jasa Kelautan	17.761.000	17.761.000	100	0	0	100
Dit. KEBP	0	0	0	0	0	100

Berdasarkan perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK dapat disimpulkan bahwa capaian Setditjen PKRL sama dengan Unit Kerja Level 2 lainnya lingkup DJPKRL yakni sebanyak 100%.

- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
Keberhasilan capaian ini didukung unit kerja dengan menjalankan kegiatan dan administrasi kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya khususnya pada Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaannya melibatkan penanggung jawab kegiatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sekretariat DJPKRL.
- G. Kegiatan Pendukung pada Tahun 2024
 1. Rapat penginputan data Tindak Lanjut LHP BPK RI di googlespreadsheet dan Data Tindak Lanjut Kerugian Negara;
 2. Pemutakhiran Dokumen Tindak Lanjut atas LHP BPK Lingkup Ditjen PKRL;
 3. Pembahasan penyusunan e-logbook pemantauan pemanfaatan hasil sedimentasi di Laut;
 4. Penyampaian progress Tindak Lanjut LHP BPK pada DKP Kab Buton
 5. Tindak Lanjut LHP BPK RI Lingkup Ditjen PKRL Periode 2009-2023;
 6. Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI sd Semester 2 Tahun 2024 pada KKP;
 7. Penagihan Tahap ke-2 atas Tindak Lanjut LHP BPK pada DKP Kab Buton;

8. Penyampaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK atas Temuan PDDT PNBPN 2020-2021 terkait Keg Pemanfaatan PPK;
9. Penyampaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK atas Temuan PDDT PNBPN 2020-2021 terkait OSS;
10. Usulan pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI;
11. Rapat progress Tindak Lanjut Rekomendasi BPK;
12. Pembahasan pemutakhiran data Tahun 2024;
13. Penginputan Data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan BPK RI di Google Spreadsheet dan Data Tindak Lanjut Kerugian Negara;
14. Undangan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI s.d Semester II Tahun 2024 pada KKP;
15. Undangan Pembahasan Penyelesaian Kerugian Negara s.d Semester I Tahun 2024 pada KKP;
16. Undangan Rapat Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal dan BPK RI pada DJPKRL Periode Triwulan IV Tahun 2024;
17. Undangan Rapat Lanjutan Per Eselon I TLRHP BPK RI Semester II Tahun 2024;
18. Rapat Tindak Lanjut BPK dan Tindak Lanjut Itjen tahunan.

H. Rencana Aksi Tahun 2025

Koordinasi dengan penanggung jawab untuk penyelesaian rekomendasi dan Rapat pertemuan untuk pemutakhiran data tindak lanjut rekomendasi BPK.

IK 12. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup DJPKRL

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa. Dalam suatu instansi pemerintah atau perusahaan swasta pengadaan barang/jasa sangat mempengaruhi proses jalannya suatu instansi swasta maupun pemerintah dan keberhasilan suatu perusahaan. Untuk mendapatkan suatu barang atau jasa hasil yang maksimal harus melalui pengadaan barang terlebih dahulu. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah pengganti Perpres 16 Tahun 2018 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah, merupakan upaya untuk membangun kembali landasan implementasi kebijakan pengadaan barang pemerintah sebagai untuk

meningkatkan efisiensi, semangat berkompetisi serta pemberdayaan masyarakat yang profesional.

Dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa diawali dengan pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan lingkup Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Melalui Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan Sebelum Tahun Anggaran 2021 berjalan.

Tujuan dilakukan pengukuran indikator ini adalah untuk menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) lingkup Eselon I. Penilaian dilakukan melalui metode:

1. *Desk evaluation*, penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
2. Permintaan keterangan, melakukan pemrintaan keterangan kepada pihak yang relevan untuk meyakinkan bukti-bukti pengukuran yang telah diperoleh.
3. Penilaian efektivitas, melakukan penilaian terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PBJ Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang telah disepakati.

Ruang lingkup penilaian terdiri dari:

1. Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis Unit Eselon I (bobot penilaian 10%)
2. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (bobot penilaian 15%);
3. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE (bobot penilaian 10%);
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (bobot penilaian 45%);
5. Laporan Penyelenggaraan PBJ (bobot penilaian 5%); dan
6. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I TW III s.d. TW III Tahun 2024 (bobot penilaian 15%).

Target indikator ini adalah 80. Waktu pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada Triwulan IV oleh Inspektorat Jenderal.

Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL Pada Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut

**Tabel 32 Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa
Lingkup DJPKRL Tahun 2024**

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL							
IK – 12		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup DJPKRL							
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	84,96	87,36	80,23	80	87,76	109,7	7,53	80	109,7

A. Capaian IK Tahun 2024

Berdasarkan hasil penilaian oleh tim penilai Inspektorat Jenderal KKP, Ditjen PKRL memperoleh Nilai Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa sebesar 87,76 yang telah melebihi target tahun 2024 (80). Nilai tersebut tercantum dalam Surat Inspektur Jenderal Nomor B.374/ITJ/HP.660/XII/2024, tanggal 23 Desember 2024 tentang Hasil Penilaian Efektivitas Pengawasan Pelaksanaan PBJ lingkup Direktorat Jenderal PKRL, di Prov. DKI Jakarta.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya
Capaian Indikator Kinerja pada tahun 2024 (87,76) lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2020-2023) karena karena pada tahun 2024 terjadi peningkatan nilai kesesuaian tahap pelaksanaan PBJ, dimana disebabkan berkurangnya kegiatan pengadaan tender yang terlambat.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL Tahun 2020-2024

Jika dibandingkan dengan target pada Renstra DJPKRL 2020-2024 sebesar 80 maka, capaian pada tahun 2024 sebesar 87,76 (109,7%) dimana hasil tersebut sudah melebihi target Renstra DJPKRL Tahun 2024.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan indikator ini dipengaruhi oleh peran masing-masing unit kerja yang terdapat kegiatan pengadaan barang/jasa. Penilaian Tingkat kepatuhan PBJ lingkup Ditjen PRL telah dilakukan meliputi kualitas perencanaan PBJ yaitu melalui siklus PBJ meliputi:

1. Perencanaan Pengadaan (Penyusunan Perencanaan Pengadaan; Identifikasi Kebutuhan; Penetapan Barang dan Jasa; Cara Pengadaan Barang/Jasa; Jadwal Pengadaan Barang/Jasa; Anggaran Pengadaan Barang/Jasa; Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa), Persiapan Pengadaan (Kaji Ulang dan Penetapan

Spesifikasi Teknis / KAK, Penetapan Spesifikasi Teknis / KAK, Penyusunan dan Penetapan HPS, Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak), Pelaksanaan Pengadaan (Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia (Tender/Seleksi), Pelaksanaan Kontrak Secara Umum, Pelaksanaan Pekerjaan), Serah Terima Pekerjaan (Pengajuan ke PPK untuk Serah Terima, Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh PPK, SerahTerima dari Penyedia ke PPK, Pengajuan Serah Terima dari PPK ke KPA, Pemeriksaan Administrasi, Serah Terima Pekerjaan dari PPK ke KPA)

2. Penggunaan teknologi informasi dalam PBJ melalui SPSE
 3. Kualitas pelaksanaan PBJ dan pemantauan dan tindak lanjut pelaksanaan PBJ melalui pemantauan secara berkala tiap bulan dan kunjungan lapangan pekerjaan.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan seluruh Satker Pusat dan UPT dalam pengumpulan bahan pelaksanaan PBJ sebagai data dukung penilaian IKU.
- F. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:
1. Rapat pembahasan usulan produk impor pada Direktorat P4K, BPSPL Pontianak, Setditjen PKRL.
 2. Rapat rencana metode pemilihan dan 5 lokasi calon penempatan MSU
 3. Rapat koordinasi PBJ Lautra
 4. Updating Pencatatan dan Penginputan PBJ Swakelola lingkup DJPKRL
 5. Rapat pemenuhan data dukung MSU untuk perpanjangan PSP untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan
 6. Rapat persiapan kunjungan lapangan calon lokasi penempatan MSU
 7. Reviu PAPBJ TW 2 oleh Itjen
 8. Bimbingan Teknis PBJ - LAUTRA di Bogor dengan peserta pokja pemilihan UKPBJ KKP, UKPBJ Bappenas, serta Satker Pengelola Anggaran PHLN LAUTRA
 9. Pengawasan oleh Itjen terkait Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa setiap triwulanan di lingkup Ditjen PKRL
 10. Pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP) lingkup Ditjen PKRL di Cirebon pada tanggal 23-24 Desember 2024

11. Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL oleh tim Inspektorat Jenderal KKP pada 2-6 Desember 2024

G. Rencana Aksi Tahun 2025

Pada Tahun 2025 akan dilaksanakan Pengawasan oleh Itjen terkait Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan I lingkup Ditjen PKRL.

IK 13. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPKRL

Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan BMN meliputi Penilaian, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur, Pemindahtanganan, Penjualan, Tukar Menukar, Hibah, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Inventarisasi, serta Pengawasan dan Pengendalian.

Dalam melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna mewujudkan Pengelolaan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Tertentu atau Kuasa Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Aset Berupa Barang Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah 75. Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN dilakukan oleh Inspektorat Jenderal secara tahunan pada Triwulan III dengan metode penilaian sebagai berikut:

1. *Desk evaluation*, penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
2. Permintaan keterangan, melakukan permintaan keterangan kepada pihak yang relevan untuk meyakinkan bukti-bukti pengukuran yang telah diperoleh
3. Penilaian efektivitas, melakukan penilaian terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan BMN Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang telah disepakati.

Penilaian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dengan aspek dan bobot penilaian sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (12,5%).
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan Triwulan III tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%).
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 (25%).
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 (25%)
5. Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (12,55%).

Tabel 33 Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPKRL Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL							
IK – 13		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPKRL							
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	71,5	81,5	85	80	100	120	15	80	120

A. Capaian IK Tahun 2024

Capaian indikator tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup DJPKRL tahun 2024 sebesar 100 jika, dibandingkan dengan targetnya yaitu sebesar 80 maka presentase capaiannya sebesar 120%. Capaian IKU ini diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan inspektorat Jenderal KKP yang diterbitkan pada periode Triwulan IV Tahun 2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 dengan tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan yang berstatus tuntas pada Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya

Capaian Kinerja Tahun 2024 (100) lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (tahun 2021-2023) karena pengelolaan BMN yang lebih tertib dan teratur.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL Tahun 2020-2024

Jika dibandingkan dengan target pada Renstra DJPKRL 2020-2024 sebesar 80 maka, capaian pada tahun 2024 sebesar 100 (120%) dimana hasil tersebut sudah melebihi target Renstra DJPKRL Tahun 2024.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

a. Kendala:

1. Terdapat BMN berupa tanah milik Setditjen PKRL yang belum bersertifikat;
2. Terdapat BMN yang belum diajukan PSP (Penetapan Status Penggunaan);
3. Masih rendahnya pengamanan aset berupa tanah di PPKT
4. Belum disepakatinya perjanjian penggunaan BMN antara KKP dengan Sekretariat Regional CTI-CFF.

b. Solusi:

1. Permohonan sertipikat Hak Pakai, sebelumnya bermohon Hak Pengelolaan), sudah ada konsep SK, melalui migrasi, terkendala di surat ukur dan telah berkoordinasi ke Pusdatin Kementerian ATR/BPN sesi pengukuran (peta bidang kewenangan kanwil).
2. Agar Sekretariat meningkatkan pengamanan aset melalui pembuatan pagar dan papan plang di tanah PPKT
3. Mempercepat penandatanganan perjanjian penggunaan BMN gedung Sekretariat Regional CTI-CFF.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melaksanakan pertemuan secara hybrid (offline dan online) serta melibatkan PKPB dan KPB unit kerja di lingkup DJPKRL.

F. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni

1. Rapat Penyusunan ALK dan CALBMN;
2. Koordinasi Finalisasi Penyusunan Naskah Perjanjian dan BAST Penggunaan Gedung Regional Sekretariat CTI-CFF Manado;
3. Pembahasan Lanjutan atas Hibah Lahan PT. Seax Indonesia Pratama;

4. Koordinasi Pengelolaan BMN melalui Aplikasi SIMAN BMN lingkup Satker Pusat Sekretariat DJPKRL;
5. Pembahasan koordinasi tindak lanjut sertifikasi Hak Pakai Bidang Tanah di Pulau-pulau kecil/terluar (PPK/T);
6. Rekonsiliasi Internal BMN bulan Oktober lingkup Satker Pusat DJPKRL;
7. Pelaksanaan PSP (Penetapan Status Penggunaan) BMN;
8. Persiapan Reviu Stock Opname Persediaan Satker Lingkup Ditjen PKTL.

G. Rencana Aksi Tahun 2025

1. Pembahasan Naskah Perjanjian dan BAST Penggunaan Gedung Sekretariat regional CTI-CFF di Manado;
2. Pelaksanaan PSP (Penetapan Status Penggunaan) BMN;
3. Penghapusan BMN yang kondisinya rusak berat;
4. Penginputan BMN BMKT ke Aplikasi SIMAN.

IK 14. Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL

Rencana Kerja Pemerintah mencakup 7 Prioritas Nasional, yaitu: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan (7) Meningkatkan Stabilitas Polhukhanmak dan Transformasi Pelayanan Publik. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut berkontribusi pada Prioritas Nasional 1, 2, 4, dan 6.

Tantangan pelaksanaan kegiatan prioritas saat ini adalah memastikan intervensi pemerintah/belanja pemerintah memberikan manfaat bagi pembangunan *Delivered not just sent* dan bagaimana hasil pemantauan ini memberikan input terhadap rencana pembangunan. Dalam hal ini diperlukan upaya monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk:

1. Memastikan rencana dijalankan dengan baik dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan
2. Memastikan/mengawal pencapaian sasaran pembangunan

3. Mengawal pelaksanaan intervensi pemerintah dalam kerangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan
4. Hasil monitoring (pemantauan), pengendalian, dan evaluasi terinternalisasi dalam rencana pembangunan.

Sebagian besar kegiatan prioritas di DJPKRL meliputi Bantuan Pemerintah. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasal 18, bahwa Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan selama 2 (dua) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan 1 (satu) tahun berikutnya. Monitoring dan Evaluasi tersebut dilaksanakan paling sedikit terhadap:

1. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
3. pemanfaatan Bantuan Pemerintah; dan
4. kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah.

Kaidah dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi tersebut diatur juga dalam Petunjuk Teknis masing-masing jenis Bantuan Pemerintah. Dokumen pengelolaan bantuan pemerintah lingkup DJPKRL, meliputi:

1. Keputusan Direktur Jenderal tentang Tim Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Bantuan Pemerintah.
2. Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah.
3. Monitoring Bantuan Pemerintah.
4. Kertas Kerja Evaluasi Efektivitas Bantuan Pemerintah.
5. Laporan Evaluasi Efektivitas Bantuan Pemerintah.

Formula Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah dokumen yang telah disusun}}{\text{jumlah dokumen yang ditentukan}} \times 100\%$$

Secara umum, terdapat 13 kelompok Bantuan Pemerintah lingkup DJPKRL yang meliputi

1. KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi) ditargetkan diberikan kepada 20 Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi
2. Wisata Bahari & BMKT ditargetkan di 10 Kawasan
3. Pengelolaan Biofarmakologi ditargetkan sebanyak 2 Kawasan
4. Rehabilitasi Mangrove memiliki target seluas di 100 Hektare
5. PRPEP (Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir) memiliki target sebanyak 4 Kawasan

6. Pengelolaan Sampah (Desa Pesisir Bersih) ditargetkan di 15 Kawasan
7. Penanaman Vegetasi Pantai memiliki target seluas di 10 Hektare.
8. PKPT (Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh) ditargetkan di 2 Kawasan
9. Dermaga Apung/ Tambat Labuh ditargetkan sebanyak 2 Unit
10. Sarana/Prasarana di Wilayah Pulau-Pulau Kecil terdiri dari Bantuan Ekonomi Produktif sebanyak 55 paket dan Bantuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) 1 paket.
11. Sarana / Prasarana Pergaraman dengan target 1 Gudang Garam Nasional, 2 unit Washing Plant, 75 hektare Integrasi Lahan Garam, 2 unit Rumah Garam, 25 unit Gudang Garam Rakyat.
12. Pengolahan Produk Turunan Mangrove ditarget pada 4 Lokasi.
13. Sarana/Prasana Pengembangan Kawasan Karbon Biru di 1 Kawasan.

Capaian dan perkembangan IK ini sebagai berikut

Tabel 34 Capaian IK Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL pada Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 14		Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL							
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	100	100	100	100	100	-	-	-

A. Capaian IK Tahun 2024

Capaian IKU ini pada tahun 2023 telah memenuhi target yakni pemenuhan data Bantuan Pemerintah di Lingkup DJPKRL sebesar 100%. Adapun dokumen bantuan pemerintah yang telah dipenuhi pada tahun 2023 adalah

1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 17A Tahun 2023 tentang Tim Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2023.
2. Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Tahun 2025 di lingkup DJPKRL yang meliputi
 - a. Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025;

- b. Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pembangunan Dermaga Apung atau Tambat Labuh di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025;
 - c. Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025;
 - d. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2025;
 - e. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Usaha Pergaraman Tahun 2025;
 - f. Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah Desa Pesisir Bersih di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024.
3. Hasil monitoring bantuan pemerintah tahun 2023 yang telah dilakukan pada Bulan Januari 2023 dan monitoring bantuan pemerintah tahun 2024 yang telah dilakukan setiap triwulan yang dapat diakses pada tautan bit.ly/BPDJPKRL2024. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan penyaluran bantuan pemerintah yakni bantuan konservasi kepada 21 kelompok masyarakat, sarana/prasarana desa wisata bahari di 16 kawasan, sarana/prasarana biofarmakologi di 2 kawasan, sarana/prasarana pergaraman sebanyak 54 unit, penyulaman mangrove di 12 kawasan seluas 223,78 hektare, bantuan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) di 4 kawasan, sarana/prasarana Pembangunan dan Pengadaan Prasarana Desa Pesisir Bersih di 15 kawasan, penanaman vegetasi pantai di 2 kawasan seluas 10 hektare, Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di 2 kawasan, Sarana/Prasarana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebanyak 56 paket, pembangunan dermaga apung / tambat labuh di 3 kawasan dan perencanaan 1 kawasan, Sarana Produk Turunan Mangrove di 12 kawasan dan Pengembangan Kawasan Karbon Biru 1 kawasan.
4. Kertas Kerja Evaluasi Efektivitas Bantuan Pemerintah untuk 18 jenis bantuan di lingkup DJPKRL dapat diakses pada tautan bit.ly/BPDJPRL2023

5. Laporan Evaluasi Efektivitas Bantuan Pemerintah yang dapat diakses pada tautan bit.ly/BPDJPKRL2023.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya
Capaian Kinerja tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya (2022-2023). Target IK ini pada tahun 2022-2024 sama, dimana pemenuhan data ini merupakan kegiatan rutin dan kewajiban pelaksanaan bantuan pemerintah.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL Tahun 2020-2024
IK ini merupakan Indikator baru pada Tahun 2021 dan tidak terdapat di Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
Dalam rangka pencapaian IK ini telah dilakukan beberapa kegiatan seperti perencanaan kegiatan (penetapan target dan penyusunan petunjuk teknis bantuan pemerintah), pemantuan kegiatan, serta pelaporan. Namun demikian, terdapat kendala pada pelaporan data Bantuan Pemerintah yakni keterlambatan pengesahan BAST dan pengisian data detail jenis bantuan pemerintah. Ke depan, perlu disampaikan surat resmi permohonan data dan kekurangan data kepada unit kerja teknis yang menyalurkan bantuan terkait.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi Penggunaan sumberdaya pada SDM dan anggaran bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL dan pertemuan secara hybrid (*offline* dan *online*).
- F. Kegiatan Pendukung pada Tahun 2024
Pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung pemenuhan dokumen Bantuan Pemerintah, yakni
 1. Rapat Rencana Aksi Bantuan Pemerintah di Lingkup DJPKRL Tahun 2024;
 2. Rapat Pemantauan BP Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III Tahun 2024;
 3. Sosialisasi Bantuan Evaluasi Efektivitas Bantuan Pemerintah di lingkup DJPKRL Tahun Anggaran 2024;
 4. Kunjungan Lapangan Verifikasi BPJS ke Bantuan Pemerintah yang telah diberikan di Kab. Indramayu;
 5. Pelaksanaan Evaluasi Efektivitas Bantuan Pemerintah di lingkup DJPKRL Tahun Anggaran 2024 serta pemantauan Bantuan tahun 2020-2023;

- a. Bantuan Penanaman Vegetasi Pantai di Kabupaten Aceh Besar;
 - b. Penyulaman Mangrove di Kabupaten Karawang, Gresik dan Banyuwangi;
 - c. Bantuan Ekonomi Produktif di Kabupaten Karawang, Purworejo, dan Bima;
 - d. Bantuan Sarana Prasarana Produk Turunan Mangrove di Kabupten Banyuwangi;
 - e. Bantuan Dermaga Apung/Tambat Labuh di Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - f. Bantuan PKPT di Kabupaten Minahasa Utara;
 - g. Bantuan PRPEP di Kabupten Banyuwangi;
 - h. Bantuan Sarana Prasarana Desa Pesisir Bersih di Kota Palu;
 - i. Bantuan Stimulan MHA di Kabupaten Wakatobi dan Buton Selatan;
 - j. Bantuan Sarana Desa Wisata Bahari di Kab. Karawang;
 - k. Bantuan Biofarmakologi di Kabupaten Kulonprogo;
 - l. Bantuan Sarana Pergaraman (Gudang Garam Rakyat, Tunnel Garam, dan Integrasi Pergaraman) di Kabupaten Gresik, Purworejo, dan Bima;
 - m. Bantuan konservasi di Kabupaten Bantul, Buleleng, Blitar, Kepulauan Mentawai, Tanjung Jabung Barat, Ogan Komering Ilir, Kutai Kartanegara, Kota Singkawang, Bengkayang, Polewali Mandar, Kota Palopo, Bone Bolango, Buru, Fak-Fak, Halmahera Tengah, Lombok Utara, Sumba Timur, Maluku Tengah, Pariaman, dan Kepulauan Anambas.
3. Rapat penyusunan petunjuk teknis BP di lingkup DJPKRL.
 4. Pemantauan perkembangan penyaluran bantuan pemerintah di lingkup DJPKRL tahun 2023.
- G. Rencana Aksi Tahun 2025
1. Pemantauan Bantuan Pemerintah di Lingkup DJPKRL Tahun 2024
 2. Penetapan petunjuk teknis bantuan pemerintah tahun 2025.

IK 15. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Produk Hukum adalah setiap peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan). Rancangan produk hukum meliputi:

- a. rancangan peraturan perundang-undangan; dan
- b. rancangan instrumen hukum di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut.

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang menjadi prakarsa Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terdiri atas 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan 3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Teknik Menghitung:

Capaian diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau penyampaian penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri) hingga 31 Desember 2024, dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Formula: $\frac{a}{b} \times 100\%$

Keterangan:

- a. Jumlah R. Permen KP dan R. Kepmen KP yang diselesaikan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.
- b. Jumlah R. Permen KP dan R. Kepmen KP yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan KKP Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2024, tercantum bahwa Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terdiri atas 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri dan 3 (tiga) Rancangan Keputusan Menteri, yang meliputi:

- 1) Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;
- 2) Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2016 tentang Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan;
- 3) Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

- 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;
- 4) Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - 5) Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Berkelanjutan Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - 6) Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peta Jalan Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - 7) Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Kawasan Konservasi; dan
 - 8) Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Status Perlindungan Jenis Ikan.

Tabel 35 Capaian IK Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada Tahun 2024

SK – 1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL					
IK – 15				Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	70	100	100	100	100	-	-	-

A. Capaian IK Tahun 2024

Pada tahun 2024 telah ditetapkan dan diundangkannya produk hukum berupa peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan/Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut meliputi:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendanaan Program Sektor Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan;

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kategori Kawasan Kosnervasi untuk Pariwisata Alam Perairan
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2024;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Infrastruktur Pengelolaan Kawasan Konservasi
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Kawasan Konservasi (kumulatif terbuka) yaitu:
 - a. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi di Perairan di Laut Sulawesi;
 - b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Muara Badak dan Marangkayu Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur,
 - c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Betahwalang Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Salahnama Provinsi Sumatera Utara;
 - e. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pasi Gusung Provinsi Sulawesi Selatan;
 - f. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Panikiang Provinsi Sulawesi Selatan;
 - g. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kayuadi Provinsi Sulawesi Selatan;
 - h. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Sawo-Lahewa Provinsi Sumatera Utara;
 - i. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Laut Sulawesi;

- j. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Pini Provinsi Sumatera Utara;
 - k. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Sawo-Lahewa Provinsi Sumatera Utara;
 - l. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut;
 - m. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Bintan II Provinsi Kepulauan Riau;
 - n. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 83 Tahun 2024 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Belida Jawa (*Notopterus notopterus*);
 10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 Tahun 2024 tentang Peninjauan Kembali Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar;
 11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 Tahun 2024 tentang Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan;
 12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut
 13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;
 14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

- Nomor 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tim Uji Tuntas Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Selain itu, terdapat beberapa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait tim penyusunan peraturan perundang-undangan antarkementerian yakni panitia antarkementerian penyusunan rancangan Undang-Undang maupun Peraturan Presiden yang tidak termasuk dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, diantaranya:

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2024 tentang Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum Dalam Apendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora;
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Dalam Negeri Material Hasil Sedimentasi di Laut Berupa Pasir Laut Tahun 2024;
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi di Laut untuk Ekspor;
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Tim Pendukung Penyelenggaraan The Global Dialogue on Sustainable Ocean Development Tahun 2024;
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Komite Pengarah Nasional, Komite Teknis, dan Pengelola Oceans for Prosperity Project – Lautan Sejahtera;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Panitia Antarkementerian Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Peraturan Pedalaman Indonesia;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Panitia Antarkementerian Penyusun Rancangan Peraturan

- Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Situs Warisan Dunia Geopark Belitong;
10. Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Panitia Antarkementerian Penyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera;
 11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Panitia Antarkementerian Penyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Aru;
 12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Panitia Antarkementerian Penyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Halmahera;
 13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Panitia Antarkementerian Penyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Seram
 14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Panitia Antarkementerian Penyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Negara Tuan Rumah antara Pemerintah Republik Indonesia dan Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan tentang Ketuanrumahan dan Pemberian Keistimewaan dan Kekebalan (Host Country Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Regional Secretariat of the Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security on Hosting and Granting of Privileges and Immunities)
 15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Panitia Antarkementerian Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 49/SJ.4/TU.210/I/2025, hal Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2024, tanggal 4 Januari 2025 disampaikan bahwa dari 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang diusulkan yang telah selesai sejumlah 5 (lima)

rancangan Peraturan Menteri. Selain itu, dari 3 (tiga) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang diusulkan terdapat 3 (tiga) yang telah selesai, sehingga sampai dengan semester II Tahun 2024 telah berhasil diselesaikan peraturan perundang-undangan dimaksud dengan persentase sebesar 100% (seratus persen).

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya
IK ini merupakan indikator baru pada tahun 2022. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut telah tercapai sesuai dengan targetnya pada tahun 2022-2024. Penyelesaian regulasi dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan pada Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut telah tercapai sesuai dengan targetnya pada tahun terkait.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL Tahun 2020-2024
Target dan Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Ruang Laut tidak terdapat di Renstra DJPKRL Tahun 2020-2024 yakni berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
Keberhasilan pencapaian IK ini didukung dengan:
 - 1. melakukan pembahasan rancangan peraturan menteri dan keputusan menteri secara intensif; dan
 - 2. melakukan koordinasi dengan K/L terkait, pemangku kepentingan dalam percepatan penyusunan rancangan peraturan menteri dan keputusan menteri.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan anggaran telah dilakukan dalam kegiatan penyusunan/pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut. Kegiatan tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut melibatkan ASN DJPKRL, ASN lintas eselon I lain, dan/atau pakar. Pertemuan/pembahasan rancangan produk dilakukan melalui daring (*virtual zoom meeting*) atau luring.

F. Kegiatan Pendukung pada Tahun 2024

1. Menghadiri Pembahasan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tim Uji Tuntas;
2. Menghadiri Pembahasan Revisi Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022;
3. Menghadiri Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Kawasan Konservasi;
4. Menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
5. Menghadiri Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Hak Atas Tanah pada Wilayah Perairan;
6. Menghadiri Konsultasi Publik Pengusulan Penetapan Kembali Status Perlindungan Biota Perairan yang Tercantum dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.106 Tahun 2018;
7. Menghadiri Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Desa Pesisir Bersih;
8. Menghadiri Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Batas Perairan Pedalaman dalam Perairan Kepulauan;
9. Menghadiri Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan;
10. Menghadiri Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi;
11. Menghadiri Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Hak Atas Tanah pada Wilayah Perairan;
12. Menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Pendanaan Berkelanjutan Sektor Kelautan dan Perikanan dan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kategori Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Perairan;
13. Menghadiri Pembahasan Deliniasi dan Substansi Teknis Rancangan Peraturan Presiden Rancana Zonasi KSNT Taman Bumi Belitung;
14. Menghadiri Pembahasan Pengelolaan Jenis-Jenis Tertentu sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024;
15. Menghadiri Konsultasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi;
16. Menyelenggarakan Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi.

17. Menghadiri Rapat Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara;
 18. Menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan terkait Ranperpres tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, Pembahasan Keterlanjuran Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan;
 19. Menghadiri Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tim Koordinasi Implementasi Aksi Ekosistem Laut di Perairan Arafura dan Timor (Arafura and Timor Seas Ecosystem Action);
 20. Menghadiri Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara.
- G. Rencana Aksi Tahun 2025
- Pada tahun 2025 akan dilakukan pembahasan perundang-undangan terutama yang termasuk ke dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Ruang Laut pada Tahun 2025.

IK 16. Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Sama halnya dengan peraturan perundang-undangan, instrumen hukum merupakan bagian dari pembentukan produk hukum. Penyelesaian Instrumen hukum merupakan rancangan instrumen hukum yang diajukan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut antara lain berupa Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal, surat edaran, kegiatan di bidang bantuan hukum, dan *legal opinion*.

Teknik Menghitung:

Menginventarisasi dan memproses penyelesaian dokumen instrumen hukum di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut yang diajukan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan/atau penetapan

**Tabel 36 Capaian IK Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut**

SK – 1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL					
IK – 16				Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	100	100	100	100	100	0	-	-

- A. **Capaian IK Tahun 2024**
 Capaian IK Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024 telah terbit 80 (delapan puluh) Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebagaimana terlampir.
- B. **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya**
 Capaian pada Tahun 2022-2024 telah terpenuhi 100% dari targetnya karena semua usulan instrumen hukum yang masuk dari penanggung jawab akan diproses sampai dengan penetapan instrumen hukum tersebut.
- C. **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL Tahun 2020-2024**
 Target dan Indikator Kinerja penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut di Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang diajukan penyelesaiannya tidak terdapat di Renstra DJPKRL Tahun 2020-2024 yakni berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.
- D. **Analisis Keberhasilan/Kegagalan**
 Pembahasan penyusunan rancangan instrumen hukum dilakukan secara intensif. Selain itu, juga dilakukan koordinasi dengan K/L terkait, pemangku kepentingan dalam percepatan penyelesaian rancangan instrumen hukum. Tidak ada kendala dalam pencapaian IKU ini.
- E. **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**
 Efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan anggaran telah dilakukan dalam kegiatan penyusunan/pembahasan produk hukum di

bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut. Kegiatan tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut melibatkan ASN DJPRL, ASN lintas eselon I lain, dan/atau pakar. Pertemuan/pembahasan rancangan produk dilakukan melalui daring (*virtual zoom meeting*) atau luring.

F. Kegiatan Pendukung pada Tahun 2024

1. Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
2. Pendampingan Saksi Ahli pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat terkait dengan adanya laporan dugaan kecurangan oknum pegawai pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Kota Pontianak terkait Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJILN) Tahun 2021-2022;
3. Menghadiri pembahasan muatan Kepdirjen tentang Pedoman Teknis Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah;
4. Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Pansus RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
5. Menghadiri pembahasan Rancangan Keputusan Dirjen PKRL tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kuota Ekspor Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES;
6. Menghadiri pembahasan NSPK, materi revisi Keputusan Direktur Jenderal PRL Tahun 2022 dan rewiu implementasi daya dukung pemanfaatan kawasan konservasi;
7. Pendampingan evaluasi dokumen permohonan izin pemanfaatan pasir laut;
8. Menghadiri pembahasan muatan Keputusan Dirjen tentang Pedoman Teknis Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Zonasi Kawasan Antarwilyah;
9. Menghadiri penyusunan petunjuk teknis pendampingan masyarakat pemanfaatan kawasan konservasi;
10. Menghadiri kegiatan pendalaman materi jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan;
11. Menghadiri pertemuan tindak lanjut penyusunan NSPK Pemanfaatan Kawasan Konservasi terkait Pembahasan Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 43 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Kegiatan Penelitian,

Pendidikan dan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Nasional;

12. Menghadiri pertemuan tindak lanjut penyusunan NSPK Pemanfaatan Kawasan Konservasi terkait Pembahasan Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 35 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 91039 Aktivitas Kawasan Alam Lainnya;
13. Menghadiri Pembahasan Naskah Penjelasan Pengesahan Perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdiction;
14. Menghadiri Pembahasan Revisi Kepdirjen PRL Nomor 35 Tahun 2022;
15. Menghadiri Undangan Diseminasi Advokasi Hukum tema “Mitigasi Permasalahan Hukum terkait Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan”;
16. Menghadiri Konsinyering Persiapan Bahan Sidang Marine Environment Protection Committee 82 Session;
17. Pembahasan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tentang Petunjuk Teknis Survei dan Pengambilan Sampel Pesisir Hasil Sedimentasi di Laut;
18. Pembahasan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terkait Kegiatan Tim Kejra Restorasi Tahun 2025;
19. Mendampingi Permintaan Keterangan dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengelolaan Wilayah Pulau Bunhu sebagai Pulau Kecil di Sektor Pertambangan Batu Bara;
20. Menghadiri Pembahasan International Legally Binding Instrument on Plastic Pollution Including in The Marine Environmet;
21. Finalisasi Petunjuk Teknis Evaluasi Pendayagunaan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat;
22. Pembahasan Revisi Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 34 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Kegiatan, Penelitian, Pendidikan dan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Nasional dan Penetapan Penghitungan Daya Dukung Kegiatan Pemanfaatan di Kawasan Konservasi;
23. Menghadiri Focus Group Discussion Alur Pelayaran di Zona Inti Kawasan Konservasi;
24. Pembahasan Usulan SKK Migas terkait Perhitungan Luasan dan Besaran Fasilitas Migas;

25. Rapat Pembahasan Konsepsi Pengaturan Konservasi Sumber Daya Genetik dan Konservasi di Areal Preservasi.

G. Rencana Tahun 2025

Pada tahun 2025 akan dilakukan pembahasan dan penetapan instrumen hukum di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut.

IK 17. Informasi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Dikelola dan Dipublikasikan

Informasi DJPKRL merupakan konten informasi mengenai Pengelolaan Kelautan dan ruang laut yang telah diproduksi, dikelola dan dipublikasikan setiap bulan, yang disampaikan melalui berbagai saluran seperti media sosial, media online/media dalam jaringan, media massa (elektronik dan cetak) serta acara/event langsung seperti campaign, pameran, konferensi dan pertunjukan. IK ini bertujuan untuk memberikan informasi bidang PKRL melalui saluran media sosial, media online/media dalam jaringan, media massa (elektronik dan cetak) serta acara/event langsung seperti *campaign*, pameran, konferensi dan pertunjukan, untuk memberikan citra positif DJPKRL.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Informasi Ditjen PKRL yang dikelola dan dipublikasikan pada Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 37 Capaian IK Informasi DJPKRL yang Dikelola dan Dipublikasikan pada Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 17		Informasi DJPKRL yang Dikelola dan Dipublikasikan							
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
3.810	5.673	2.560	2.120	2.160	2.830	120	710	-	-

A. Capaian IK Tahun 2024

Pada Tahun 2024 telah tercapai 2.830 informasi dari target 2.160 informasi, capaian ini merupakan akumulasi dari bulan Januari sampai Desember 2024. Hasil capaian Indikator Kinerja Informasi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang dikelola dan dipublikasikan tersebut dipublikasikan melalui media massa, website, dan media sosial, dengan rincian sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut

Tabel 38 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Informasi PKRL yang Dikelola dan Dipublikasikan Tahun 2024

BULAN	MEDIA MASSA	WEBSITE	MEDSOS	TOTAL INFORMASI
Januari	84	34	38	156
Februari	93	31	39	163
Maret	213	22	90	325
TRIWULAN 1	390	87	167	644
April	122	27	99	248
Mei	180	29	114	323
Juni	63	54	113	230
TRIWULAN 2	365	110	326	801
Juli	70	31	115	216
Agustus	83	41	102	226
September	31	41	84	156
TRIWULAN 3	184	113	301	598
Oktober	170	34	139	343
November	47	37	130	214
Desember	57	35	138	230
TRIWULAN 4	274	106	407	787
TOTAL 2024	1213	416	1201	2830

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya
 Capaian pada Tahun 2024 (2.830 informasi) lebih besar dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2022-2023 tetapi lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2020-2021. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2024 tim Humas Ditjen PKRL memproduksi siaran pers dan publikasi informasi PKRL melalui media massa, website, dan media sosial lebih banyak, dengan rincian pada tabel berikut

Tabel 39 Perbandingan Capaian Jumlah Informasi PKRL yang Dikelola dan Dipublikasikan

Tahun	MEDIA MASSA	WEBSITE	MEDSOS	JUMLAH
2020	1.745	808	1.257	3.810
2021	3.736	595	1.342	5.673
2022	1.015	404	1.141	2.506
2023	989	354	777	2.120
2024	1.213	416	1.201	2.830

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target dan indikator kinerja Informasi PKRL yang Dikelola dan Dipublikasikan pada Renstra DJPKRL Tahun 2020-2024.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan: Tercapainya target jumlah informasi PKRL yang dipublikasikan pada Tahun 2024 didukung oleh koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan seluruh unit kerja di lingkup Ditjen PKRL khususnya dalam memproduksi konten informasi pengelolaan ruang laut

b. Kendala: tidak ada kendala khusus dalam pencapaian kinerja ini.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL.

F. Kegiatan Pendukung pada Tahun 2024

Kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian IKU Informasi PRL yang Dikelola dan Dipublikasikan pada Tahun 2024 meliputi

1. Penerbitan 80 siaran pers menghasilkan 2.830 informasi, Publikasi informasi PKRL melalui media massa, medsos dan website;
2. Monitoring media publikasi informasi PKRL;
3. Produksi video Neptune TV tentang pengelolaan sampah plastik di kawasan konservasi di wilayah Banda Neira Kab. Maluku Tengah,
4. Dokumentasi dan liputan kegiatan The 6th International Marine Spatial Planning (MSP) Forum di Bali, Soft Launching Pilot Project Pengembangan Kawasan Berbasis Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut secara Berkelanjutan di Demak, Kuliah Umum Sedditjen di Kampus Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Kuliah Umum Sedditjen di Kampus Universitas Diponegoro, Semarang, Kegiatan Rateknas di Bali, Kegiatan Makan Bergizi Gratis dalam rangka HUT KKP di Kepulauan Seribu, Hibah Lahan di Batam, Kegiatan One Spacial Palning Policy di Kementrian ATR/BPN, Kegiatan ICSCR di Manado
5. Konferensi pers Capaian DJPKRL, Kunjungan kerja Menteri KP dan Dirjen PKRL di Indramayu (PUGaR).

G. Rencana Aksi Tahun 2025

Pada tahun 2025 akan dilakukan:

1. Menjalin kerja sama mitra (media partnership) dalam mendukung publikasi informasi pembangunan PKRL

2. Menyelenggarakan orientasi kehumasan guna meningkatkan kompetensi seluruh pelaksana kehumasan dalam pelaksanaan strategi komunikasi pengelolaan ruang laut akan menyelenggarakan kegiatan orientasi kehumasan.
3. Memaksimalkan penerbitan siaran pers dan mempublikasikannya.

IK 18. Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya layanan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Setiap permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat harus ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang didukung oleh petugas informasi publik sebagai bentuk layanan informasi publik yang prima.

Capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti. Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti merupakan seluruh permohonan informasi publik yang diterima ditindaklanjuti dengan tanggapan penyelesaian sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 40 Capaian IK Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti pada Tahun 2024

SK – 1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL					
IK – 18				Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti (%)					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	-	100	100	100	-	-	-

A. Capaian IK Tahun 2024

Pada Triwulan IV Tahun 2024 telah tercapai 100% Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti dari target 100%. Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti tersebut ditindaklanjuti melalui tanggapan penyelesaian dalam waktu 10 hari kerja. Jika ada pertimbangan lebih lanjut ditambah 7 hari kerja sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jumlah permohonan informasi yang masuk melalui aplikasi e-PPID sebanyak 35 permohonan dan seluruhnya berstatus telah ditindaklanjuti. Adapun permohonan informasi yang masuk sebagaimana terlampir.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya
Capaian IK Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena IK Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti merupakan IK baru pada tahun 2024.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

- a. Keberhasilan: tercapainya target persentase permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti pada Triwulan IV Tahun 2024 didukung oleh para petugas pelayanan informasi publik lingkup Ditjen PKRL yang selalu koordinasi dan komunikasi secara aktif dan intensif dalam menindaklanjuti permohonan informasi publik melalui aplikasi e-ppid.
- b. Kendala: Situs web PPID yang masih dalam proses pengembangan yaitu belum tersedianya fitur untuk pengunggahan kelengkapan persyaratan permohonan informasi publik
- c. Solusi: petugas layanan informasi publik merespon pada aplikasi admin PPID untuk mengarahkan pemohon informasi publik untuk

mengunggah kelengkapan persyaratan pada pranala yang telah disediakan oleh PPID KKP terlebih dahulu (https://bit.ly/Upload_Dokumen_Permohonan_Informasi2024).

- D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Terdapat efisiensi sumber daya manusia karena pelaksanaannya sudah berbasis sistem informasi yang melibatkan petugas pelayanan informasi publik lingkup Ditjen PKRL mulai dari unit kerja Eselon II hingga UPT.
- E. Kegiatan Pendukung
Kegiatan pendukung yang telah dilakukan pada Triwulan IV adalah pelayanan informasi publik melalui aplikasi e-ppid.
- F. Rencana Aksi Tahun 2025
Melakukan pelayanan informasi publik.

IK 19. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran.

Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 6 komponen indikator yaitu:

- a. Sarana dan Prasarana
- b. Kualitas Informasi
- c. Jenis Informasi
- d. Komitmen Organisasi
- e. Inovasi dan Strategi
- f. Digitalisasi.

Tabel 41 Capaian IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

SK – 1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL						
IK – 19				Nilai Keterbukaan Informasi Publik						
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	-	-	-	90	100	100	-	-	-	

A. Capaian IK Tahun 2024

Berdasarkan hasil penilaian SAQ monev KIP KKP oleh tim penilai KKP, DJPKRL memperoleh nilai 100. Sesuai dengan ketentuan dan pedoman penilaian, rentang nilai monev KIP sebesar 90 – 100 termasuk kategori informatif. Dengan demikian Ditjen PKRL telah berpredikat informatif dalam keterbukaan informasi publik. Hasil capaian tersebut juga melebihi target capaian yaitu nilai 90.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya

Capaian IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik merupakan IK baru pada tahun 2024.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

- a. Analisis Keberhasilan: Faktor keberhasilan dalam pelaksanaan IK ini yaitu tercapainya predikat informatif dengan memenuhi 6 komponen indikator dalam aspek penilaian SAQ Monev KIP oleh tim penilai internal KKP diantaranya sarana dan prasarana, kualitas informasi, jenis informasi, komitmen organisasi, inovasi dan strategi, dan digitalisasi. Masing-masing komponen indikator mempunyai bobot penilaian masing-masing yang akan ditentukan oleh tim penilai internal KKP. Pada tahun 2024, 6 komponen indikator tersebut disimplifikasi oleh BHKLN KKP selaku tim penilai menjadi 5 komponen indikator yaitu mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan digitalisasi. Adapun untuk mendapatkan predikat informatif, total nilai yang diperoleh minimal sebesar 90.
- b. Kendala: Selama pengisian SAQ Monev KIP tidak ditemukan kendala
- c. Solusi: Setditjen PKRL menyelenggarakan pertemuan koordinasi yang mengundang seluruh unit kerja lingkup Ditjen PKRL dalam rangka persiapan monev KIP KKP.

- D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik yaitu melibatkan petugas pelayanan informasi publik lingkup Ditjen PKRL sesuai dengan SK Tim PPID Ditjen PKRL Tahun 2024.
- E. Kegiatan Pendukung pada Tahun 2024
Dalam rangka mendukung IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2024, telah dilakukan kegiatan sebagai berikut:
1. Internalisasi layanan informasi publik lingkup Ditjen PKRL;
 2. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan;
 4. Penerbitan SK Tim PPID Ditjen PKRL 2024;
 5. Penyusunan revisi SOP layanan informasi publik;
 6. Koordinasi dengan PPID KKP/BHKLN dalam rangka penguatan layanan informasi publik dan persiapan monev KIP;
 7. Pembahasan persiapan monev keterbukaan informasi publik dan coaching clinic pengisian SAQ monev keterbukaan informasi publik lingkup Ditjen PKRL;
 8. Pemenuhan kelengkapan fasilitas ruang layanan informasi publik seperti banner informasi, maklumat pelayanan, survei kepuasan masyarakat, dan alat bantu dengar bagi tuna rungu;
 9. Koordinasi pemenuhan data dukung monev keterbukaan informasi publik 2024 dengan Direktorat dan UPT lingkup Ditjen PKRL
 10. Pemutakhiran konten situs web PPID Ditjen PKRL;
 11. Pengisian SAQ Monev KIP;
 12. Permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti.
- F. Rencana Aksi Tahun 2025
1. Internalisasi layanan informasi publik lingkup Ditjen PKRL 2025;
 2. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan 2025;
 3. Rapat koordinasi triwulanan layanan informasi publik 2025;
 4. Penerbitan SK Tim PPID Ditjen PKRL 2025;
 5. Penyusunan revisi SOP layanan informasi publik 2025;
 6. Koordinasi dengan PPID KKP/BHKLN dalam rangka penguatan layanan informasi publik dan persiapan monev KIP;
 7. Pembahasan persiapan monev keterbukaan informasi publik dan coaching clinic pengisian SAQ monev keterbukaan informasi publik lingkup Ditjen PKRL 2025;

8. Pembaharuan kelengkapan fasilitas ruang layanan informasi publik seperti banner informasi, maklumat pelayanan, SOP, dan video layanan informasi publik;
9. Pemutakhiran konten situs web PPID Ditjen PKRL;
10. Koordinasi pemenuhan data dukung monev keterbukaan informasi publik 2025 dengan Direktorat dan UPT lingkup Ditjen PKRL;
11. Pengisian SAQ Monev KIP 2025;
13. Permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti.

IK 20. Presentase Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA Lingkup DJPKRL

Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/updating data pelaku usaha kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, pedagang/pemasar ikan dan petambak garam), meliputi data RTP, sarana dan jenis Kegiatan. Pendataan KUSUKA mengacu pada Peraturan Menteri KP Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.

Pendataan KUSUKA dihitung mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2024, dengan baseline data hasil pendataan terakhir tahun 2023 (31 Desember 2023). Frekuensi pengukurannya adalah tahunan.

Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terintegrasi KUSUKA, merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah mendapatkan kartu KUSUKA secara elektronik.

Capaian IK ini dihitung dengan persentase jumlah pendaftaran baru pelaku usaha KP (petambak garam) yang telah tervalidasi (blok umum dan blok sarana dan prasarana terisi lengkap dan valid) pada aplikasi Satu Data KP terhadap target tahunan yang telah ditentukan.

Teknik Menghitung:

Menginventarisasi dan menjumlahkan KUSUKA yang telah divalidasi lingkup DJPKRL pada laman satu data KKP, dengan rumus:

$$\Sigma \text{ KUSUKA} = (\text{Jumlah Pelaku Usaha KP yang telah divalidasi} / \text{Total Target}) \times 100.$$

Tabel 42 Capaian IK Presentase Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA Tahun 2024

SK – 1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL					
IK – 20				Presentase Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA (%)					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	100	100	100	100	-	-	-

A. Capaian IK Tahun 2024

Pada tahun 2024 telah tercatat jumlah KUSUKA Petambak Garam sebanyak 2.433 dan telah tervalidasi seluruhnya, sehingga target pada Tahun 2024 telah tercapai 100%. Jumlah KUSUKA Petambak Garam tersebut tersebar di Provinsi Aceh, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja di Tahun 2024 sama dengan capaian kinerja Tahun 2023 yaitu 100%. Pada Tahun 2023 data KUSUKA petambak Garam yang telah tercatat adalah 2.779 dan sudah tervalidasi seluruhnya (100%).

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL Tahun 2020-2024

Capaian Kinerja Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPKRL karena merupakan IK baru pada tahun 2023.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Keberhasilan pencapaian IK ini disebabkan oleh tersusunnya basis data Pelaku Usaha KP khususnya petambak garam yang memenuhi prinsip Satu Data sebagai pendukung dalam penentuan kebijakan. Komitmen tinggi dan kinerja yang baik dari penyuluh perikanan/petugas pendataan KUSUKA, serta koordinasi dengan pelaksana kegiatan di unit kerja dalam pengendalian internal lingkup KKP (Setditjen PKRL, Dit. Jasa Kelautan dan Pusdatin).

- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya manusia, bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN KKP.
- F. Kegiatan Pendukung
 1. Validasi KUSUKA Petambak Garam
 2. Validasi Data Sampling Produksi Garam
 3. Penjaminan kualitas pendataan KUSUKA dan Produksi Garam
- G. Rencana Aksi Tahun 2025
Pada Tahun 2025 akan dilakukan
 1. Pendataan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung subsektor Pengelolaan Ruang Laut (KUSUKA); dan
 2. Validasi KUSUKA.

IK 21. Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi di Lingkungan DJPKRL

Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi, merupakan penilaian atas capaian realisasi validasi data agregat pendataan produksi garam pada aplikasi satu data kelautan dan perikanan. Ruang lingkup pendataan produksi kelautan dan perikanan untuk DJPKRL adalah Garam Tambak dan garam Non Tambak.

Pengukuran indikator kinerja terdapat 2 Variabel Perhitungan, yaitu:

$$R \text{ Sampling } (\%) = X1 + X2$$

- a. Realisasi validasi Data Sampling Produksi Kelautan dan Perikanan (X1), Bobot Nilai (30%)

Realisasi validasi Data Sampling Produksi KP (X1) dihitung berdasarkan jumlah sampel yang telah dilakukan validasi, dengan rumus

$$X1 = \frac{\text{Realisasi Jumlah sampling yang divalidasi}}{\text{Jumlah data sampling produksi garam yang diInput}} \times 100$$

- b. Realisasi Validasi Nasional Data Produksi KP (X2), Bobot Nilai 70%.
Realisasi validasi Nasional Data Produksi KP (X2) dihitung berdasarkan jumlah data agregat yang telah dilakukan validasi, dengan rumus

$$X2 = \frac{\text{Realisasi Jumlah data agregat yang divalidasi}}{\text{Jumlah data agregat yang diInput}} \times 100$$

Jumlah Target validasi DJPKRL 100%. Data validasi dihitung mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2024.

Pengukuran realisasi validasi data sampling dilakukan terhadap data sampling produksi hasil pendataan usaha garam yang diInput oleh enumerator pada aplikasi satudata KKP. Pengukuran capaian validasi nasional data produksi dilakukan terhadap data agregat produksi hasil pendataan usaha garam yang diInput oleh enumerator pada aplikasi Satudata KKP, Validasi Nasional ini diselenggarakan oleh Pusdatin KKP dan dilaksanakan per semester. Data Produksi semester III tahun berjalan akan divalidasi pada Validasi Nasional semester I tahun berikutnya.

Teknik Menghitung:

Capaian % Data yang Tervalidasi dihitung dengan rumus = $X1(\text{validasi data produksi}) + X2(\text{validasi data agregat nasional})$

Tabel 43 Capaian IK Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi di Lingkungan DJPKRL pada Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 21		Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi di Lingkungan DJPKRL							
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	100	100	100	100	-	-	-

A. Capaian IK Tahun 2024

Capaian IK Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi di Lingkungan DJPKRL tahun 2024 adalah 100% yang ditandai dengan telah dilakukan validasi terhadap seluruh data *sampling* hasil pendataan produksi garam tahun 2024 (9.131 data) yang diinput oleh enumerator, sebagaimana terlampir.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya
 Capaian Kinerja di tahun 2024 sama dengan capaian kinerja tahun 2023 yaitu 100% karena seluruh data telah tervalidasi.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL Tahun 2020-2024
 Capaian Kinerja Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPKRL karena merupakan IK baru pada tahun 2023.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
 Keberhasilan pencapaian IK ini didukung oleh komitmen pelaksanaan kegiatan dari mulai Petugas Pendataan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota, Produsen Data (Dit. Jasa Kelautan), Validator

Pusat (Setditjen PRL) dan dukungan kelancaran aplikasi pengolahan data.

- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN Ditjen PKRL.
- F. Kegiatan Pendukung pada Tahun 2024
 1. Validasi Data Sampling Produksi Garam; dan
 2. Penjaminan kualitas pendataan KUSUKA dan Produksi Garam.
- G. Rencana Aksi Tahun 2025
 1. Bimtek Pendataan Produksi Garam tahun 2025;
 2. Validasi Data Sampling Hasil Survei Produksi Garam;
 3. Validasi Data Agregat Hasil Survei Produksi Garam;
 4. Validasi Nasional Produksi Garam semester II tahun 2024;
 5. Validasi Nasional Produksi Garam semester I tahun 2025.

IK 22. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi di lingkungan DJPKRL

Seiring dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 bahwa setiap K/L wajib menyelenggarakan Informasi Geospasial Tematik (IGT). Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta adalah langkah-langkah penyelenggaraan IGT yang terdapat di berbagai Kementerian/Lembaga melalui proses Kompilasi data IGT yang ada, Integrasi data IGT dengan data IGD, dan Sinkronisasi antar data IGT. Hal tersebut mendasari perlunya dilakukan penyelenggaraan data IGT lingkup KKP sehingga menghasilkan data geospasial yang terstandar, berkualitas dan dapat berbagi pakai. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Produsen Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, semakin menguatkan penyelenggaraan IGT yang terintegrasi di lingkungan DJPKRL.

Persentase Realisasi Data Geospasial yang terintegrasi merupakan penilaian atas capaian realisasi pengintegrasian data geospasial yang telah dilakukan oleh unit data eselon 1. Hasil pengukuran merupakan hasil capaian sesuai matriks rencana aksi yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja eselon 1.

Capaian IK ini dihitung dari capaian kegiatan berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan dengan rumus:

$$\text{Nilai per eselon 1} = (\text{jumlah rencana aksi yang diselesaikan} / \text{total kegiatan berdasarkan rencana aksi}) \times 100.$$

Capaian IK Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi di lingkungan DJPKRL tercantum pada tabel berikut.

Tabel 44 Capaian IK Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi di lingkungan DJPKRL Tahun 2024

SK – 1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL						
IK – 22				Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi di lingkungan DJPKRL (%)						
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	

A. Capaian IK Tahun 2024

Capaian IK persentase realisasi data geospasial yang terintegrasi di lingkungan DJPKRL adalah 100%, dengan target 100% maka persentase capaian terhadap target IK adalah 100%. Capaian ini didapatkan dari 7 (tujuh) informasi geospasial tematik (IGT) yang terselenggara di lingkup DJPKRL pada tahun 2024 yakni

1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
2. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah;
3. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Non PPKT;
4. Kawasan Konservasi Perairan;
5. Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat di Perairan Laut;
6. Lahan Garam; dan
7. Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya

Capaian Kinerja tahun 2024 dan tahun 2023 adalah 100%, tetapi terdapat peningkatan jumlah IGT yang menjadi target dan capaian pada tahun 2024 berjumlah 7 (tujuh) IGT dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 5 (lima) IGT. Adapun 2 IGT yang baru terdapat pada tahun 2024 adalah IGT Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Non PPKT dan IGT Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL Tahun 2020-2024
Capaian Kinerja Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPKRL karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2023.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
Keberhasilan IK ini didukung oleh komitmen dari produsen data geospasial, Unit Data Eselon I dan Unit Data Kementerian dalam melaksanakan tugas sesuai peran dan tanggungjawabnya masing-masing selaku penyelenggara Informasi Geospasial Tematik.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan ASN KKP dan Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan serta Fungsional lainnya yang memiliki keahlian dalam penggunaan sistem informasi geospasial.
- F. Kegiatan Pendukung
1. Kontrol Kualitas dan Evaluasi Kualitas IGT yang di hasilkan oleh produsen data sesuai tahapan dan melengkapi dokumennya sebagai data dukung terjaminnya kualitas untuk integrasi dan berbagi pakai.
 2. Pendampingan penyusunan Spesifikasi Produk Data IGT yang termasuk dalam lampiran Kepmen KP 75 Tahun 2024.
 3. Pendampingan penilaian akhir wawancara nominasi Bhumandala Award dan menghadiri penerimaan penghargaan Bhumandala Award yang diterima oleh KKP. Penghargaan yang diterima dari Kategori Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial mendapatkan Medali Emas (Kanaka), Kategori Penyelenggaraan IGT diwakili oleh IGT Kawasan Konservasi (target realisasi integrasi IGT DJPKRL) mendapatkan Medali Perunggu (Ariti) dan Bhumandala Nama Rupabumi yang diwakili oleh IGT Wilayah Kelola MHA (target realisasi integrasi IGT DJPKRL) mendapatkan Medali Perunggu (Ariti).
 4. Pendampingan penyusunan basisdata, standar data IGT Reklamasi WP3K di provinsi Banten dan Kepulauan Riau.
 5. Kontrol Kualitas dan Evaluasi Kualitas IGT baru yaitu IGT Neraca Sumber Daya Laut (Ocean Account) dengan pilot project 5 Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) yaitu KKPN Pulau Pieh, KKPN Kepulauan Anambas, KKPN Gili Matra, KKP Raja Ampat dan KKPN Waigeo.
 6. Peningkatan Kapasitas SDM pengelola data neraca sumber daya laut.

7. Finalisasi Standar Data dan Metadata Data Prioritas DJPKRL Tahun 2024 termasuk data dan informasi geospasial.
 8. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan IGT lingkup DJPKRL dan Penyusunan Rencana Aksi Penyelenggaraan IGT RPJMN 2025 – 2029.
- G. Rencana Aksi Tahun 2025
1. Penyusunan Metadata IGT lingkup DJPKRL;
 2. Koordinasi dan finalisasi target tahunan penyelenggaraan IGT lingkup DJPKRL;
 3. Penyusunan Dokumen Kontrol Kualitas dan Evaluasi Kualitas IGT lingkup DJPKRL;
 4. Kontrol Kualitas dan Evaluasi Kualitas IGT lingkup DJPKRL melalui portaldata.kkp.go.id.
 5. Pendampingan penyusunan Spesifikasi Produk Data IGT lingkup DJPKRL;
 6. Peningkatan kapasitas SDM pengelola IGT DJPKRL; dan
 7. Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan IGT dari Badan Informasi Geospasial.

IK 23. Persentase Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan

Dalam rangka pelaksanaan Satu Data dan Satu Peta KKP dalam mendukung Tata Kelola Data Nasional, Ditjen PKRL melalui Unit Eselon II teknis berperan sebagai produsen data yang akan menghasilkan data Lingkup Ditjen PKRL, baik itu data tabular maupun data spasial. Sekretariat Ditjen PKRL selaku Unit Data Eselon I mempunyai tugas sebagai validator data yang dihasilkan tersebut.

Dalam mendukung Satu Data melalui penyusunan Kelautan dan Perikanan dalam Angka (KPDA) yang disusun oleh Pusdatin - Setjen KKP, Ditjen PKRL mempunyai peran menyediakan data terkait pelaksanaan Program Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Di samping data untuk KPDA, Ditjen PKRL juga mengumpulkan data-data pelaksanaan kegiatan terkait kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang bisa dimanfaatkan oleh stakeholder terkait. Data yang disusun dalam bentuk tabular berupa tabel dan spasial berupa peta.

Indikator kinerja Jumlah Dokumen Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil merupakan data-data Ditjen PKRL yang dikumpulkan dan divalidasi dalam kurun waktu 1 tahun. Target dokumen data meliputi:

- 1) Buku Kelautan dan Perikanan Dalam Angka (KPDA) Tahun 2023
- 2) Profil Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah Tahun 2023
- 3) Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
- 4) Album Peta IGT Ditjen PKRL Tahun 2023.

Teknik menghitung yang digunakan yaitu menjumlah dokumen data yang dihasilkan berdasarkan pengolahan dan/atau pengelolaan data lingkup DJPKRL.

Capaian IK Persentase Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 45 Capaian IK Persentase Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 23		Persentase Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan							
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	-	100	100	100	-	-	-

A. Capaian IK Tahun 2024

Capaian IKU ini adalah 100%, didapatkan dari pemenuhan target sebanyak 4 (empat) dokumen data kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu:

1. Buku Kelautan dan Perikanan Dalam Angka (KPDA) Tahun 2023
2. Profil Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah Tahun 2023
3. Laporan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
4. Album Peta IGT Ditjen PKRL Tahun 2023.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya

Capaian Kinerja Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2024. Pada tahun sebelumnya mengalami perubahan nomenklatur, semula “Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan” menjadi IK Persentase Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan pada tahun 2024.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL Tahun 2020-2024

Capaian Kinerja Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPKRL karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2024.

- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Keberhasilan IK ini didukung oleh komitmen dari produsen data dan unit data Eselon 1 dalam melaksanakan tugas sesuai peran dan tanggungjawabnya masing-masing selaku pengelola data dalam menyusun dokumen.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan verifikator produsen data, sehingga data yang diperoleh telah akurat berdasarkan hasil validasi.
- F. Kegiatan Pendukung pada Tahun 2024
1. Finalisasi Buku KPDA;
 2. Finalisasi Data Profil Kelompok Penerima BP Tahun 2023; dan
 3. Finalisasi Album Peta IG Lahan Garam Banten, Bali dan NTB.
- G. Rencana Aksi Tahun 2025
1. Penyusunan Buku KPDA Tahun 2024; dan
 2. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender lingkup DJPKRL.

IK 24. Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati

Kerja Sama adalah kegiatan yang dilakukan oleh KKP dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja KKP. Pelaksanaan kerja sama di lingkungan KKP berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan KKP.

Kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- 1) Mengutamakan kepentingan nasional;
- 2) Kejelasan tujuan dan hasil;
- 3) Kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
- 4) Saling menghargai dan menguntungkan;
- 5) Menjunjung asas musyawarah untuk mufakat;
- 6) Tidak menimbulkan ketergantungan;
- 7) Terencana dan berkelanjutan;
- 8) Dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
- 9) Berbasis indikator, kinerja, efektif dan efisien; dan
- 10) Bersifat kelembagaan.

Untuk mencapai sasaran dan target program Pengelolaan Kelautan dan ruang laut, Ditjen PKRL memerlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak di dalam negeri seperti Kementerian dan Lembaga, Pemerintah

Daerah, Badan Usaha, swasta, perguruan tinggi, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun kelompok masyarakat. Penguatan dukungan dalam berbagai bentuk kerja sama dari luar negeri tidak luput dari sasaran potensial mitra kerja sama dalam akselerasi pencapaian program Pengelolaan Kelautan dan ruang laut. Kerja sama luar negeri dapat dijalin melalui kerja sama bilateral, regional, multinasional, lembaga internasional di bawah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Lembaga Donor, Non Government Organization (NGO) asing, maupun Organisasi Masyarakat Asing (Ormas Asing).

Dalam upaya mencapai sasaran strategis terwujud dan terlaksananya kerja sama dalam dan luar negeri yang implementatif, capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja (IK 24), yaitu persentase dokumen kerja sama yang disepakati. Dokumen kerja sama yang disepakati adalah jumlah dokumen kerja sama dalam dan luar negeri yang ditandatangani Dirjen PKRL bersama Para Pihak yang terlibat kerja sama sebagaimana diatur pada PERMEN KP Nomor 23 tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan KKP.

Pada Tahun 2024, pemenuhan persentase dokumen kerja sama disepakati ditargetkan sejumlah 90% dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan. Perhitungan capaian IK ini adalah dengan membandingkan antara jumlah dokumen kerja sama yang ditandatangani sampai dengan Desember 2024 dengan jumlah dokumen kerja sama yang diusulkan periode Januari – Oktober 2024.

Capaian IK Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 46 Capaian IK Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 24		Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati							
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	-	90	100	111,11	-	-	-

A. Capaian IK Tahun 2024

IKU Dokumen Kerja Sama Program PKRL yang Disepakati memiliki target pada Tahun 2024 sebesar 90% dengan frekuensi pengukurannya adalah tahunan sehingga capaian IKU ini dihitung pada akhir tahun.

Hingga akhir Tahun 2024 telah tercapai 100% dokumen kerja sama yang disepakati dengan penandatanganan 26 dokumen kerja sama program PKRL yaitu:

1. Kerja Sama Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Ditjen PKRL dengan Yayasan Institut Sumberdaya Dunia;
2. Kerja Sama Ditjen PKRL dengan Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada;
3. Kerja Sama Ditjen PKRL dengan Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada;
4. Kerja Sama LPSPL Serang dengan Fakultas Pertanian, Universitas Tidar;
5. Kerja Sama Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen PKRL dengan PT Free The Sea dan Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Batam;
6. Kerja Sama Ditjen PKRL dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT);
7. Kerja Sama antara BPSPL Denpasar dengan Yayasan Penyus Banyuwangi;
8. Kerja Sama BPSPL Makassar dengan Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin;
9. Kerja Sama Ditjen PKRL dengan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek);
10. Kerja Sama BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mulawarman (UNMUL);
11. Kerja Sama Ditjen PKRL dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Kerja Sama antara LPSPL Sorong dengan Fakultas Pertanian, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Universitas Kristen Papua;
13. Kerja Sama Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen PKRL dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung;
14. Letter of Intent (LoI) antara Ditjen PKRL KKP dengan PT. Pertamina, PT. Pertamina Hulu Energi dan Korea Maritime and Ocean University Consortium
15. Kerja Sama Ditjen PKRL dengan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, BPOM;

16. Kerja Sama BPSPL Padang dengan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala;
17. Kerja Sama Ditjen PKRL dengan LPPM universitas Papua;
18. Technical Agreement antara Direktorat Penataan Ruang Laut, Ditjen PKRL dengan FISO Xiamen;
19. Host Country Agreement antara Ditjen PKRL dengan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;
20. Kerja Sama Ditjen PKRL dengan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI);
21. Kerja Sama Ditjen PKRL dengan FPIK Universitas Jenderal Soedirman;
22. Kerja Sama Ditjen PKRL dengan FPIK Universitas Brawijaya;
23. Kerja Sama BPSPL Padang dengan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang;
24. Kerja Sama BPSPL Makassar dengan Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan Universitas Negeri Gorontalo;
25. Kerja Sama Direktorat KEBP dengan Yayasan Rekam Nusantara;
26. Kerja Sama Direktorat KEBP dengan Yayasan Landesa Bumi Indonesia.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya
Capaian Kinerja Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 karena IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2024 dan merupakan perbaikan dari IKU Dokumen Kerja Sama Program PKRL yang disepakati.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL Tahun 2020-2024
Tidak ada target dan indikator Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati pada Rencana Strategis DJPKRL 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
 1. Keberhasilan:
 - a. Dukungan dan partisipasi aktif dari unit kerja teknis Ditjen PKRL sebagai pemrakarsa kerja sama program PKRL dalam proses penyusunan naskah kerja sama.
 - b. Proses penandatanganan dokumen kerja sama program PKRL dilakukan secara *desk to desk*.
 2. Kendala:
 - a. Komunikasi dan koordinasi di level internal masih perlu ditingkatkan terutama dalam penyelenggaraan seremonial penandatanganan naskah kerja sama.

- b. Proses reviu dan pengesahan naskah final dokumen PKS yang telah dibahas para pihak membutuhkan waktu lebih lama
- 3. Solusi:
 - a. Diperlukan komunikasi aktif antara Para Pihak melalui pertemuan koordinasi agar memiliki kesepahaman yang sama penyelenggaraan seremonial penandatanganan naskah kerja sama.
 - b. Meningkatkan koordinasi di level internal untuk mempercepat proses finalisasi naskah kerja sama yang telah dibahas para pihak.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL.
- F. Kegiatan Pendukung
Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan penandatanganan 26 dokumen kerja sama program PKRL disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 47 Perjanjian Kerja Sama Tahun 2024

No.	Kerja Sama	Pihak Penandatanganan		Tanggal TTD	Masa Berlaku
1.	PKS tentang Penguatan Pengelolaan Kawasan Konservasi dalam Melindungi Ekosistem dan Karbon Biru	Direktorat KEBP	Yayasan Institut Sumberdaya Dunia	7 Februari 2024	3 Tahun
2.	PKS tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Penelitian, Dukungan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum di Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Ditjen PKRL	Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada	6 Maret 2024	3 Tahun
3.	PKS tentang Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Ekosistem Kawasan	Ditjen PKRL	Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada	6 Maret 2022	3 Tahun

No.	Kerja Sama	Pihak Penandatanganan		Tanggal TTD	Masa Berlaku
	Konservasi, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Dukungan Penataan Ruang Laut				
4.	PKS tentang Penguatan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Sumber Daya Ekosistem dan Biota Perairan di Provinsi Jawa Tengah	LPSPPL Serang	Fakultas Pertanian Universitas Tidar	24 April 2024	3 Tahun
5.	PKS tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Buluh	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen PKRL	PT Free The Sea dan Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Batam	25 April 2024	3 Tahun
6.	NK tentang Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi NTT	Ditjen PKRL	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)	25 April 2024	3 Tahun
7.	PKS tentang Konservasi Penyu dan Habitatnya di Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur	BPSPL Denpasar	Yayasan Penyu Banyuwangi	3 Mei 2024	3 Tahun
8.	PKS tentang Penguatan Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	BPSPL Makassar	Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin	20 Mei 2024	3 Tahun
19.	PKS tentang Dukungan Pelaksanaan Gerakan Sekolah Sehat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Ditjen PKRL	Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan	28 Mei 2024	3 Tahun

No.	Kerja Sama	Pihak Penandatanganan		Tanggal TTD	Masa Berlaku
			Menengah, Kemendikbudristek		
10.	PKS tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Penguatan SDM, Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat	BPSPL Pontianak	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mulawarman (UNMUL)	28 Mei 2024	3 Tahun
11.	NK tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu, Kab. Kutai Kartanegara	Ditjen PKRL	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	28 Mei 2024	5 Tahun
12.	PKS tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Ekosistemnya melalui Dukungan Kajian, Penguatan Kapasitas SDM, dan Pemberdayaan Masyarakat	Ditjen PKRL	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung	20 Juni 2024	3 Tahun
13.	PKS tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Provinsi Papua Barat Daya	LPSPL Sorong	Fakultas Pertanian, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Universitas Kristen Papua	31 Juni 2024	3 Tahun

No.	Kerja Sama	Pihak Penandatanganan		Tanggal TTD	Masa Berlaku
14.	<i>Letter of Intent (Lol)</i> tentang <i>Cooperation for feasibility studies on decommissioning and re-utilization of oil and gas offshore platforms project</i>	Ditjen PKRL KKP	PT. Pertamina, PT. Pertamina Hulu Energi dan Korea Maritime and Ocean University Consortium	11 Juli 2024	-
15.	PKS tentang pemberdayaan pelaku usaha obat bahan alam dan kosmetik bersumber dari produk kelautan dan perikanan	Ditjen PKRL	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, BPOM	2 Agustus 2024	Sampai 3 Juli 2028
16.	PKS tentang Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut melalui dukungan penguatan sumber daya manusia, kajian dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah kerja BPSPL Padang	BPSPL Padang	Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala	5 September 2024	3 tahun
17.	PKS tentang pengelolaan kelautan dan ruang laut melalui penerapan tridharma perguruan tinggi	Ditjen PKRL	LPPM universitas Papua	10 September 2024	2 tahun
18.	<i>Technical Agreement</i> tentang <i>Advancing The Blue Economy Development Through Marine Spatial Planning</i>	Direktorat Penataan Ruang Laut, Ditjen PKRL	FISO Xiamen, RRT	26 September 2024	2 tahun
19.	<i>Host Country Agreement</i> tentang <i>the 6th International Marine Spatial Planning Forum</i>	Ditjen PKRL	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization	27 September 2024	-
20.	PKS tentang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut melalui Pengembangan	Ditjen PKRL	Komite Olahraga Masyarakat	25 Agustus 2024	3 tahun

No.	Kerja Sama	Pihak Penandatanganan		Tanggal TTD	Masa Berlaku
	Olahraga Masyarakat dan Wisata Olahraga Bahari		Indonesia (KORMI)		
21.	PKS tentang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut melalui Penerapan Tridharma Perguruan Tinggi	Ditjen PKRL	FPIK Universitas Jenderal Soedirman	18 Oktober 2024	3 tahun
22.	PKS tentang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut melalui Penerapan Tridharma Perguruan Tinggi	Ditjen PKRL	FPIK Universitas Brawijaya	17 November 2024	3 tahun
23.	PKS tentang Pengembangan Wisata Bahari Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang	BPSPL Padang	Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang	2 Desember 2024	3 Tahun
24.	PKS tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil melalui Penerapan Tridharma Perguruan Tinggi di Wilker BPSPL Makassar	BPSPL Makassar	Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan Universitas Negeri Gorontalo	24 Desember 2024	3 Tahun
25.	PKS tentang Penguatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Perlindungan Hiu dan Pari	Direktorat KEBP	Yayasan Rekam Nusantara	23 Desember 2024	3 Tahun
26.	PKS tentang Penguatan Pengelolaan Konservasi Ekosistem yang Inklusif	Direktorat KEBP	Yayasan Landesa Bumi Indonesia	24 Desember 2024	5 tahun



Gambar 9 Penandatanganan PKS antara Ditjen PKRL dan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 6 Maret 2024



Gambar 10 Penandatanganan PKS antara Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen PKRL dengan PT Free The Sea dan Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Batam di Semarang, 25 April 2024



Gambar 11 Penandatanganan PKS antara Ditjen PKRL dengan BPOM



Gambar 12 Penandatanganan PKS antara BPSPL Padang dengan Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Syiah Kuala



Gambar 13 Penandatanganan *Technical Agreement* antara Direktorat Penataan Ruang Laut, Ditjen PKRL dengan FISO Xiamen.

G. Rencana Aksi Tahun 2025

Pada Tahun 2025 akan dilakukan kegiatan pembahasan usulan kerja sama dan finalisasi rancangan naskah kerja sama yang diprakarsai oleh Satker Pusat/UPT lingkup Ditjen PKRL atau calon mitra di level nasional maupun internasional (bilateral).

IK 25. Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun

Kertas Posisi dalam pertemuan kerja sama luar negeri yang disusun adalah jumlah kertas posisi yang digunakan oleh Delegasi Kementerian yang menghadiri perundingan Perjanjian Internasional program PKRL. Kertas Posisi yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kertas Posisi sekurang-kurangnya memuat:

- a. agenda pertemuan;
- b. rincian informasi mata agenda;
- c. perkembangan isu setiap mata agenda;
- d. perkembangan kerja sama;

- e. *suggested point of intervention*; dan/atau
- f. usulan posisi Indonesia;

Pada Tahun 2024, pemenuhan Kertas Posisi dalam pertemuan kerja sama luar negeri ditargetkan 100% dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan. Pengukuran capaian untuk persentase pemenuhan Kertas Posisi dalam pertemuan kerja sama luar negeri adalah dengan membandingkan antara jumlah dokumen kertas posisi yang disusun dengan jumlah pertemuan/perundingan perjanjian internasional yang dihadiri pada periode Januari – Desember 2024.

Capaian IK Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 48 Capaian IK Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun Tahun 2024

SK – 1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL						
IK – 25				Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri Program PKRL yang Disusun						
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	

A. Capaian IK Tahun 2024

Capaian IKU Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun Tahun 2024 adalah 100% dari 8 (delapan) pertemuan internasional:

1. Financial Resources Working Group (FRWG) Meeting CTI-CFF di Cebu, Filipina pada 19 Maret 2024.
2. The 56th Meeting of SEAFDEC Council di Tagaytay, Filipina pada 6 – 9 Mei 2024.
3. ATS Senior Government Officials’ Meeting (SGOM) di Brisbane, Australia, 25 Juni 2024
4. Monitoring and Evaluation Working Group (MEWG) Meeting CTI-CFF di Port Moresby, Papua Nugini pada 15 – 17 Juli 2024.
5. Sulu-Sulawesi Seascape (SSS) Regional Exchange 2 and the Bismarck Solomon Sea (BSS) Regional Exchange, back-to-back with the Threatened Species Technical Working Group Meeting di Kinabalu, Malaysia, pada 12 – 16 Agustus 2024.

6. The Internal Resource Committee (IRC) Meeting di Dili, Timor Leste, pada 25 – 26 September 2024.
 7. The fifth session of the Intergovernmental Negotiating Committee to develop an internationally legally binding instrument on plastic pollution, including in the marine environment (INC-5), di Busan, Korea Selatan, pada 24 November – 1 Desember 2024.
 8. The 19th Pre-Senior Officials Meeting di Dili, Timor Leste, pada 2-3 December 2024.
 9. The 19th Senior Officials Meeting di Dili, Timor Leste, pada 4-5 December 2024.
 10. ATS Regional Coordination Committee (RCC) Meeting di Bali, Indonesia, pada 10-11 Desember 2024.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya
Capaian kinerja tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2024 dan merupakan perbaikan dari IKU Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri Program PKRL yang Disusun.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL Tahun 2020-2024
Tidak ada target dan indikator Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri Program PKRL yang Disusun pada Renstra DJPKRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Keberhasilan capaian ini didukung oleh komitmen Ditjen PKRL dan instansi terkait lainnya dalam menentukan posisi Indonesia pada pertemuan internasional yang akan dituangkan dalam kertas posisi. Selain itu juga didukung dengan partisipasi aktif Ditjen PKRL dan instansi terkait dalam penyusunan kertas posisi.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL.
- F. Kegiatan Pendukung
Sampai dengan akhir Tahun 2024 telah dihasilkan 10 dokumen Kertas Posisi pada 10 pertemuan kerja sama luar negeri sebagai berikut:

Tabel 49 Kertas Posisi yang telah Disusun pada Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	<i>Financial Resources working Group (FRWG) Meeting CTI-CFF</i> di Cebu, Filipina	19 Maret 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Delri Indonesia mencatat update tentang susunan anggota FRWG dan menyambut anggota baru; • Indonesia mendukung kesepakatan pada SOM-18 yang dapat sejalan untuk RPOA 2.0. selain itu menyampaikan kendala terkait pembayaran kontribusi; • Indonesia mengusulkan agar CTCF dapat mengeksplorasi sumber pendanaan alternatif, dan membuat perbandingan <i>trust fund</i> yang sudah ada di tingkat nasional.
2.	<i>The 56th Meeting of SEAFDEC Council</i> di Tagaytay, Filipina	7 – 9 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Delri Indonesia memberikan masukan terkait potensi kerja sama Ekonomi Biru dalam rangka peningkatan pengembangan sumber daya manusia yaitu Vocational Goes to Actors (VOGA) dan Smart Fisheries Villages (SFV). • Indonesia juga mendorong SEAFDEC untuk menjalin kerja sama yang erat dengan RPOA-IUU dan ASEAN Network to Combat IUU Fishing (AN-IUU) untuk mendukung upaya memerangi IUUF di kawasan ini. • Indonesia menginformasikan pasa sesi pembahasa isu CITES bahwa Indonesia telah menyusun NPOA Konservasi Kuda Laut tahun 2016-2020, namun dokumen tersebut masih digunakan sebagai bagian dari penyusunan Non Detriment Finding dan melakukan analisis untuk memonitoring sumber daya Kuda Laut di Indonesia.
3.	<i>ATS Senior Government Officials' Meeting (SGOM)</i> di Brisbane, Australia	25 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Indonesia menambahkan beberapa masukan dan revisi pada ATS <i>ministerial declaration</i> agar lebih terorganisir, serta menggunakan beberapa kata yang biasa digunakan dalam deklarasi tingkat tinggi berdasarkan pengalaman Indonesia menjadi tuan rumah G20 dan ASEAN pada tahun 2022 dan 2023 • Indonesia memberikan beberapa masukan terkait <i>ATS Ministerial Forum</i> • Untuk <i>Strategic Development Partner (SDP)</i>, Indonesia mengusulkan untuk mengikutsertakan Organisasi Internasional yang selama ini telah mendukung kinerja

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			<p>ATSEA-2 seperti RPOA IUU, CTI CFF, UNDP, PEMSEA, UNOPS, GEF, dan lain-lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> Indonesia dengan senang hati menjadi tuan rumah pertemuan terakhir RSC di Bali pada bulan Oktober atau November tahun 2024.
4.	<i>Monitoring and Evaluation Working Gorup (MEWG) Meeting CTI-CFF di Port Moresby</i>	15 – 17 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> Dari anggota CT-6, hanya Indonesia dan Solomon yang sudah mengupdate status MPA pada tahun 2023. Indonesia mengusulkan posisi baru sebagai alternate CT-ATLAS Indonesia menyampaikan bahwa telah melaksanakan sosialisasi RPOA 2.0 dan menyusun NPOA.
5.	<i>Sulu-Sulawesi Seascape (SSS) Regional Exchange 2 and the Bismarck Solomon Sea (BSS) Regional Exchange, back-to-back with the Threatened Species Technical Working Group Meeting di Kinabalu, Malaysia</i>	12 – 16 Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia menyampaikan komitmen akan menyelesaikan NPOA sebelum SOM-19 Target regional (RPOA 2.0) by 2025 minimal terjalin 2 kolaborasi/ kemitraan untuk mendukung implementasi kerangka regional dan nasional COASTFISH Penambahan SDM yang dibahas pada MEWG tidak dibebankan pada country contribution, sehingga Indonesia menyarankan recruitment SDM dari mitra
6.	<i>The Internal Resource Committee Meeting di Dili, Timor Leste</i>	25 – 26 September 2024	<p>Posisi Indonesia belum menyetujui usulan restrukturisasi Sekretariat, dengan catatan: 1), Sekretariat harus dapat mengkalkulasikan besaran anggaran untuk kebutuhan gaji pegawai dan anggaran untuk program, 2) harus ada pembatasan komposisi besaran/pembagian persentase anggaran untuk rutinitas pengeluaran Sekretariat (gaji, Listrik, biaya perbaikan, dll) dan anggaran untuk program dan kegiatan. 3) untuk mengisi kesenjangan kebutuhan pegawai dan rekrutmen konsultan, Sekretariat dapat menggandeng mitra-mitra Pembangunan CTI-CFF, 4) RPOA 2.0 sebagai modalitas Sekretariat untuk menggandeng lebih banyak donor, mitra dan filantropi untuk mendukung capaian dan target RPOA sehingga akan meningkatkan manfaat bagi negara anggota.</p>
7.	<i>The fifth session of the Intergovernmental Negotiating</i>	24 November – 1 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia menyampaikan kebutuhan plastik dalam keperluan ketahanan pangan dan perlindungan kesehatann masih belum tersubstitusi.

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	<i>Committee to develop an internationally legally binding instrument on plastic pollution, including in the marine environment (INC-5)</i> , di Busan, Korea Selatan		<ul style="list-style-type: none"> Indonesia menyampaikan target pengurangan plastik masing-masing negara harus mencerminkan kondisi nasional.
	<i>The 19th Pre-Senior Officials Meeting</i> di Dili, Timor Leste	2-3 December 2024	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia menyampaikan usulan untuk menambahkan ED report dalam agenda SOM 19 CTI CFF dan juga mengusulkan agenda Regional Business Forum dan Acknowledgement and acceptance of CCI report. Indonesia mengapresiasi RS karena telah memilih BPK sebagai eksternal audit untuk tahun 2023, dan Indonesia mengusulkan kembali BPK sebagai eksternal auditor tahun 2024.
	<i>The 19th Senior Officials Meeting</i> di Dili, Timor Leste	4-5 December 2024	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia menyampaikan bisa menerima budget plan MEWG 2025, dan akan support agenda CTI Leader summit yang akan dilaksanakan di Malaysia dengan ASEAN Summit. Akan ada University Partnership/Scientific Advisory Group yang dapat menjadi peluang bagi perguruan tinggi dan akademisi Indonesia untuk berperan pada forum regional CTI-CFF
	<i>ATS Regional Coordination Committee (RCC) Meeting</i> di Bali, Indonesia	10-11 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia menyampaikan pentingnya peran RCC ATS dan mendukung penuh pembentukannya sebagai pembuat kebijakan dan keputusan regional dan implementasi SAP. Indonesia meminta secretariat ATS mengusahakan pendanaan alternatif untuk implementasi work plan.



Gambar 14 ATS Senior Government Officials' Meeting (SGOM) di Brisbane, Australia, 25 Juni 2024



Gambar 15 Monitoring and Evaluation Working Group Meeting CTI-CFF di Port Moresby, Papua New Guinea pada 15 – 17 Juli 2024



Gambar 16 The 19th Senior Officials Meeting di Dili, Timor Leste, pada 4-5 Desember 2024

G. Rencana Aksi Tahun 2025

Pada Tahun 2025 akan dilakukan kegiatan pembahasan penyusunan kertas posisi yang akan digunakan oleh Delegasi Ditjen PKRL dalam pertemuan kerja sama luar negeri program PKRL tahun 2025.

IK 26. Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang Telah Disepakati

Persentase tindak lanjut kerja sama program PKRL yang telah disepakati adalah rasio implementasi kerja sama program PKRL dengan jumlah dokumen kerja sama program PKRL yang telah disepakati dan masih berlaku pada tahun sebelumnya. Pengukuran capaian untuk Persentase tindak lanjut kerja sama Program PKRL yang telah disepakati adalah dengan cara:

- 1) Melakukan inventarisasi dokumen kerja sama program PKRL yang telah disepakati dan masih berlaku pada tahun sebelumnya;
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi kerja sama program PKRL yang telah disepakati dan masih berlaku pada tahun sebelumnya; dan
- 3) Melakukan pengukuran persentase capaian implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) di lingkungan DJPKRL yang telah disepakati dan masih berlaku.

Formulasi penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian Output Setiap Kegiatan (Renaksi)}}{\text{Target Output Setiap Kegiatan (Renaksi)}} \times 100\%$$

Capaian IK Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang telah Disepakati Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 50 Capaian IK Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang telah Disepakati Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL								
IK – 26		Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang telah Disepakati								
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
91	85	70	77	75	82,5	110	5,5	-	-	

A. Capaian IK Tahun 2024

IKU Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Program PKRL yang telah Disepakati Tahun 2024 sebesar 75% telah tercapai melebihi target yaitu sebesar 82,5% (% rata-rata implementasi PKS). Capaian IKU ini pada tahun 2024 diperoleh dari hasil evaluasi 54 dokumen PKS lingkup Ditjen PKRL yang masih berlaku sebagaimana terlampir pada laporan kinerja ini. Dari 54 dokumen PKS, 35 telah selesai diimplementasikan sampai dengan tahun ini (100%), 9 PKS masih diimplementasikan dengan progres 67%-86%, 9 PKS lainnya baru diimplementasikan dengan progres kurang/sama dengan 50% dan 1 PKS belum mulai diimplementasikan (0%).

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya

Capaian IKU ini pada tahun 2024 lebih besar dibandingkan dengan capaian 2023 dan 2022 karena adanya penambahan jumlah PKS pada tahun 2024 dan peningkatan capaian output rencana aksi pada setiap PKS. Namun, jika capaian tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020-2021 karena pada tahun tersebut lebih banyak jumlah PKS.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target dan indikator Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang telah Disepakati pada Renstra DJPKRL Tahun 2020-2024.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Keberhasilan capaian ini didukung oleh komitmen Para Pihak yang melaksanakan Perjanjian Kerja Sama/Nota Kesepakatan, meskipun masih ditemui rendahnya kepatuhan dari mitra kerja sama.

- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL
- F. Kegiatan Pendukung pada Tahun 2024
Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1. Pemantauan dan evaluasi implementasi PKS di lingkungan DJPKRL Tahun 2023 dilaksanakan secara luring dan daring pada 10 – 11 Januari 2024 dengan melibatkan mitra kerja sama di Ditjen PKRL.
 2. Forum Diskusi Penguatan Kerja Sama dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 2024 yang dihadiri oleh perwakilan Unit Eselon 2 dan Unit Pelaksana Teknis serta mitra-mitra kerja sama di lingkup Ditjen PKRL. Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat implementasi kerja sama baik itu secara internal maupun eksternal di Ditjen PKRL.
 3. Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta pada 30 April 2024.
 4. Evaluasi implementasi KB antara KKP dan WWF Indonesia di Jakarta pada 15 Mei 2024.
 5. Monev Lapang KB antara KKP dan WWF Indonesia di Kupang dan Kabupaten Alor, NTT pada 11 – 13 Juni 2024.
 6. Monev Lapang KB antara KKP dan RARE Indonesia di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada 9 – 11 Juli 2024.



Gambar 17 Monev Lapang KB antara KKP dan RARE di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara

7. Persiapan Workshop MSP Maritim Silk Road Countries di Beijing pada tanggal 9 September 2024 di PKSPL IPB dalam rangka implementasi TA antara KKP dan FISO Xiamen.
8. Penghimpunan data capaian implementasi kerja sama di lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024 dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh dokumen PKS lingkup Ditjen PKRL yang masih berlaku sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024.



Gambar 18 Monev Lapang KB antara KKP dan WWF Indonesia di Kupang dan Kabupaten Alor, NTT

- G. Rencana Aksi Tahun 2025
Penyelenggaraan kegiatan pemantauan dan evaluasi capaian kerja sama lingkup Ditjen PKRL pada Tahun 2025, mulai dari kerja sama antar lembaga, kerja sama bilateral, kerja sama multilateral dan pinjaman hibah luar negeri (PHLN).

IK 27. Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang D diselesaikan Sesuai Ketentuan

Definisi Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk serta pihak internal atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dokumen Pelayanan Publik adalah dokumen yang terkait dengan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dokumen Pelayanan Publik meliputi:

- a. Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- b. Laporan Penanganan Pengaduan
- c. Laporan Pengendalian Gratifikasi
- d. Laporan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
- e. Laporan Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pemenuhan dokumen Pelayanan Publik, antara lain:

- a. Pengumpulan/Inventaris bahan pelayanan publik lingkup Ditjen PKRL
- b. Membahas/menelaah/mengevaluasi dokumen pelayanan publik
- c. Penyiapan/penyusunan bahan/konsep/dokumen pelayanan publik yang diselesaikan dengan ketentuan dalam kurun waktu 1 tahun sebagai capaian Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang diselesaikan sesuai ketentuan.

Teknik menghitung capaian ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah draf/review/dokumen pelayanan publik yang disusun}}{\text{Jumlah draf/review/dokumen pelayanan publik yang ditentukan}} \times 100\%$$

Capaian IK Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 51 Capaian IK Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 27		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan							
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	100	100	100	100	100	100	0	-	-

A. Capaian IK Tahun 2024

Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan pada tahun 2024 telah sesuai dengan targetnya (100%). Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan tersebut diperoleh melalui penyusunan dokumen yang terkait dengan rangkaian

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

1. Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 2. Laporan Penanganan Pengaduan;
 3. Laporan Pengendalian Gratifikasi;
 4. Laporan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; dan
 5. Laporan Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya Capaian Indikator Kegiatan (IK) Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang diselesaikan sesuai ketentuan pada Tahun 2024 sama dengan capaian tahun sebelumnya, yaitu 100%. Hal ini dikarenakan target dan capaiannya sama yakni 5 dokumen pelayanan publik.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL Tahun 2020-2024
Tidak ada target dan indikator Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan pada Renstra DJPKRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
- 1) Analisis Keberhasilan: Pelaksanaan IK ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain: (a) Komitmen pimpinan tertinggi untuk menciptakan terobosan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, (b). Adanya peran serta/partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (stakeholders) dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta (c). Tersedianya data dan informasi yang menunjang pemenuhan dokumen pelayanan publik
 - 2) Kendala: Tidak ada kendala dalam pelaksanaan IK ini karena pengumpulan data dukung dokumen pelayanan publik dapat terpenuhi
 - 3) Solusi: Alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mengantisipasi faktor hambatan atau masalah adalah mengupayakan ketersediaan data dan informasi yang menunjang pemenuhan dokumen pelayanan publik yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan melalui pendampingan dan koordinasi.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Indikator Kegiatan (IK) Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai

Ketentuan telah merealisasikan kegiatan dalam rangka pemenuhan dokumen pelayanan publik sesuai dengan alokasi anggaran Tahun 2024

F. Kegiatan Pendukung pada Tahun 2024.

Kegiatan pendukung IKU Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan pada Tahun 2024 telah dilakukan sebagai berikut:

1. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Kegiatan pendukung yang dilakukan pada Tahun 2024 dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Menuju WBK, adalah

- a. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Dan Ruang Laut melalui penetapan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (SK Dirjen PKRL) Nomor 7 Tahun 2024
- b. Pengajuan Unit Kerja lingkup Direktorat Jenderal PKRL yang Akan Dinilai Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)
- c. Seleksi Pemantauan Keberlanjutan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KKP Tahun 2024
- d. Hasil Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani untuk unit kerja lingkup Ditjen PKRL pada Tahun 2024 sebagaimana terlampir.
- e. Penyusunan Laporan Akhir Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Dan Ruang Laut.
- f. Penghargaan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Nasional dari Kemenpan RB untuk BPSPL Padang.



2. Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik

- a. Pembentukan Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Dan Ruang Laut Tahun 2024 melalui penetapan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (SK Dirjen PKRL) Nomor 6 Tahun
- b. Rapat Koordinasi Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
- c. Pendampingan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2024 untuk penyusunan proposal Inovasi Pelayanan Publik
- d. Pengusulan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut untuk diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Surat Nomor 1409/DJPKRL.1/TU.210/VII/2024
- e. Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik yang mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- f. Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik oleh Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik KKP pada penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Nota Dinas Sekjen KKP Nomor 3069/SJ.7/TU.210/VIII/2024 tanggal **14 Agustus 2024**, dengan Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL 84.26 dan Inovasi KADO SPESIAL dari LKKPN Pekanbaru mendapatkan Juara II Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2024 di Lingkungan KKP



- g. Evaluasi pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik
- h. Permintaan Usulan Penetapan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2024 melalui Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.5237/DJPKRL.1/TU.210/IX/2024 hal Permintaan Usulan Penetapan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2024
- i. Pembahasan SK Dirjen Tentang Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
- j. Penetapan Surat Keputusan Direktur Jenderal PKRL Nomor 64 Tahun 2024 **tanggal 30 Oktober 2024** tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
- k. Penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Dan Ruang Laut Tahun 2024.

Menindaklanjuti agenda KemenPANRB dalam rangka Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi (PKRI) Pelayanan Publik, Ditjen PKRL telah melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Inovasi pelayanan publik Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang telah memperoleh predikat Top Inovasi dan diwajibkan mengikuti PKRI pada Tahun 2024 adalah PUGaR (Pengembangan Usaha Garam Rakyat) dari

Direktorat Jasa Kelautan (Top 45 Tahun 2020) dan KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi) LPPL Ampiang Parak dari Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang (Top 99 Tahun 2022);

- b. Penilaian Presentasi dan Wawancara Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi (PKRI) Tahun 2024 untuk inovasi PUGaR (Pengembangan Usaha Garam Rakyat) oleh Tim Penilai Independen (TPI) Kemen PANRB;
- c. Hasil penilaian *desk evaluation* proposal inovasi Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PuGar) 96,41 dan presentasi wawancara 96,50 dengan rata-rata nilai total adalah 96,47 dan memperoleh Predikat 5 Terbaik Inovasi Kelompok Berkelanjutan berdasarkan Pengumuman Kemen PANRB Nomor B/536/PP.00.05/2024;



- d. Penyebarluasan Inovasi KOMPAK Plus;
- e. Penandatanganan Komitmen Replikasi Inovasi KOMPAK.

3. Penanganan Pengaduan

- a. pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I Dan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Dan Ruang Laut melalui penetapan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (SK Dirjen PKRL) Nomor 4 Tahun 2024
- b. Rekonsiliasi Tim Penanganan Pengaduan Ditjen PKRL sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 4 Tahun 2024 pada tanggal 16 Mei 2024 dalam rangka memberikan pemahaman dan persepsi yang sama dalam hal menangani pengaduan yang masuk melalui berbagai macam saluran pengaduan lingkup Ditjen PKRL

- c. Penanganan pengaduan yang masuk melalui tatap muka, whatsapp, e-mail, Surat dan Website LAPOR dengan rekapitulasi penanganan pengaduan lingkup Ditjen PKRL pada Tahun 2024 disajikan pada diagram berikut ini:



- d. Penghargaan diberikan kepada LPSPL Serang sebagai Unit Penanganan Pengaduan Terbaik Tahun 2024 dari Menteri Kelautan dan Perikanan, penghargaan tersebut diberikan pada tanggal 12 Desember 2024 bertepatan dengan perayaan puncak Hari Anti Korupsi Sedunia.



4. Pengendalian Gratifikasi

- Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Dan Ruang Laut melalui penetapan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (SK Dirjen PKRL) Nomor 5 Tahun 2024
- Penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor: B-397/DJPKRL/TU.210/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 tentang Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di

Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

- c. Publikasi Pengendalian Gratifikasi dalam rangkaian Hari Anti Korupsi Sedunia di Media Sosial pada Periode Desember 2024.
- d. Pelaksanaan Hari Anti Korupsi Sedunia pada tanggal 12 Desember 2024
- e. Penghargaan diberikan kepada BPSPL Pontianak dan BPSPL Makassar sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi Terbaik Tahun 2024 dari Menteri Kelautan dan Perikanan, penghargaan tersebut diberikan pada tanggal 12 Desember 2024 bertepatan dengan perayaan puncak Hari Anti Korupsi Sedunia.



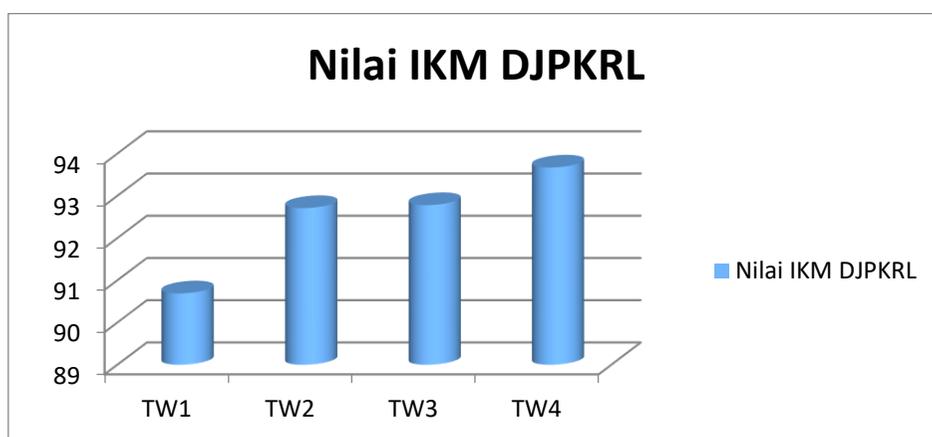
5. Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL

- a. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan DJPKRL dilaksanakan setiap Triwulan, dengan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat pada masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan Publik lingkup Ditjen PKRL pada Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 52 Hasil IKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik lingkup DJPKRL pada Tahun 2024

No	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	TW1	TW2	TW3	TW4
1	Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	94.00	92.78	89.70	94.62

No	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	TW1	TW2	TW3	TW4
2	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100.00	100.00	95.14	93.33
3	Direktorat Jasa Kelautan	100.00	90.06	92.59	89.44
4	Direktorat Penataan Ruang Laut	79.29	82.75	79.97	80.05
5	BKKPN Kupang	94.70	95.23	95.45	94.19
6	LKKPN Pekanbaru	96.53	99.31	97.82	99.02
7	BPSPL Padang	95.30	95.08	95.70	96.80
8	BPSPL Denpasar	87.88	83.06	89.90	95.40
9	BPSPL Pontianak	95.38	95.94	95.59	98.48
10	BPSPL Makassar	92.68	94.82	94.34	93.10
11	LPSPL Serang	90.67	92.59	94.10	94.67
12	LPSPL Sorong	93.33	94.25	91.94	95.83
	Ditjen PKRL	90.69	92.71	92.78	93,67



Gambar 19 Diagram Hasil SKM UPP lingkup DJPKRL Tahun 2024

Pada tahun 2024, telah dilaksanakan SKM setiap Triwulan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) untuk setiap layanan sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan diperoleh nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DJPKRL sebesar 92,46 dan mengalami peningkatan Nilai IKM setiap Triwulan dengan nilai rata-rata IKM tertinggi adalah LKKPN Pekanbaru dan terendah adalah Direktorat Penataan Ruang Laut;

- b. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik DJPKRL Tahun 2024.

BPSPL Pontianak menjadi Unit Lokus Evaluasi (ULE) Predikat Pelayanan Prima pada PEKPPP Nasional Tahun 2024 (perwakilan tunggal KKP) dan memperoleh nilai Pelayanan Publik sebesar 4,80 dengan kategori Pelayanan Prima berdasarkan Surat Keputusan Menteri PAN RB Nomor 489 Tahun 2024 tentang Hasil PEKPPP di Kementerian dan Lembaga Tahun 2024 dan mendapatkan Penghargaan atas Lokus penilaian terbaik sebagai 10 Terbaik Kelompok Kementerian pada PEKPPP Tahun 2024 dengan Predikat “Pelayanan Prima”.



c. Bimbingan Teknis

- 1) Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2024 dengan narasumber dari Deputi Bidang Pelayanan Publik, KemenPANRB dan Pusat Data, Statistik dan Informasi KKP
- 2) Pelatihan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia Tingkat Terampil yang dilaksanakan pada tanggal 20-22 Maret 2024 dengan narasumber dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia yang bekerjasama dengan Perhimpunan Penterjemah Isyarat Bahasa SIBI
- 3) Bimbingan Teknis Pemahaman ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang dilaksanakan pada tanggal 25-26 Maret 2024 dengan narasumber dari PT *Quality Assurance Indonesia* (QAI)
- 4) *Bimbingan Teknis Budaya Pelayanan Prima* bagi pegawai yang menangani pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) pada tanggal 15 Mei 2024 dengan narasumber dari *The Bridge Academy*.

d. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan

- 1) *Forum Pelayanan Perizinan Pengelolaan Ruang Laut pada tanggal 14 Mei 2024 dalam rangka mewujudkan pelayanan prima berdasarkan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.*
- 2) Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada-tahun 2024, yaitu:

Bulan	Konsultasi	Verifikasi Dokumen	Penerimaan Dokumen	Penyerahan Dokumen
Januari	205	0	0	16
Februari	173	0	0	8
Maret	236	0	67	8
April	147	0	87	75
Mei	188	0	5	10
Juni	160	0	1	2
Juli	200	0	4	5
Agustus	172	0	70	8
September	130	0	1	2
Oktober	157	0	0	7
November	140	0	1	1
Desember	148	0	0	2

G. Rencana Aksi Tahun 2025

1. Pendampingan dan pemantauan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
2. Sosialisasi dan Studi Tiru Keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
3. Pendampingan dan Penilaian Pelaksanaan Inovasi
4. Bimbingan Teknis mendukung Penyelenggaraan Pelayanan Prima
5. Pelaksanaan dan Monev SKM
6. Fasilitasi dan Monev FKP
7. Monev Standar Pelayanan

8. Penanganan Pengaduan
9. Pengendalian Gratifikasi
10. Pemutakhiran Data dan Informasi Sistem Informasi Pelayanan Publik
11. Dukungan dan Monev Pelayanan Publik Ditjen PKRL di PTSA
12. Dukungan Penilaian PEKPPP.

IK 28. Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN

Sesuai PMK Nomor 248/PMK.07/2010 menyatakan bahwa setiap satker/UAKPA diwajibkan menyampaikan laporan keuangan meliputi ADK, LRA, dan neraca ke UAKPA E1 di setiap bulannya. Dengan demikian setiap satker melakukan kegiatan penyusunan laporan keuangan dan barang untuk mendukung kelancaran administrasi lingkup Ditjen PKRL. Upaya yang dilakukan meliputi inventarisasi dan penilaian. Inventarisasi yaitu membandingkan antara dokumen sumber, fisik aset, dan pelaporan sedangkan Penilaian yaitu penyesuaian nilai perolehan aset dengan kondisi aset sebenarnya/saat ini.

Tujuan inventarisasi fisik BMN adalah untuk memperoleh keyakinan atas keabsahan, kelengkapan, keandalan dan keakuratan dokumen atas pencatatan BMN melalui pelaksanaan inventarisasi fisik BMN. Dalam hal ini inventarisasi terkait penghibahan dan penghapusan aset menurut PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara dan Nomor 10.4/PMK.06/ 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011.

Dalam hal mendukung ketepatan pelaporan keuangan dan BMN, dilakukan pengukuran Ketepatan Pencatatan Transaksi kode akun 6 digit pada Aplikasi Keuangan ditingkat Eselon 2/Wilayah/Satker PKRL/07 dibandingkan dengan Aplikasi Barang Milik Negara di tingkat Eselon 2/Wilayah/Satker PKRL/07 termasuk didalamnya pada aplikasi data Persediaan. Pengukuran ini dilaksanakan pada periode Semesteran dan Tahunan. Data yang dipersamakan adalah neraca percobaan pada aplikasi SAIBA dibandingkan dengan Neraca pada aplikasi SIMAK-BMN.

Presentase ketepatan penyampaian laporan Keuangan dan BMN dihitung dengan:

$$\frac{\text{Jumlah satker yang tepat waktu menyampaikan laporan}}{\text{Jumlah satker lingkup DJPKRL}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Capaian Semester I dihitung berdasarkan Laporan Keuangan dan BMN Tahun Anggaran 2023
2. Capaian Semester III dihitung berdasarkan Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun Anggaran 2024.

Capaian IK Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 53 Capaian IK Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN Tahun 2024

SK – 1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL					
IK – 28				Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
100	100	100	100	100	100	100	-	-	-

A. Capaian IK Tahun 2024

Pada tahun 2024 capaian indikator kinerja persentase ketetapan penyampaian laporan keuangan dan BMN sebesar 100%. Capaian pada indikator ini berhasil mancapai target tahun 2024 yaitu sebesar 100%, yang diperoleh dari laporan keuangan yang disampaikan pada Aplikasi MONSAKTI.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya

Capaian ketetapan penyampaian laporan keuangan dan BMN pada Tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya yakni sebanyak 100%.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL Tahun 2020-2024

Target dan Indikator Kinerja Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN tidak terdapat di Renstra DJPKRL Tahun 2020-2024.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

a. Kendala:

1. Terdapat BMN berupa tanah milik Setditjen PKRL yang belum bersertifikat;
2. Terdapat BMN yang belum diajukan PSP (Penetapan Status Penggunaan);
3. Masih rendahnya pengamanan aset berupa tanah di PPKT

4. Belum disepakatinya perjanjian penggunaan BMN antara KKP dengan Sekretariat Regional CTI-CFF.
- b. Solusi:
1. Agar Sekretariat meningkatkan pengamanan aset melalui pembuatan pagar dan papan plang di tanah PPKT; dan
 2. Mempercepat penandatanganan perjanjian penggunaan BMN gedung Sekretariat Regional CTI-CFF.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Analisis atas Efisiensi Penggunaan sumber daya dalam pencapaian IK ini dapat dilihat dari terlaksananya kegiatan yang mendukung pemenuhan laporan keuangan BMN tahun 2024. Kegiatan pada Triwulan IV Tahun 2024 telah dilaksanakan baik secara daring (online) maupun luring (offline).
- F. Kegiatan Pendukung
1. Rekonsiliasi SAKTI Satker lingkup Ditjen PKRL dengan UAPPA-E1 Periode Triwulan III TA. 2024
 2. Monitoring dan Evaluasi SAKTI Satker Lingkung DJPKRL
- G. Rencana Aksi Tahun 2025
1. Pembahasan Naskah Perjanjian dan BAST Penggunaan Gedung Sekretariat regional CTI-CFF di Manado;
 2. Pelaksanaan PSP (Penetapan Status Penggunaan) BMN;
 3. Penghapusan BMN yang kondisinya rusak berat;
 4. Penginputan BMN BMKT ke Aplikasi SIMAN

IK 29. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Setditjen PKRL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang mampu mendukung program reformasi birokrasi maka perlu melakukan upaya peningkatan kualitas pengelolaan persuratan dan kearsipan meliputi kewajiban Implementasi Tata Naskah Dinas, Kode Klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip serta Sistem Keamanan dan Hak Akses sesuai ketentuan.

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam

menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal
Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:
 - a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
 - b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana
2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif
Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.
3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal
Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Teknik Menghitung:

1. Nilai pengawasan kearsipan lingkup Setditjen PKRL akan diukur Tim Pengawas Kearsipan Internal KKP yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan lingkup Setditjen PKRL = Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal Unit Pengolah.
4. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Capaian IK Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 54 Capaian IK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024

SK – 1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL						
IK – 29				Nilai Pengawasan Kearsipan Internal						
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	-	91,51	95,65	80	97,55	120	1,90	-	-	

A. Capaian IK Tahun 2024

Pada tahun 2024, berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian oleh tim penilai pada tanggal 5-7 Juni 2024, Setditjen PKRL memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Internal sebesar 97,55 yang termasuk kategori AA (sangat memuaskan) yang artinya telah melebihi target (80). Nilai tersebut tercantum dalam lampiran Nota Dinas Kepala Biro Umum dan PBJ Nomor 2258/SJ.6/TU.220/IX/2024, tanggal 24 September 2024 tentang Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan Internal KKP Tahun 2024. Penilaian dilakukan terhadap 2 aspek utama penyelenggaraan kearsipan yaitu: Pengelolaan Arsip Dinamis (PAD) dan Sumber Daya Kearsipan (SDK).

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya

Capaian Indikator Kinerja pada tahun 2024 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 karena pada tahun 2024 terjadi peningkatan nilai aspek Sumber Daya Kearsipan (SDK) yang dipengaruhi oleh bertambahnya fungsional arsiparis dan sarana prasarana kearsipan. Pada tahun 2023 jumlah fungsional arsiparis hanya 2 arsiparis sedangkan pada tahun 2024 bertambah menjadi 4 arsiparis.

Tabel 55 Perbandingan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPKRL Tahun 2023 dan 2024

No	Aspek Penilaian	2022	2023	2024
1	Nilai Aspek PAD	46,91	49,49	49,35
2	Nilai Aspek SDK	48,65	46,17	48,20
	Hasil Penilaian	90,68	95,65	97,55

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL Tahun 2020-2024
Tidak terdapat di Renstra DJPKRL Tahun 2020-2024 karena IK ini merupakan IK baru di tahun 2022.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional Indikator kinerja ini tidak memiliki capaian yang dapat dibandingkan dengan Standar Nasional namun Capaian Kinerja IK ini dapat dibandingkan dengan Unit Kerja Level 2 lainnya dalam lingkup DJPKRL seperti Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, Direktorat Penataan Ruang Laut, Direktorat Konservasi dan Biota Perairan, serta Direktorat Jasa Kelautan. Perbandingan Capaian Kinerja indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 56. Tabel Capaian Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal

Unit Kerja	Nilai Aspek PAD	Nilai Aspek SDK	Total	Kategori
Dit. Jasa Kelautan	48,65	48,12	96,78	AA (Sangat Memuaskan)
Setditjen PKRL	49,35	48,20	97,55	AA (Sangat Memuaskan)
Dit. P4K	48,99	47,75	96,74	AA (Sangat Memuaskan)
Dit. PRL	46,97	45,48	92,45	AA (Sangat Memuaskan)
Dit. KEBP	49,67	46,24	95,91	AA (Sangat Memuaskan)

Berdasarkan perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal dapat disimpulkan bahwa capaian Setditjen PKRL terbesar jika dibandingkan dengan Unit Kerja Level 2 lainnya lingkup DJPKRL yakni sebesar 97,55 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan). Hal ini didukung dengan telah dilakukannya optimalisasi pengelolaan kearsipan lingkup Setditjen PKRL.

- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
- a. Kendala:
1. Pada pemantauan penciptaan arsip tahun 2024 teridentifikasi bahwa belum semua tim kerja menggunakan format tata naskah dinas sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP.

2. Dari 4 Arsiparis baru 1 yang sudah mengikuti pengembangan SDM Kearsipan sehingga Nilai Aspek SDK belum maksimal
- b. Solusi:
1. Pembuatan format naskah dinas dan pelatihan penggunaan format tata naskah dinas sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP kepada seluruh unit kerja di lingkungan DJPKRL.
 2. Arsiparis mengikuti Diklat Kearsipan yang diselenggarakan oleh ANRI.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Nilai Pengawasan Kearsipan Internal bersumber dari penilaian tim pengawas terhadap pengelolaan kearsipan dan ketersediaan sumber daya oleh masing-masing unit kerja. Untuk optimalisasi pengelolaan kearsipan lingkup Setditjen PKRL, saat ini telah terdapat 4 arsiparis dan 2 orang pengelola arsip yang mengelola persuratan. Selain itu, pencapaian kinerja juga didukung oleh penggunaan sarana pendukung berupa perangkat lunak yang cukup membantu termasuk aplikasi portal korespondensi KKP yang telah difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- G. Kegiatan Pendukung pada Tahun 2024
1. Persiapan Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Pusat dan UPT;
 2. Verifikasi Data Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Kantor Pusat Selaku Unit Pengolah Tahun 2024;
 3. Rapat Tertib Administrasi Sesuai Tata Naskah Dinas Permen KP Nomor 42 Tahun 2022;
 4. Rapat Persiapan Penilaian Pengawasan Kearsipan Satker UPT Tahap I;
 5. Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup UPT Tahap I Tahun 2024;
 6. Bimbingan Teknis Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
 7. Rapat Persiapan Penilaian Pengawasan Kearsipan Satker UPT Tahap II;
 8. Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup UPT Tahap I Tahun 2024;
 9. Rapat Pembahasan Arsip Terjaga Lingkup DJPKRL.
- H. Rencana Aksi Tahun 2025
1. Pelatihan Penciptaan Arsip sesuai Tata Naskah Dinas;

2. Pembuatan SOP Pemindahan arsip, Penataan Arsip, Pemusnahan Arsip; dan
3. Usul Musnah Arsip Inaktif Unit Kerja Pusat dan UPT Lingkup Ditjen PKRL.

IK 30. Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*).

Tujuan RB adalah Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan RB memiliki dua sasaran utama yakni RB General dan RB Tematik.

Dokumen RB adalah dokumen yang terkait dengan rangkaian kegiatan dalam rangka melaksanakan RB General dan RB Tematik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Dokumen RB terdiri dari:

1. Dokumen rencana kerja RB general
2. Dokumen rencana kerja RB Tematik
2. Dokumen monitoring RB General
3. Dokumen monitoring RB Tematik

Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{jumlah dokumen RB yang diselesaikan}}{\text{jumlah dokumen RB yang ditentukan}} \times 100\%$$

Capaian IK Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 57 Capaian IK Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Tahun 2024

SK – 1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL					
IK – 30				Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan					
Realisasi Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	-	100	100	100	-	-	-

A. Capaian IK Tahun 2024

Pada Tahun 2024 telah tercapai 100% target pengumpulan dokumen Reformasi Birokrasi (4 dokumen) yang terbagi dalam Dimensi Reformasi Birokrasi General dan Dimensi Reformasi Birokrasi Tematik. Indikator capaian pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi terdiri dari:

Tabel 58 Indikator Reformasi Birokrasi General

No.	Indikator
1	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi
2	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
3	Indeks SPBE
4	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE
5	Indeks Perencanaan Pembangunan
6	Nilai SAKIP
7	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
8	Tingkat Maturitas SPIP
9	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan
10	Survei Penilaian Integritas (SPI)
11	Indeks Kualitas Kebijakan
12	Indeks Reformasi Hukum

No.	Indikator
13	Tingkat Digitalisasi Arsip
14	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
15	Indeks Tata Kelola Pengadaan
16	Opini BPK
17	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
18	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
19	Indeks Pengelolaan Aset
20	Indeks Sistem Merit
21	Indeks BerAKHLAK
22	Survei Kepuasan Masyarakat
23	Indeks Pelayanan Publik
24	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Tabel 59 Indikator Reformasi Birokrasi Tematik

No.	Indikator
1	Pengentasan Kemiskinan: Nilai Tukar Petambak Garam

Data dukung dokumen pemenuhan RB terlampir pada pranala <https://bit.ly/RBDJPKRL24>.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya
Capaian Kinerja Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2024 yang mengalami perubahan nomenklatur IK tahun 2023, yang sebelumnya “IK Nilai PMPRB” menjadi IK “Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan”.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL Tahun 2020-2024

IK ini tidak terdapat pada Renstra DJPKRL Tahun 2020-2024 sehingga capaian kinerja IK ini tidak dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Renstra DJPKRL Tahun 2020-2024.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Pelaksanaan RB General DJPKRL Tahun 2024 telah dilakukan oleh masing-masing penanggungjawab pada Eselon II sebagaimana dokumen RB yang telah terpenuhi.

Pelaksanaan RB Tematik DJPKRL Tahun 2024 telah dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. Penyusunan Data Usaha Garam Tahun 2024 pada 10 Provinsi dan 57 Kabupaten;
- b. Pemutakhiran Data Produksi Garam Tahun 2024 pada 10 Provinsi;
- c. Verifikasi dan deliniasi dalam rangka penyusunan Informasi Geospasial (IG) Lahan Garam pada Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Timur.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi terhadap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui koordinasi dengan Direktorat di lingkup DJPKRL dan antar Tim Kerja di lingkup Setditjen PKRL.

F. Kegiatan Pendukung pada Tahun 2024

1. Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi General Tahun 2024;
2. Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2024;
3. Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Tahun 2024;
4. Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2024.

G. Rencana Aksi Tahun 2025

Pada Tahun 2025 akan dilakukan:

1. Pendampingan dan pemantauan pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi General pada seluruh Tim Kerja penanggungjawab Indikator RB;
2. Pendampingan dan pemantauan pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi Tematik pada seluruh Tim Kerja penanggungjawab Indikator RB;
3. Fasilitasi pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi General dan Tematik.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran kegiatan yang mendukung kinerja Setditjen PKRL tercantum dalam Rencana Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PKRL. Pagu anggaran Efektif di Lingkup Setditjen PKRL Tahun 2024 adalah Rp117.284.782.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab Setditjen PKRL).

Pada tahun 2024 terdapat 6 kali revisi pagu anggaran, dimana pagu awal Rp116.069.367.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab Setditjen PKRL) dengan adanya blokir/bintang (*) pagu anggaran menjadi Rp112.337.367.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab Setditjen PKRL).

1. Revisi pertama (revisi lepas blokir terkait SEB Clearance dan penambahan blokir AA) pagu sebesar Rp116.069.367.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab Setditjen PKRL) dengan adanya blokir/bintang (*) pagu anggaran menjadi Rp113.339.430.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab Setditjen PKRL).
2. Revisi kedua (revisi lepas blokir renovasi Warehouse BMKT dan penyediaan sistem pendataan) pagu sebesar Rp116.069.367.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab Setditjen PKRL) dengan adanya blokir/bintang (*) pagu anggaran menjadi Rp115.540.308.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab Setditjen PKRL).
3. Revisi ketiga (revisi penambahan anggaran PLN Lautra) pagu sebesar Rp123.006.721.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab Setditjen PKRL) dengan adanya blokir/bintang (*) pagu anggaran menjadi Rp122.227.222.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab Setditjen PKRL).
4. Revisi keempat (revisi kekurangan belanja pegawai dan pergeseran anggaran ke UPT BKKPN Kupang untuk perbaikan Torn air bersih) pagu sebesar Rp121.825.181.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab Setditjen PKRL) dengan adanya blokir/bintang (*) pagu anggaran menjadi Rp121.045.862.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab Setditjen PKRL).
5. Revisi kelima (revisi blokir penghematan belanja perjalanan dinas) pagu sebesar Rp121.825.181.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab Setditjen PKRL) dengan adanya blokir/bintang (*) pagu

anggaran menjadi Rp117.284.782.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab Setditjen PKRL).

6. Revisi keenam (revisi kekurangan belanja pegawai) pagu sebesar Rp121.825.181.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab Setditjen PKRL) dengan adanya blokir/bintang (*) pagu anggaran menjadi Rp117.284.782.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab Setditjen PKRL).

Berdasarkan Memorandum Nomor 74/DJPKRL.1/KU.520/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Prosentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL Triwulan IV Tahun 2024, data realisasi anggaran di lingkup Setditjen PKRL mencapai Rp111.271.420.305 atau 94,87%, rincian tercantum pada Tabel 43.

Realisasi anggaran tersebut telah mendukung pencapaian indikator kinerja Setditjen PKRL, yang ditandai dengan tercapainya target beberapa indikator pada Tahun 2024 dan beberapa indikator yang sudah berproses untuk pencapaian targetnya. Berikut rincian realisasi anggaran di lingkup Setditjen PKRL sampai dengan Tahun 2024.

Tabel 43 Realisasi Anggaran yang Mendukung Kinerja Setditjen PKRL

Komponen	Pagu Revisi	Realisasi	
		Realisasi	%
Manajemen proyek	6.961.419.000	3.485.989.286	50,08
Perangkat Pengolah Data dan Informasi Lingkup Satker Pusat Ditjen PKRL	970.000.000	832.550.840	85,83
Layanan BMN	1.212.063.000	1.174.447.437	96,9
Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	5.899.800.000	5.899.586.677	100
Layanan Kehumasan	2.571.705.000	2.561.632.308	99,61
Pelayanan Publik	209.582.000	208.799.455	99,63
Kerjasama	182.155.000	180.414.335	99,04
Layanan Organisasi dan Tata Laksana Lingkup Ditjen PKRL	3.499.144.000	3.456.522.880	98,78

Komponen	Pagu Revisi	Realisasi	
		Realisasi	%
Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	518.314.000	505.811.050	97,59
Layanan Rumah Tangga	2.170.772.000	2.097.796.050	96,64
Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	6.298.257.000	6.132.428.652	97,37
Gaji dan Tunjangan	58.927.436.000	58.704.233.661	99,62
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	8.471.759.000	7.618.996.832	89,93
Kendaraan Bermotor	555.300.000	555.200.000	99,98
Meubelair	980.360.000	945.302.550	96,42
Alat Pengolah Data dan Komunikasi	1.008.400.000	994.941.150	98,67
Gedung dan Bangunan	1.953.878.000	1.846.870.720	94,52
Layanan Manajemen SDM	2.607.211.000	2.586.878.596	99,22
Layanan Perencanaan Program dan Anggaran	4.983.760.000	4.499.256.275	90,28
Layanan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	2.661.635.000	2.403.991.042	90,32
Layanan Manajemen Keuangan	4.641.832.000	4.579.770.509	98,66
Total	117.284.782.000	111.271.420.305	94,87

Sumber: Aplikasi SAKTI, 2024

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Setditjen PKRL) Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Setditjen PKRL, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PKRL terdapat 30 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang termasuk dalam sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Setditjen PKRL. Pengukuran capaian kinerja Setditjen PKRL Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi pada masing-masing indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen PKR Tahun 2024 sebesar 106,26 (termasuk kriteria baik).

Pada tahun 2024 terdapat 28 indikator yang tercapai sesuai dan/atau melebihi target yakni:

- 1) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NPKA) Lingkup Setditjen PKRL tercapai 96,84 dari target 71;
- 2) Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setditjen PRL tercapai 88,85 dari target 88;
- 3) Nilai PM SAKIP DJPKRL tercapai 89,07 dari target 84;
- 4) Nilai PM SAKIP Lingkup Setditjen PRL tercapai 89,5 dari target 81;
- 5) Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL tercapai 3,73 dari target 3,3;
- 6) Laporan SPIP yang disusun Lingkup Setditjen PKRL tercapai sesuai target yakni 4 dokumen;
- 7) Persentase unit kerja Lingkup Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar sebanyak 133% dari target 94%;

- 8) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan tercapai 96,97% dari target 80%;
- 9) Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Setditjen PRL telah tercapai sesuai target yakni 100%;
- 10) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup DJPKRL tercapai 87,76 dari target 80;
- 11) Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup DJPKRL telah tercapai 100 dari target 80;
- 12) Persentase Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL telah tercapai sesuai target yakni 100%;
- 13) Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tercapai sesuai target yakni 100%;
- 14) Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut telah tercapai sesuai target 100%;
- 15) Informasi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Dikelola dan Dipublikasikan sebanyak 2.830 dari target 2.160 informasi;
- 16) Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti tercapai sesuai targetnya yakni 100%;
- 17) Nilai keterbukaan informasi publik tercapai 100 dari target 90;
- 18) Presentase Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA Lingkup DJPKRL Ditindaklanjuti tercapai sesuai targetnya yakni 100%;
- 19) Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi Lingkup DJPKRL tercapai sesuai targetnya yakni 100%;
- 20) Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi Lingkup DJPKRL tercapai sesuai targetnya yakni 100%;
- 21) Persentase Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan tercapai sesuai targetnya yakni 100%;
- 22) Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati tercapai 100 dari target 90;
- 23) Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang disusun tercapai sesuai targetnya yakni 100%;
- 24) Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang Telah Disepakati tercapai 82,5% dari target 75%;
- 25) Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan tercapai sesuai targetnya yakni 100%;
- 26) Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN tercapai sesuai targetnya yakni 100%;

- 27) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Setditjen PRL tercapai 97,55 dari target 80;
- 28) Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan sesuai ketentuan tercapai sesuai targetnya yakni 100%.

Selain itu, 2 indikator lainnya yang belum mencapai target, yakni:

- 29) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Setditjen PRL tercapai 85,67 dari target 93,76; dan
- 30) Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Setditjen PRL tercapai 94,87 dari target 95.

Pagu anggaran di Lingkup Setditjen PKRL Tahun 2024 adalah Rp117.284.782.000 dengan realisasi mencapai Rp111.271.420.305 atau 94,87%. Realisasi anggaran tersebut telah mendukung pencapaian indikator kinerja Setditjen PKRL pada tahun 2024.

Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program / kegiatan Tahun 2024 terdapat beberapa tantangan antara lain:

- 1) Rendahnya aspek penilaian pada Deviasi Halaman III DIPA karena ketidaksesuaian perencanaan dan realisasi anggaran
- 2) Tidak terlaksananya beberapa kegiatan pada proyek Ocean for Prosperity-LAUTRA karena tambahan Anggaran dari PHLN Lautra pada akhir periode Triwulan III TA. 2024 dan keterbatasan waktu pelaksanaan
- 3) Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah masih terkendala pada Pengajuan Pembayaran Revolving UP
- 4) Masih rendahnya pengamanan aset berupa tanah di PPKT dan belum disepakatinya perjanjian penggunaan BMN antara KKP dengan Sekretariat Regional CTI-CFF.

4.2 Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja Setditjen PKRL ke depan, terdapat rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

- 1) Perlu dilakukan pemantauan rutin untuk memastikan kesesuaian perencanaan penarikan dana dengan realisasi kegiatan, terutama jika terdapat penambahan pagu anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai dengan perencanaan waktu pelaksanaan.
- 2) Mengusulkan kembali kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun 2024 selama kegiatan tersebut masih relevan dengan pencapaian kegiatan.
- 3) Mengoptimalkan pembayaran belanja kegiatan, salah satunya dengan menggunakan metode pembayaran Langsung (LS)

- 4) Meningkatkan pengamanan dan penggunaan aset BMN, antara lain melalui pembuatan pagar dan papan plang di tanah PPKT dan penandatanganan penandatanganan penjanjian penggunaan BMN gedung Sekretariat Regional CTI-CFF.

4.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Periode Sebelumnya

Pada Triwulan I, II dan III Tahun 2024 terdapat beberapa rekomendasi terhadap perbaikan kinerja ke depan dan telah ditindaklanjuti, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 60 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan dari Laporan Kinerja Setditjen PKRL Tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tautan Data Dukung
Triwulan I Tahun 2024			
1.	Penyusunan RPD harus memperhatikan pola tahun sebelumnya dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan tersebut	Telah dilakukan penyesuaian RPD dengan realisasi anggaran, yang dibuktikan dengan Halaman III DIPA	bit.ly/TLLKjSetditjenPKRL2024
2.	Mempercepat pertanggungjawaban dan laporan keuangan dengan tepat waktu	Telah disampaikan pertanggungjawaban dan laporan keuangan secara tepat waktu, yang dibuktikan dengan Karwas UP dan SHR	bit.ly/TLLKjSetditjenPKRL2024
2.	Memastikan ketersediaan dana dapat dilakukan dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dan metode pembayaran langsung (LS).	Telah dilakukan pencairan dana melalui UP KKP dan LS	bit.ly/TLLKjSetditjenPKRL2024
3.	Koordinasi secara berkala dengan penanggung jawab terkait tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal agar rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu. Pertemuan koordinasi dilaksanakan sebelum Itjen melakukan pemantauan tindak lanjut	Telah dilakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawab terkait tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal	bit.ly/TLLKjSetditjenPKRL2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tautan Data Dukung
	pengawasan. Selain itu, Setditjen PKRL perlu berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk penyamaan dokumen yang harus disiapkan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Jenderal KKP.		
4.	Sosialisasi penggunaan format tata naskah dinas sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP kepada seluruh unit kerja di lingkungan DJPKRL	Akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024	bit.ly/TLLKjSetditjenPKRL2024
Triwulan II Tahun 2024			
1.	Melakukan proses revisi buka blokir dan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dalam periode Tahun Anggaran 2024 yang tersisa	Telah dilakukan buka blokir pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp1.130.600.000	bit.ly/TLLKjSetditjenPKRL2024
2.	Mengoptimalkan pembayaran belanja dengan menggunakan metode LS	Telah dilakukan pembayaran kegiatan dengan mekanisme LS	bit.ly/TLLKjSetditjenPKRL2024
3.	Direktorat P4K perlu mengusulkan penambahan pejabat pengadaan setelah dilakukan pemetaan terlebih dahulu paket-paket pekerjaan yang belum berjalan. Pengusulan penambahan pejabat pengadaan disampaikan kepada Biro Umum dan PBJ	Direktorat P4K sudah mengusulkan penambahan pejabat pengadaan kepada Kepala Biro Umum dan PBJ. Kepala Biro Umum dan PBJ sudah menugaskan tambahan 2 orang pejabat pengadaan untuk Direktorat P4K	bit.ly/TLLKjSetditjenPKRL2024
4.	Direktorat PRL perlu menyampaikan dokumen terkait pengadaan barang dan jasa MSU ke LKPP	Direktorat PRL telah menyampaikan dokumen terkait pengadaan barang dan jasa MSU ke LKPP	bit.ly/TLLKjSetditjenPKRL2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tautan Data Dukung
5.	Perubahan mekanisme pengadaan untuk mempercepat pengadaan rehabilitasi Warehouse BMKT Cileungsi, yang semula pengadaannya melalui tender perlu diubah menjadi e-catalogue. Sedangkan pekerjaan pengawasan rehabilitasi Warehouse BMKT Cileungsi dilakukan melalui pengadaan langsung	Perubahan mekanisme pengadaan untuk mempercepat pengadaan rehabilitasi Warehouse BMKT Cileungsi, yang semula pengadaannya melalui tender sudah diubah menjadi e-catalogue. Sedangkan pekerjaan pengawasan rehabilitasi Warehouse BMKT Cileungsi dilakukan melalui pengadaan langsung	bit.ly/TLLKjSetditjenPKRL2024
6.	Mengadakan rapat dengan Pembantu Kuasa Pengguna Barang Direktorat P4K terkait Pengamanan Aset berupa Tanah PPKT dan menyusun Memorandum kepada Pembantu Kuasa Pengguna Barang Direktorat Jasa Kelautan berupa Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi BMN Pulau Cemara	Rapat dengan Pembantu Kuasa Pengguna Barang Direktorat P4K terkait Pengamanan Aset berupa Tanah PPKT akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024. Memorandum Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi BMN Pulau Cemara telah disampaikan kepada kepada Pembantu Kuasa Pengguna Barang Direktorat Jasa Kelautan dan telah dilakukan penginputan di aplikasi SAKTI Modul Aset	bit.ly/TLLKjSetditjenPKRL2024
Triwulan III Tahun 2024			
1.	Melakukan revisi DIPA dengan menghilangkan alokasi anggaran yang diblokir	Tidak dilakukan revisi DIPA karena data dukung untuk melakukan buka blokir tidak dapat dipenuhi, khususnya data dukung yang melibatkan kementerian lain	bit.ly/TLLKjSetditjenPKRL2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tautan Data Dukung
2.	Pelaksanaan pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana diupayakan sesuai jadwal dan diselesaikan pada Triwulan IV Tahun 2024	Pengadaan sarana dan prasarana telah diselesaikan pada Triwulan IV Tahun 2024	bit.ly/TLLKjSetditjenPKRL2024
3.	Mengusulkan revisi tupoksi KKP agar ada tuisi pengelolaan tanah sehingga KKP bisa menerbitkan HPL (Hak Pengelolaan Lahan) dan Meningkatkan pengamanan aset melalui pembuatan pagar dan papan plang tanah di PPKT	Tidak jadi diusulkan revisi tupoksi KKP untuk tuisi pengelolaan tanah dalam pengurusan sertipikat ke BPN setempat, akan tetapi BPN mengeluarkan/menerbitkan sertipikat tanah LUSI dengan status hak pakai. Pengamanan aset belum dilakukan karena terkendala faktor cuaca.	bit.ly/TLLKjSetditjenPKRL2024

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprf@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Kusdiantoro**

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

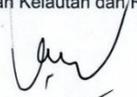
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut


Kusdiantoro

**Gambar 20 Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PRL	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Setditjen PRL (Nilai)	93,76
		2. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Setditjen PRL (%)	95
		3. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Setditjen PRL (Nilai)	86
		4. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setditjen PRL (Indeks)	88
		5. Nilai PM SAKIP DJPKRL (Nilai)	84
		6. Nilai PM SAKIP Lingkup Setditjen PRL (Nilai)	81
		7. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai)	3,3
		8. Laporan SPIP yang disusun Lingkup Setditjen PRL (Dokumen)	4
		9. Persentase unit kerja Lingkup Setditjen PRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PRL yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80
		11. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Setditjen PRL (%)	100
		12. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup DJPKRL (%)	80
		13. Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup DJPKRL (%)	80
		14. Persentase Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL (%)	100
		15. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (%)	100

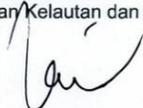
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	16. Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (%)	100
	17. Informasi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Dikelola dan Dipublikasikan (Informasi)	2160
	18. Persentase Permohonan Informasi Publik yang ditindaklanjuti (%)	100
	19. Nilai keterbukaan informasi publik (nilai)	90
	20. Persentase Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA Lingkup DJPKRL (%)	100
	21. Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi Lingkup DJPKRL (%)	100
	22. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi Lingkup DJPKRL (%)	100
	23. Persentase Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan (%)	100
	24. Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati (%)	90
	25. Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang disusun (%)	100
	26. Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang Telah Disepakati (%)	75
	27. Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan (%)	100
	28. Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN (%)	100
	29. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Setditjen PRL (nilai)	80
	30. Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan sesuai ketentuan (%)	100

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	116.069.367.000
Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2024		116.069.367.000

Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Kusdiantoro



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespriditjenprl@kko.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
DAN RUANG LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Kusdiantoro**

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Kusdiantoro

**Gambar 21 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024 (Revisi)**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
DAN RUANG LAUT

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL	1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Setditjen PKRL (Nilai)	93,76
		2.	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Setditjen PRL (%)	95
		3.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NPKA) Lingkup Setditjen PKRL (Nilai)	71
		4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setditjen PKRL (Indeks)	88
		5.	Nilai PM SAKIP DJPKRL (Nilai)	84
		6.	Nilai PM SAKIP Lingkup Setditjen PKRL (Nilai)	81
		7.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai)	3,3
		8.	Laporan SPIP yang disusun Lingkup Setditjen PKRL (Dokumen)	4
		9.	Persentase unit kerja Lingkup Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80
		11.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Setditjen PKRL (%)	100
		12.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup DJPKRL (%)	80
		13.	Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup DJPKRL (%)	80
		14.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL (%)	100
		15.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-	100

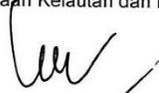
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (%)	
		16. Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (%)	100
		17. Informasi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Dikelola dan Dipublikasikan (Informasi)	2160
		18. Persentase Permohonan Informasi Publik yang ditindaklanjuti (%)	100
		19. Nilai keterbukaan informasi publik (nilai)	90
		20. Persentase Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA Lingkup DJPKRL (%)	100
		21. Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi Lingkup DJPKRL (%)	100
		22. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi Lingkup DJPKRL (%)	100
		23. Persentase Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan (%)	100
		24. Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati (%)	90
		25. Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang disusun (%)	100
		26. Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang Telah Disepakati (%)	75
		27. Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan (%)	100
		28. Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN (%)	100
		29. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Setditjen PKRL (nilai)	80
		30. Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan sesuai ketentuan (%)	100

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	123.006.721.000
Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024		123.006.721.000

Jakarta, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



Kusdiantoro

Tabel 61 Daftar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang telah Terbit Tahun 2024

No	Instrumen Hukum
1.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Informasi Geospasial Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.
2.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 44 Tahun 2024 tentang Tim Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.
3.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Informasi Geospasial Habitat Bentik Laut Dangkal
4.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 46 Tahun 2024 tentang Tim Persiapan Indonesia <i>Coral Bond Project</i> di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.
5.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 47 Tahun 2024 tentang Pemangku Jabatan, Nomenklatur Jabatan, dan Kelas Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.
6.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Pembersihan Sedimentasi di Laut atas Usulan Pemerintah Daerah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024.
7.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 49 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
8.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 50 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pemberian Penghargaan dan Sanksi Kepada Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

No	Instrumen Hukum
9.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 51 tahun 2024 tentang Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Aplikasi Pemantauan dan Evaluasi Badan Perencana Pembangunan Nasional.
10.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 52 Tahun 2024 tentang Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024.
11.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 54 Tahun 2024 tentang Tim Implementasi Percontohan Pengembangan Kawasan Berbasis Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut Secara Berkelanjutan di Kabupaten Demak.
12.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 55 Tahun 2024 tentang Tim Pakar dalam Verifikasi Dokumen Permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi.
13.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 56 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Sinkronisasi dan Inventarisasi Lahan Garam
14.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020-2024.
15.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 65 Tahun 2024 tentang Tim Penilai Pelaksana Pelayanan Publik Teladan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.
16.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 66 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Produk Data Informasi Geospasial Tematik Sertifikasi Hak Atas Tanah di Pulau-Pulau Kecil Terluar Skala 1:50.000
17.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 67 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Produk Data Informasi Geospasial Tematik Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Skala 1:50.000.

No	Instrumen Hukum
18.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 68 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Produk Data Informasi Geospasial Tematik Pulau-Pulau Kecil Terluar Skala 1:50.000.
19.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 16 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024
20.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 70 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Produk Data Informasi Geospasial Tematik Abrasi dan Akresi.
21.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 71 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Kegiatan Penelitian, Pendidikan dan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Nasional
22.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 72 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024.

Tabel 62 Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti

No	Periode	Jumlah Permohonan Informasi	Tanggal Permohonan Informasi	Data yang Dimohonkan	Total Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan
1	Triwulan I	10	15 Januari 2024	Persyaratan KKPRL untuk kegiatan penggalian/penambangan batuan komoditas pasir laut	1	9	1	
2			16 Januari 2024	Persyaratan KKPRL untuk kegiatan penggalian/penambangan batuan komoditas pasir laut dengan KBLI 08014	1			
3			18 Januari 2024	Stok karbon di TWP Kabupaten Kepulauan Anambas	5			
4			19 Januari 2024	Informasi pemilik/operator KKPRL dan batas-batas koordinat di sepanjang koridor kabel yang akan dibangun oleh PT Mubadala	17			
5			24 Januari 2024	Rekapitulasi data ukuran panjang, lebar, dan berat ikan pari di PPI Paotere Makassar pada tahun 2019 - 2023	7			
6			28 Februari 2024	Naskah akademik PP No. 26 Tahun 2023	1			Keliru menyampaikan tujuan permohonan
7			20 Maret 2024	Naskah akademik PP No. 26 Tahun 2023	10			

No	Periode	Jumlah Permohonan Informasi	Tanggal Permohonan Informasi	Data yang Dimohonkan	Total Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan
8			22 Maret 2024	Jenis biota laut yang dilindungi, jumlah nelayan lokal, dan gambaran peta pesisir di Pulau Sumba, serta data alat tangkap sesuai dengan PP	6			
9			26 Maret 2024	Data terumbu karang (persentase cover terumbu karang, kesehatan karang, pertumbuhan karang, kualitas perairan, dan produksi ikan di TWP Gili Matra	17			
10			28 Maret 2024	Laporan hasil monitoring ekosistem pesisir dan sosial ekonomi di KK Laut Sawu dan KK Kepulauan Kapoposang	16			
11	Triwulan III	11	23 April 2024	data kunjungan wisata TWP Kepulauan Anambas	7	-	-	
12			26 April 2024	Data Lalu Lintas Ikan Capungan Banggai (BCF) di wilayah kerja BSPPL Makassar selama 2020-2023.	2			
13			2 Mei 2024	Data lalu lintas ikan Capungan Banggai (BCF) di Denpasar tahun 2020 sd 2023	7			
14			6 Mei 2024	Kondisi dan Strategi ketahanan maritim nasional, Masalah & guncangan yang dihadapi sektor kemaritiman, Kapabilitas dan Potensi yang dilakukan untuk mencapai ketahanan maritim	8			
15			6 Mei 2024	https://ppid.kkp.go.id/uploads/userReServices/1e4d7c44f439abdab53a9d53b64c815f.pdf	10			
16			16 Mei 2024	Kawasan Konservasi yang ada di Laut Banda (beserta luasan dan lokasi), Biota laut serta jenisnya yang ada di perairan Laut Banda (deskripsi dan gambar) serta persebarannya, Biota laut yang dikonservasi/dilindungi, Populasi dari biota laut, dan Gambar peta lokasi Kawasan konservasi	10			

No	Periode	Jumlah Permohonan Informasi	Tanggal Permohonan Informasi	Data yang Dimohonkan	Total Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan
17			31 Mai 2024	https://ppid.kkp.go.id/admin/uploads/response/651a50d3b5a783393de8ab10b8b34ef0.pdf	6			
18			6 Juni 2024	Permohonan wawancara untuk memperoleh data dan informasi terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut	2			
19			7 Juni 2024	Wawancara penelitian Mahasiswa Kajian Ketahanan Nasional SKSG UI atas nama Yoga Maulidy Prawira ke Direktorat Pengelolaan Ruang Laut Judul Penelitian : Kajian Ketahanan Maritim Indonesia: Analisis Guncangan dan Kapabilitas Nasional. Tujuan Penelitian : Menulis pandangan Para ahli maritim berbagai bidang/keahlian terkait perspektif masing-masing atas konsep ketahanan maritim Indonesia	1			
20			20 Juni 2024	data dan informasi terkait pelaksanaan Abandonment and Site Restoration (ASR) Migas berupa penggunaan kembali instalasi migas menjadi karang buatan dengan model Rig-to-Reef program yang ada di Attaka-EB Platform	4			
21			27 Juni 2024	Kebutuhan garam keseluruhan (garam rumah tangga dan industri) (ton) tahun 2001- 2023, Persediaan garam keseluruhan (garam rumah tangga dan industri) (ton) tahun 2001- 2023, permintaan garam keseluruhan (garam rumah tangga dan industri) (ton) tahun 2001- 2023	10			
22			16 Juli 2024	Wawancara langsung/tidak langsung terkait praktik Blue Bond dalam mendukung Blue Economy menurut prespektif KKP	4			

No	Periode	Jumlah Permohonan Informasi	Tanggal Permohonan Informasi	Data yang Dimohonkan	Total Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan
23	Triwulan III	10	2 Agustus 2024	1) Laporan pemantauan aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi di Kabupaten Rote Ndao beserta Jumlah anggarannya pada tahun 2021, 2022 dan 2023; 2) Laporan kegiatan pelibatan Masyarakat dalam pengawasan kawasan konservasi, khususnya terkait Perlindungan terumbu karang di Kabupaten Rote Ndao beserta anggarannya pada tahun 2021, 2022 dan 2023	2			
24			8 Agustus 2024	Dokumen untuk kepentingan penelitian ini berupa Peraturan perundang-undang yang terkait dengan Pengelolaan kelautan berkelanjutan dan /atau Pengelolaan kelautan berbasis pada konsep Blue Economy	12			
25			23 Agustus 2024	informasi yang resmi hasil verifikasi lapangan kegiatan pemanfaatan ruang laut PT BSW	8			
26			27 Agustus 2024	Shapefile Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur	6			
27			30 Agustus 2024	Data terkait Budidaya Rumput Laut wilayah TNP Laut Sawu. Selengkapnya di https://ppid.kkp.go.id/uploads/userReServices/a97974b8335e8ac8ecbb2bb3c5c6b7fd.pdf	10			
28			17 September 2024	Data kemunculan hiu paus tahun 2016 hingga tahun 2024 dan data Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Gorontalo	4			

No	Periode	Jumlah Permohonan Informasi	Tanggal Permohonan Informasi	Data yang Dimohonkan	Total Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan
29			26 September 2024	Data Realisasi Anggaran Tahun 2023 TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya	3			
30			26 September 2024	Data Realisasi Anggaran Tahun 2023 TNP Laut Sawu dan Sekitarnya	3			
31			30 September 2024	Permohonan observasi lapang mahasiswa UPI di LPSPL Serang	1			

Tabel 63 Rekapitulasi Input dan Validasi Data Produksi Garam Tahun 2024

Provinsi / Kabupaten / Kota		Jumlah Data		Persentase (%)
		Input	Validasi	
Aceh		932	932	100
	Aceh Timur	1	1	100
	Aceh Utara	30	30	100
	Bireuen	289	289	100
	Pidie	369	369	100
	Pidie Jaya	243	243	100
Bali		517	517	100
	Buleleng	94	94	100
	Karangasem	147	147	100
	Klungkung	276	276	100
Gorontalo	Pohuwato	176	176	100
Jawa Barat		214	214	100
	Cirebon	188	188	100
	Indramayu	20	20	100
	Karawang	6	6	100
Jawa Tengah		1.153	1.153	100
	Brebes	139	139	100
	Demak	335	335	100
	Grobogan	270	270	100
	Kebumen	45	45	100
	Pati	338	338	100

Provinsi / Kabupaten / Kota		Jumlah Data		Persentase (%)
		Input	Validasi	
	Rembang	26	26	100
Jawa Timur		1.556	1.556	100
	Bangkalan	130	130	100
	Kota Pasuruan	273	273	100
	Kota Surabaya	70	70	100
	Lamongan	50	50	100
	Pamekasan	99	99	100
	Pasuruan	2	2	100
	Sampang	382	382	100
	Sumenep	307	307	100
	Tuban	243	243	100
Nusa Tenggara Barat		1.105	1.105	100
	Bima	366	366	100
	Kota Bima	89	89	100
	Lombok Barat	200	200	100
	Lombok Timur	400	400	100
	Sumbawa	50	50	100
Nusa Tenggara Timur		2.241	2.241	100
	Belu	231	231	100
	Ende	77	77	100
	Flores Timur	337	337	100
	Kupang	174	174	100
	Lembata	96	96	100
	Malaka	93	93	100

Provinsi / Kabupaten / Kota		Jumlah Data		Persentase (%)
		Input	Validasi	
	Manggarai	240	240	100
	Nagekeo	72	72	100
	Rote Ndao	352	352	100
	Sabu Raijua	128	128	100
	Sumba Timur	54	54	100
	Timor Tengah Selatan	207	207	100
	Timor Tengah Utara	180	180	100
Sulawesi Selatan		856	856	100
	Jeneponto	35	35	100
	Pangkajene Kepulauan	820	820	100
	Takalar	1	1	100
Sulawesi Tengah		381	381	100
	Buol	1	1	100
	Kota Palu	380	380	100
Jumlah Total		9.131	9.131	100

Tabel 64 Daftar Pemantauan dan Evaluasi Dokumen PKS lingkup DJPKRL Tahun 2024

No	Para Pihak dalam NK/PKS	Judul	Masa Berlaku		% Implementasi
			Mulai	Berakhir	
1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan Yayasan WWF Indonesia	Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Hayati Kelautan Serta Wisata Bahari di Wilayah Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	30 Juni 2021	18 Oktober 2024	100
2	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dan Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara (REKAM)	Sinergi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Indonesia	6 Juli 2021	6 Juli 2024	100
3	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan Yayasan Pusat Segitiga Karang (CTC)	Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Kelautan	29 November 2021	29 November 2024	100
4	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dan Asosiasi Dokter Hewan Megafauna Akuatik Indonesia (IAM FLYING VET) Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI)	Penguatan Koordinasi Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut dan Medik Veteriner dalam Penanganan Jenis Ikan Dilindungi	29 November 2021	29 November 2024	100
5	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dan Pusat Riset Oseanografi BRIN	Pemantauan dan Penyatuan Data Kesehatan Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Lainnya di Perairan Wilayah Republik Indonesia	18 Januari 2022	18 Januari 2025	83

No	Para Pihak dalam NK/PKS	Judul	Masa Berlaku		% Implementasi
			Mulai	Berakhir	
6	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan FIKP Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)	Dukungan Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Penguatan Sumber Daya Manusia	21 April 2022	21 April 2025	100
7	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan FPK Universitas Riau (UNRI)	Dukungan Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Penguatan Sumber Daya Manusia	3 Juni 2022	3 Juni 2025	100
8	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan PT. PLN (Persero)	Kesinergian Pengembangan Sarana dan Prasarana Program Pengelolaan Ruang Laut	14 Juni 2022	14 Juni 2025	100
9	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk / PT. BRI (Persero) Tbk.	Penyediaan dan Penggunaan Jasa Layanan Perbankan Dalam Pelaksanaan Program Pengelolaan Ruang Laut	20 Juni 2022	20 Juni 2025	100
10	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan PT. Astra Daihatsu Motor	Pengelolaan Penyu dan Ekosistemnya di Indonesia	29 Juli 2022	29 Juli 2025	100
11	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati Pesisir dan Laut	5 September 2022	5 September 2025	100
12	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia (YKCI/ YKI)	Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir, Pulau-pulau kecil, Kawasan konservasi, dan Keanekaragaman Hayati Perairan	11 Oktober 2022	11 Oktober 2025	100

No	Para Pihak dalam NK/PKS	Judul	Masa Berlaku		% Implementasi
			Mulai	Berakhir	
13	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dan Yayasan LINI	Penguatan Pengelolaan Konservasi dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut	22 Desember 2022	22 Desember 2025	100
14	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dan Yayasan Terumbu Karang Indonesia (TERANGI)	Penguatan Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Kawasan Konservasi	22 Desember 2022	22 Desember 2025	100
15	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)	Dukungan Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	14 Maret 2023	14 Maret 2026	100
16	Ditjen PKRL dan PT Semen Padang	Program Pengelolaan Sampah di Wilayah Laut dan Pesisir Kota Padang Melalui Aplikasi Nabuang Sarok	10 Mei 2023	10 Mei 2026	100
17	Ditjen PKRL dan PKSPL IPB	Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Beserta Ekosistemnya	16 Agustus 2023	16 Agustus 2026	100
18	Direktorat KEBP dan Yayasan Reef Check Indonesia	Pengelolaan dan Terumbu Karang di Indonesia	15 September 2023	15 September 2026	100
19	Direktorat P4K dan PT Iklim Muda Sentosa (Carbonethics)	Rehabilitasi Lamun dan Pemberdayaan Masyarakat	3 November 2023	3 November 2026	100

No	Para Pihak dalam NK/PKS	Judul	Masa Berlaku		% Implementasi
			Mulai	Berakhir	
20	Direktorat P4K dan Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (YAKOPI)	Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	3 November 2023	3 November 2026	75
21	Ditjen PKRL dan Yayasan Pesisir Lestari (YPL)	Pengelolaan Kolaboratif Wilayah Pesisir dan Kawasan Konservasi serta Other Effective Area-Based Conservation Measures Berbasis Kearifan Lokal	27 November 2023	27 November 2026	100
22	Ditjen PKRL dan Perkumpulan Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Konservasi Alam (YAPEKA)	Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Masyarakat dan Other Effective Area-Based Conservation Measures di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	27 November 2023	27 November 2026	100
23	Direktorat KEBP dan Yayasan Institut Sumberdaya Dunia (WRI)	Penguatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Dalam Melindungi	7 Februari 2024	7 Februari 2027	100
24	Ditjen PKRL dan Fakultas Geografi UGM	Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Ekosistem Kawasan Konservasi, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Dukungan Penataan Ruang Laut	6 Maret 2024	6 Maret 2027	28
25	Ditjen PKRL dan Fakultas Hukum UGM	Peningkatan Kapasitas SDM, Penelitian, Dukungan Pembentukan	6 Maret 2024	6 Maret 2027	100

No	Para Pihak dalam NK/PKS	Judul	Masa Berlaku		% Implementasi
			Mulai	Berakhir	
		PUU dan Advokasi Hukum di Bidang PKRL			
26	Direktorat P4K dan PT Free the Sea dan ITEBA	Pengelolaan Sampah di Pulau Buluh	25 April 2024	25 April 2027	100
27	Ditjen PKRL (PIC Dit. P4K) dengan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kemendikbud	Dukungan Pelaksanaan Gerakan Sekolah Sehat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	28 Mei 2024	28 Mei 2027	100
28	Dit. P4K dan Fakultas MIPA UNILA	Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Ekosistemnya Melalui Dukungan Kajian, Penguatan Kapasitas SDM, dan Pemberdayaan Masyarakat	20 Juni 2024	20 Juni 2027	40
29	Ditjen PKRL (PIC BPSPL Pontianak) dan Pemkab Kutai Kartanegara	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Karatanegara	28 Mei 2024	28 Mei 2027	100
30	BKKPN Kupang dan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada (FB UGM)	Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengelolaan Sumber Daya Hayati Laut di Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya	29 November 2021	29 November 2024	75

No	Para Pihak dalam NK/PKS	Judul	Masa Berlaku		% Implementasi
			Mulai	Berakhir	
31	BPSPL Denpasar dan Fak. Kedokteran Hewan Universitas Airlangga (UNAIR)	Pengelolaan, Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	24 Agustus 2021	24 Agustus 2024	75
32	LPSPL Serang dan PT. Mutiara Hitam Pertiwi	Konservasi Ekosistem Terumbu Karang dan Pengembangan Ekowisata Bahari Desa Carita Kab. Pandeglang Banten	29 Juni 2021	29 Juni 2024	100
33	LPSPL Serang dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA)	Penguatan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut	16 Agustus 2021	16 Agustus 2024	100
34	BPSPL Padang dan Yayasan Hutan Biru (YHB)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya dan Kawasan Konservasi di Perairan Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau	10 Desember 2021	10 Desember 2024	100
35	BPSPL Makassar dan Universitas Muhamadiyah Kendari	Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja Sulawesi Tenggara	29 November 2021	29 November 2024	75

No	Para Pihak dalam NK/PKS	Judul	Masa Berlaku		% Implementasi
			Mulai	Berakhir	
36	BPSPL Makassar dan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim (ITBM) Balik Diwa Makassar	Penguatan Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Sumber Daya Hayati Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Sulawesi Selatan	29 November 2021	29 November 2024	67
37	BPSPL Makassar dan Universitas Muhamadiyah Sinjai	Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kabupaten Sinjai dan Sekitarnya	29 November 2021	29 November 2024	100
38	LPSPL Serang dan Fakultas Pertanian Universitas Lampung (UNILA)	Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut di Provinsi Lampung	3 November 2021	3 November 2024	75
39	BPSPL Denpasar dan PT. Indonesia Power PLTU Jeranjang OMU	Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Terumbu Karang dan Mangrove di Wilayah Pesisir Lombok, Nusa Tenggara Barat	29 November 2021	29 November 2024	100
40	BPSPL Padang dan Tuah Basamo Diving	Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Laut Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat	19 Mei 2022	19 Mei 2025	100
41	LPSPL Serang dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bengkulu	Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Bengkulu	6 April 2022	6 April 2025	100

No	Para Pihak dalam NK/PKS	Judul	Masa Berlaku		% Implementasi
			Mulai	Berakhir	
42	LPSPL Sorong dan Fakultas Matematika dan IPA Universitas Cenderawasih (UNCEN)	Penguatan Sumber Daya Manusia di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Papua	19 September 2022	19 September 2025	0
43	LPSPL Sorong dan Fakultas Perikanan dan Kehutanan Universitas Muhammadiyah Maluku (UNIMKU)	Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Laut di Provinsi Maluku	10 Oktober 2022	10 Oktober 2025	50
44	BPSPL Pontianak dan Yayasan Konservasi RASI Indonesia	Konservasi dan Keanekaragaman Hayati di Perairan Kalimantan	8 Desember 2022	8 Desember 2025	100
45	BPSPL Denpasar dan Fakultas Pertanian, Universitas Mataram	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengabdian Masyarakat dalam Rangka Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Secara Berkelanjutan di Wilayah BPSPL Denpasar	17 November 2022	17 November 2025	100
46	BPSPL Denpasar dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengabdian Masyarakat dalam Rangka Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Secara Berkelanjutan di Wilayah BPSPL Denpasar	17 November 2022	17 November 2025	33

No	Para Pihak dalam NK/PKS	Judul	Masa Berlaku		% Implementasi
			Mulai	Berakhir	
47	LPSPL Serang dan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung	Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	18 November 2022	18 November 2025	50
48	LPSPL Serang dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro (FPIK UNDIP)	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Serang	13 Desember 2022	13 Desember 2025	80
49	BPSPL Denpasar dan Akademi Penerbang Indonesia (API) Banyuwangi Kemenhub	Optimalisasi Aset Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi dalam rangka Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	21 Desember 2022	21 Desember 2025	50
50	LKKPN Pekanbaru dan Universitas Bung Hatta	Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat di Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat	29 November 2021	29 November 2024	100
51	BPSPL Padang dan Yayasan Penyu Indonesia (YPI)	Perlindungan Penyu dan Pantai Penelurannya di Wilayah Kerja BPSPL Padang	11 Agustus 2023	11 Agustus 2026	86
52	BPSPL Makassar dan Fakultas Teknik UNHAS	Penguatan SDM dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	20 Mei 2024	20 Mei 2027	50

No	Para Pihak dalam NK/PKS	Judul	Masa Berlaku		% Implementasi
			Mulai	Berakhir	
53	BPSPL Denpasar dan Yayasan Penyu Banyuwangi	Konservasi Penyu dan Habitatnya di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur	3 Mei 2024	3 Mei 2027	50
54	LPSPL Serang dan Fakultas Pertanian Untidar	Penguatan Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Sumber Daya Ekosistem dan Biota Perairan di Provinsi Jawa Tengah	24 April 2024	24 April 2027	33
Nilai Persentase Rata-Rata					82,5

Tabel 65 Nilai WBK Unit Kerja di Lingkup DJPKRL

No	Unit Kerja	Waktu Penilaian	Nilai WBK	Data Dukung
1	Direktorat Jasa Kelautan	Hasil Pemantauan Inspektur I tanggal 27 s.d 31 Mei 2024	21,07	Surat Inspektur I Nomor: B.85/ITJ.1/HP.550/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 hal: Hasil Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Direktorat Jasa Kelautan
2	Direktorat Penataan Ruang Laut	Hasil Pemantauan Inspektur I tanggal 27 s.d 31 Mei 2024	29,80	Surat Inspektur I Nomor: B.96/ITJ.1/HP.550/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 hal: Hasil Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada pada Direktorat Penataan Ruang Laut, Ditjen PKRL
3	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Hasil Pemantauan Inspektur I tanggal 27 s.d 31 Mei 2024	33,67	Surat Inspektur I Nomor: B.97/ITJ.1/HP.550/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 hal: Hasil Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
4	Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	Hasil Pemantauan Inspektur I tanggal 27 s.d 31 Mei 2024	58,02	Surat Inspektur I Nomor: B.95/ITJ.1/HP.550/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 hal: Hasil Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Direktorat Kawasan Ekosistem dan Biota Perairan
5	BKKPN Kupang	Hasil Seleksi Inspektorat Jenderal KKP tanggal 20 September 2024	93,29	Surat Inspektur Jenderal Nomor: B.296/ITJ/KP.730/IX/2024 tanggal 20 September 2024 hal: Hasil Seleksi Pemantauan Keberlanjutan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KKP Tahun 2024

No	Unit Kerja	Waktu Penilaian	Nilai WBK	Data Dukung
6	LKKPN Pekanbaru	Hasil Seleksi Inspektorat Jenderal KKP tanggal 20 September 2024	91,84	Surat Inspektur Jenderal Nomor: B.296/ITJ/KP.730/IX/2024 tanggal 20 September 2024 hal: Hasil Seleksi Pemantauan Keberlanjutan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KKP Tahun 2024
7	BPSPL Padang	Hasil Seleksi Inspektorat Jenderal KKP tanggal 20 September 2024	90,40	Surat Inspektur Jenderal Nomor: B.296/ITJ/KP.730/IX/2024 tanggal 20 September 2024 hal: Hasil Seleksi Pemantauan Keberlanjutan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KKP Tahun 2024
8	BPSPL Pontianak	Hasil Penilaian TPN KemenPANRB tahun 2022	90,81	Surat Inspektur Jenderal Nomor: B. 150/ITJ.5/KP.730/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 hal: Hasil Pemantauan Zona Integritas Lingkup KKP Tahun 2022
9	BPSPL Denpasar	Hasil Pemantauan Penilaian TPI KKP tahun 2022	87,57	Surat Inspektur Jenderal Nomor: B. 150/ITJ.5/KP.730/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 hal: Hasil Pemantauan Zona Integritas Lingkup KKP Tahun 2022
10	BPSPL Makassar	Hasil Pemantauan Penilaian TPI KKP tahun 2022	87,41	Surat Inspektur Jenderal Nomor: B. 150/ITJ.5/KP.730/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 hal: Hasil Pemantauan Zona Integritas Lingkup KKP Tahun 2022
11	LPSPL Serang	Hasil Pemantauan Penilaian TPI KKP Tahun 2023	86,58	Surat Inspektur Jenderal Nomor: B.159/ITJ.5/HP.550/IV/2023 tanggal 14 April 2023 hal: Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas pada LPSPL Serang
12	LPSPL Sorong	Hasil Penilaian TPI KKP tahun 2021	81,64	Berita Acara Hasil Penilaian TPI KKP Tahun 2021 Nomor: 12.11.68/ITJ.5/KP.750/XI/2021 tanggal 21 November 2021

Tabel 66 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik DJPKRL Tahun 2024

No	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Jenis Layanan	Nama Layanan	Hasil Evaluasi		Penilai
			Nilai	Predikat	
1	Direktorat Perencanaan RuangLaut 1 Layanan Administratif	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)	4,08	A- (Sangat Baik)	Inspektorat I
			4,08	A- (Sangat Baik)	
2	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2 Layanan Administratif	Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing	4,21	A- (Sangat Baik)	Inspektorat III
		Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km ² (Seratus Kilometer Persegi).	3,80	A- (Sangat Baik)	
			4,23	A- (Sangat Baik)	
3	Direktorat Konservasidan KeanekaragamanHayati Laut 3 Layanan Administratif	Penerbitan Surat Angkut JenisIkan Luar Negeri	4,49	A- (Sangat Baik)	Inspektorat I
		Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan	4,28	A- (Sangat Baik)	
		Penerbitan Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi	4,13	A- (Sangat Baik)	
			4,30	A- (Sangat Baik)	
4	Direktorat JasaKelautan 1 Layanan Administratif	Penerbitan Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)	4,08	A- (Sangat Baik)	Inspektorat III
		Penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi (IPR)	4,08	A- (Sangat Baik)	
			4,08		

No	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Jenis Layanan	Nama Layanan	Hasil Evaluasi		Penilai
			Nilai	Predikat	
5	BPSPL Padang 2 Layanan Administratif	Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri(SAJI-DN)	4,89	A (Pelayanan Prima)	Tim PEKPPP KKP
		Surat Rekomendasi Jenis Ikan Dalam Negeri	4,87	A (Pelayanan Prima)	
			4,88	A (Pelayanan Prima)	
6	BPSPL Pontianak 2 Layanan Administratif	Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri(SAJI-DN)	4,897	A (Pelayanan Prima)	Tim PEKPPP KKP
		Surat Rekomendasi Jenis Ikan Dalam Negeri	4,897	A (Pelayanan Prima)	
			4,897	A (Pelayanan Prima)	
7	BPSPL Makassar 2 Layanan Administratif	Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN)	4,867	A (Pelayanan Prima)	Inspektorat I
		Surat Rekomendasi Jenis Ikan Dalam Negeri	4,862	A (Pelayanan Prima)	
			4,865	A (Pelayanan Prima)	
8	BPSPL Denpasar 2 Layanan Administratif	Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri(SAJI-DN)	4,814	A (Pelayanan Prima)	Tim PEKPPP KKP
		Surat Rekomendasi Jenis Ikan Dalam Negeri	4,813	A (Pelayanan Prima)	
			4,813	A (Pelayanan Prima)	
9	BKKPN Kupang 2 Layanan Administratif	Karcis Masuk Kawasan Konservasi untuk Kegiatan Pariwisata Alam Perairan (PAP)	4,890	A (Pelayanan Prima)	
		Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Penelitian	4,776	A (Pelayanan Prima)	

No	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Jenis Layanan	Nama Layanan	Hasil Evaluasi		Penilai
			Nilai	Predikat	
			4,833	A (Pelayanan Prima)	Tim PEKPPP KKP
10	LPSPL Serang 2 Layanan Administratif	Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri(SAJI-DN)	4,906	A (Pelayanan Prima)	
		Surat Rekomendasi Jenis Ikan DalamNegeri	4,864	A (Pelayanan Prima)	
			4,885	A (Pelayanan Prima)	Tim PEKPPP KKP
11	LPSPL Sorong 2 Layanan Administratif	Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri(SAJI-DN)	4,761	A (Pelayanan Prima)	
		Surat Rekomendasi Jenis Ikan DalamNegeri	4,767	A (Pelayanan Prima)	
			4,764	A (Pelayanan Prima)	Tim PEKPPP KKP
12	LKKPN Pekanbaru 2 Layanan Admiinistratif	Karcis Masuk Kawasan Konservasi untuk Kegiatan Pariwisata AlamPerairan (PAP)	4,92	A (Pelayanan Prima)	
		Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Penelitian	4,90	A (Pelayanan Prima)	
		Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Pendidikan	4,94	A (Pelayanan Prima)	
			4,92	A (Pelayanan Prima)	Tim PEKPPP KKP